



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

<https://www.lampungtimurkab.go.id/>

Makmur Rakyatnya #
Lestari Alamnya



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2025, serta sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan pembangunan daerah, seiring dengan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026 dan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan LKjIP Tahun 2025 tetap berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, serta dokumen perencanaan periode sebelumnya, yang masih digunakan sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja pada Tahun 2025.

Dalam konteks transisi tersebut, LKjIP ini juga memuat uraian keterkaitan dan kesinambungan arah kebijakan pembangunan daerah antara perencanaan periode sebelumnya dengan perencanaan periode 2025–2029. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai upaya penyesuaian dan penguatan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian visi dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

LKjIP Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai capaian sasaran strategis daerah, indikator kinerja utama, serta analisis atas keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Informasi kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan

pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di masa yang akan datang.

Selain sebagai wujud akuntabilitas kepada pemerintah pusat dan masyarakat, LKjIP ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung reformasi birokrasi, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Lampung Timur, 7 Maret 2026

Bupati Lampung Timur

Ela Siti Nuryamah



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
Jl. Buay Beliuk Sukadana Kabupaten Lampung Timur Kode Pos 34194

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Lampung Timur, 16 Maret 2026

INSPEKTUR,



Drs. TARMIZI

Pembina Utama Muda

NIP. 19671028 198909 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
Jl. Buay Beliuk Sukadana Kabupaten Lampung Timur Kode Pos. 34194

Sukadana, 16 Maret 2026

Nomor : 700/ 056 /02-SK/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025.

Kepada
Yth. BUPATI LAMPUNG TIMUR
di -
SUKADANA

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lampung Timur Nomor : 700/54/02-SK/2026 tanggal 23 Januari 2026 untuk melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari s/d 10 Maret 2026.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

- Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Sedangkan sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah mencakup seluruh komponen LKjIP, meliputi penelaahan terhadap format laporan, kelengkapan struktur, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

6. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

1) Kesesuaian Format dan Kelengkapan Struktur

Kesimpulan terhadap format dan kelengkapan struktur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Bab Yang Direviu	Kesesuaian	Keterangan Reviu
1	2	3	4
1.	Halaman judul	Sesuai	Tersedia jelas.
2.	Kata Pengantar	Sesuai	tersedia jelas, ditandatangani Bupati dan tahun (2025).
3.	LHR Inspektoat	Kurang Sesuai	Tidak dicantumkan dalam dokumen.
4.	Ikhtisar Eksekutif	Sesuai	Tersedia dengan baik, merangkum capaian utama (12 sasaran strategis), analisis SAKIP, dan rencana tindak lanjut (halaman xii-xv) - Telah menyajikan ringkasan capaian kinerja strategis, nilai

1	2	3	4
			SAKIP, dan rekomendasi. Ringkas dan Informatif, sangat baik langsung menyajikan tabel capaian IKU dan Nilai SAKIP.
5.	Daftar Isi, Tabel, Gambar	Sesuai	Tersedia lengkap (halaman xvi-xxii).
6.	BAB I Pendahuluan	Sesuai	Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta gambaran umum organisasi (geografi, demografi, pemerintahan, ASN, isu strategis). Konteks masa transisi perencanaan (RPJMD 2021-2026 ke 2025-2029) dijelaskan dengan baik.
7.	BAB II Perencanaan Kinerja	Sesuai	Menyajikan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU (lengkap dengan rumus perhitungan, Tabel 2.1), dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Tabel 2.2).
8.	BAB III Akuntabilitas Kinerja	Kurang Sesuai	Menyajikan metodologi pengukuran, pengukuran target, capaian kinerja sasaran strategis - Menyajikan capaian 12 sasaran strategis dengan analisis yang mendalam dan komprehensif (halaman 41-194). Ketersediaan Data Pembanding Provinsi/Nasional tahun 2025 untuk beberapa indikator belum tersedia.
9.	BAB IV Penutup	Sesuai	Menyajikan kesimpulan umum capaian dan rekomendasi perbaikan kinerja untuk Tahun 2026 (halaman 196-199).
10.	Lampiran	Sesuai	Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 dan Program Perubahan tahun 2025 terlampir

2) Mekanisme Penyusunan

1. Laporan Kinerja IP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.
2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai.
3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja sudah memadai (telah dibuatkan SOP).

4. Telah terdapat daftar penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Data/informasi kinerja yang disajikan telah diyakini keandalannya.
6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait.
7. Laporan Kinerja IP merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.

3) Substansi LKjIP

1. Aspek Perencanaan Kinerja

- a. Kesesuaian dengan RPJMD;
Hasil Reviu: Sasaran dan indikator kinerja telah sesuai dengan RPJMD 2021-2026. Penjelasan mengenai masa transisi perencanaan disampaikan dengan baik sebagai konteks pelaporan tahun 2025;
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU);
Hasil Reviu: IKU untuk 12 sasaran strategis telah ditetapkan dengan jelas. Rumus perhitungan untuk setiap indikator disajikan secara lengkap (Tabel 2.1, halaman 35-37);
- c. Perjanjian Kinerja ;
Hasil Reviu: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta targetnya disajikan dengan jelas (Tabel 2.2, halaman 39).

2. Aspek Pengukuran Kinerja

- a. Metodologi Pengukuran
Metodologi pengukuran kinerja dijelaskan dengan baik, mencakup rumus untuk indikator dengan polaritas berbeda (semakin tinggi semakin baik, dan sebaliknya) serta skala pengukuran capaian (halaman 42-43);
- b. Keandalan Data
Sumber data capaian sebagian besar disebutkan dengan jelas (BPS, data OPD teknis, hasil evaluasi KemenPANRB, BNPB), sehingga mendukung keandalan informasi;
- c. Konsistensi Data
Data target dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.2) konsisten dengan data yang digunakan dalam pengukuran capaian di Bab III (Tabel 3.2).

3. Aspek Pelaporan dan Analisis Kinerja

- a. Sasaran Strategis 1, Pertumbuhan Sektor Pertanian. Indikator: PDRB Pertanian (2,5% - 7,85%, Capaian 314%);
 - Analisis sangat baik. Mencakup perbandingan dengan tahun lalu, target RPJMD, dan capaian provinsi. Faktor keberhasilan, kendala, dan solusi dijelaskan secara rinci. Dilengkapi analisis efisiensi anggaran;

- Target perlu dikalibrasi di masa mendatang dengan pendekatan yang lebih realistis dan adaptif, proyeksi harus mempertimbangkan tren capaian 3-5 tahun terakhir, analisis resiko sektoral (iklim, hama) serta fluktuasi harga komoditas. Hal ini sejalan dengan rekomendasi perbaikan dari LHE SAKIP (halaman 7), agar target kinerja mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya (berbasis tren).
- b. Sasaran Strategis 2, Ketahanan Pangan. Indikator: PDRB Pertanian Skor PPH (92 → 90,12, Capaian 97,96%);
 - Analisis baik. Didukung data konsumsi pangan. Faktor penghambat dan solusi strategis dipaparkan dengan detail. Analisis efisiensi anggaran dilakukan.
- c. Sasaran Strategis 3, Kemantapan Infrastruktur. Indikator: Indeks Infrastruktur (0,4 – 0,55, Capaian 122,22%);
 - Analisis baik. Rincian komponen indeks disajikan. Perbandingan dengan target dan tahun lalu dilakukan. Analisis efisiensi anggaran disertakan.
- d. Sasaran Strategis 4, Kualitas SDM. Indikator: Indeks Pembangunan Manusia/IPM (73,75 – 73,92, Capaian 100,2%);
 - Analisis sangat baik. Komponen IPM (AHH, HLS, RLS, APS, pengeluaran) dianalisis secara rinci. Perbandingan dengan provinsi dan nasional dilakukan. Analisis efisiensi anggaran.
 - Meskipun data IPM Nasional tahun 2025 saat laporan disusun belum tersedia, LKjIP Lampung Timur tetap melakukan analisis komparatif dengan menggunakan data tahun 2024 (sebesar 75,90) sebagai pembanding. Ini adalah praktik yang baik untuk tetap memberikan gambaran posisi relatif daerah.
- e. Sasaran Strategis 5, Penurunan Kemiskinan. Indikator: % Penduduk Miskin (12,97% → 12,15%, Capaian 106,75%);
 - Analisis sangat baik. Tren 10 tahun, perbandingan provinsi/nasional, faktor keberhasilan, dan solusi dijelaskan secara komprehensif. Analisis efisiensi anggaran.
- f. Sasaran Strategis 6, Pertumbuhan Ekonomi. Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE (4,35% → 4,65%, Capaian 106,9%);
 - Analisis baik. Tren dan perbandingan dengan provinsi/nasional disajikan. Permasalahan dan solusi strategis dijelaskan. Analisis efisiensi anggaran;
 - Data resmi BPS untuk pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 biasanya baru dirilis pada awal tahun 2026 (Februari atau Maret). Pada saat LKjIP ini disusun (Maret 2026), data tersebut kemungkinan besar sudah atau sedang dalam proses

rilis. Dalam LKjIP, perbandingan dilakukan dengan data tahun-tahun sebelumnya.

- g. Sasaran Strategis 7, Kamtibmas. Indikator: Rasio Kriminalitas (0,92 → 0,92, Capaian 100%);
 - Analisis baik. Tren 5 tahunan dan perbandingan dengan target RPJMD disajikan. Faktor keberhasilan dan solusi dijelaskan. Analisis efisiensi anggaran.
- h. Sasaran Strategis 8, Kualitas Layanan Publik. Indikator: Indeks Pelayanan Publik/IPP (4,03 → 3,66, Capaian 90,82%) & Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (85 → 87,76, Capaian 103,25%);
 - Analisis sangat baik. Analisis IPP dan IKM dipisah dengan jelas. Rekapitulasi hasil SKM per OPD disajikan secara informatif. Faktor keberhasilan, kendala, dan solusi dijelaskan. Analisis efisiensi anggaran;
 - *Dalam tabel perbandingan, kolom IKM Provinsi Lampung tahun 2025 dikosongkan. Pada awal tahun, biasanya data agregat provinsi untuk tahun sebelumnya belum rampung dikompilasi dan divalidasi oleh instansi terkait;*
 - *Data IKM Lampung Timur tahun 2025 adalah 87,76 dan membandingkannya dengan Provinsi tahun 2024 (80,04). Ketidadaan data Provinsi 2025 membuat analisis "tingkat kepuasan masyarakat di Lampung Timur relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi" menjadi kurang valid untuk tahun berjalan.*
- i. Sasaran Strategis 9, Akuntabilitas Pemda. Indikator: Opini BPK (WTP) & Nilai SAKIP (B);
 - Analisis sangat baik. Analisis per komponen SAKIP dan tren 2020-2025 disajikan. Rencana tindak lanjut dari rekomendasi KemenPANRB diuraikan dengan jelas (halaman xv, 139-141). Analisis efisiensi anggaran.
- j. Sasaran Strategis 10, Pertumbuhan Investasi. Indikator: % Pertumbuhan Investasi (20% → 23,26%, Capaian 116,3%);
 - Analisis baik. Realisasi investasi dan faktor eksternal (pemilu) dianalisis. Perbandingan provinsi/nasional disajikan. Solusi strategis dipaparkan. Analisis efisiensi anggaran.
- k. Sasaran Strategis 11, Mitigasi Bencana. Indikator: Indeks Ketahanan Daerah/IKD (0,48 → 0,75, Capaian 156,25%);
 - Analisis sangat baik. Perbandingan IKD dengan kab/kota se-provinsi disajikan. Terdapat penggunaan analisis kekuatan (strength), kesenjangan (gap analysis) yang substantif, dan risiko ke depan. Analisis efisiensi anggaran;

- *Data komparatif IKD antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung tersedia dan digunakan dalam halaman 155. Namun, data agregat nasional atau target nasional (misalnya target 90% kabupaten/kota mencapai level menengah-tinggi pada 2029) baru disebut dalam rapat koordinasi dan belum tentu menjadi data pembanding langsung dalam laporan kinerja tahunan;*
 - *Target dan capaian IKD yang sangat tinggi di tahun 2025 memerlukan validasi keberlanjutan. Kalibrasi target di masa mendatang harus diarahkan tidak hanya pada mempertahankan angka 0,75, tetapi pada pemerataan dan penguatan kapasitas riil di seluruh wilayah. Target juga harus mempertimbangkan aspek kualitatif dari ketahanan, bukan hanya kuantitatif dari dokumen, untuk memastikan bahwa peningkatan kapasitas bersifat permanen dan operasional, bukan sekadar administratif sesaat.*
- I. Sasaran Strategis 12, Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH (68,81 → 72,23, Capaian 104,97%);
- *Analisis baik. Komponen IKLH (IKU, IKA, IKL) dianalisis. Perbandingan provinsi/nasional dilakukan. Faktor keberhasilan dan kendala dijelaskan. Analisis efisiensi anggaran*
 - *Data IKLH Provinsi Lampung Tahun 2025 saat ini belum tersedia, sehingga perbandingan pada tahun tersebut belum dapat dilakukan. Hal ini diperkuat oleh mekanisme penilaian KLH yang prosesnya berlangsung sepanjang tahun dan hasilnya baru dipublikasikan di akhir tahun, sehingga pada saat penyusunan LKjIP di awal 2026, data terverifikasi kemungkinan belum dirilis.*
4. Akuntabilitas Keuangan
- a. Keterkaitan Kinerja dan Anggaran:
- Hubungan antara capaian kinerja dengan penggunaan anggaran disajikan dengan sangat baik melalui Tabel 3.4.1 (halaman 174-194) yang menghubungkan setiap program/kegiatan dengan sasaran strategis, lengkap dengan target, realisasi kinerja, dan realisasi anggaran;
- b. Analisis Efisiensi Anggaran:
- Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan analisis yang membandingkan capaian kinerja dengan rata-rata realisasi anggaran program pendukung. Ini merupakan praktik yang sangat baik dan inovatif;

c. **Transparansi Penggunaan Anggaran:**

Realisasi anggaran per program dan kegiatan disajikan secara terbuka dan transparan, memudahkan verifikasi dan evaluasi.

Berdasarkan Reviu yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kepatuhan Formal: Laporan secara umum telah sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, meskipun terdapat kekurangan pada tidak dicantumkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat;
- 2) Mekanisme Penyusunan Laporan telah sesuai Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014;
- 3) Kualitas Substansi:
 1. Informasi kinerja yang disajikan berkualitas, andal, dan transparan. Analisis yang dilakukan mendalam, komprehensif, dan responsif terhadap kebutuhan perbaikan serta rekomendasi evaluasi SAKIP;
 2. Laporan ini menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi, terutama dalam hal pengintegrasian antara capaian kinerja dengan penggunaan anggaran serta analisis efisiensi yang inovatif.

b. Rekomendasi Perbaikan

Meskipun secara umum LKjIP ini sudah baik, terdapat beberapa catatan untuk perbaikan di masa yang akan datang yaitu:

- 1) Laporan Hasil Reviu Inspektorat Tidak Dicantumkan;
- 2) Penetapan Target Kurang Menantang;
- 3) Ketersediaan Data Pembanding Provinsi/Nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur agar:

- 1) Mencantumkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat untuk LKjIP tahun mendatang sebagai bagian dokumen, sebagai bentuk pengendalian internal dan jaminan kualitas sesuai siklus SAKIP;
- 2) Menetapkan target lebih *challenging* dengan mempertimbangkan tren capaian historis, potensi daerah dan *benchmark* dengan daerah lain dikarenakan pada beberapa indikator seperti sektor pertanian dan mitigasi bencana terdapat capaian yang sangat tinggi (di atas 150%) hal ini mengindikasikan perlunya reviu dan kalibrasi target di masa mendatang, sejalan dengan rekomendasi perbaikan dari LHE SAKIP (target kinerja agar mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya/berbasis tren);
- 3) Mengantisipasi untuk beberapa indikator dimana data pembanding provinsi/nasional tahun 2025 belum tersedia dengan cara menggunakan data tahun sebelumnya atau proyeksi sebagai pembanding sementara

dan berkoordinasi yang lebih baik dengan BPS dan instansi vertikal lainnya (seperti Kementerian/Lembaga) untuk memastikan ketersediaan data pembandingan.

7. Tindak Lanjut atas Hasil Reviu

Permasalahan pengumpulan data kinerja sudah ditindaklanjuti pada saat reviu berlangsung.

8. Penutup

Demikian Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,



Drs. TARMIZI

Pembina Utama Muda

NIP. 19671028 198909 1 001

Lampiran 1

Laporan Hasil Reviu atas LKjIP Kabupaten Lampung Timur TA. 2025

Nomor : 700/ /02-SK/2026

Tanggal : Maret 2026

FORMULIR CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	Y
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	Y
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	Y
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Y
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Y
		6. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Y
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	Y
		2. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	Y
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	Y
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	Y
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Y
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	Y
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan	Y

		partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Y
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	Y
No	Pernyataan		Check List
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Y
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	Y
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	Y
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Y
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Y
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	Y
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	Y
		10. IKU dan IK telah SMART	Y

INSPEKTUR,

Drs. TARMIZI

Pembina Utama Muda
NIP. 19671028 198909 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan serta Laporan Kinerja. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menegaskan pentingnya penerapan manajemen kinerja secara sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran daerah terukur capaian kinerjanya serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

LKjIP Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan APBD Tahun 2025 sekaligus menjadi laporan kinerja pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Tahun 2025 memiliki arti strategis sebagai fase konsolidasi akhir capaian pembangunan lima tahunan, sehingga evaluasi dilakukan secara komprehensif terhadap tujuan dan sasaran pembangunan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan ini menginformasikan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Semua program yang dilaksanakan sudah mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 Tahun 2025 merupakan tahun kelima dari RPJMD 2021-2026.

LKjIP ini disusun berdasarkan hasil analisis pengumpulan data untuk menginformasikan pencapaian dari 12 (dua belas) sasaran strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik dan stabil, dengan sebagian besar indikator mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Beberapa capaian strategis Tahun 2025 antara lain:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,5	7,85	314
2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92	90,12	97,96
3	Meningkatnya kemantapan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	0,45	0,55	122,22
4	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,75	73,92	100,2
5	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	12,97	12,15	106,75
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	4,35	4,65	106,9
7	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk	0,92	0,92	100
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,03	3,66	90,82
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87,76	103,25
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	100
		Nilai SAKIP	B	B	100
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Pertumbuhan investasi daerah	20	23,26	116,30
11	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah.	0,48	0,75	156,25
12	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	68,81	72,23	104,97

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Final Tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperoleh Nilai Total Evaluasi AKIP sebesar 60,85, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 60,18 Adapun rincian nilai per komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	21,54	22,68
2	Pengukuran Kinerja	30	16,20	15,70
3	Pelaporan Kinerja	15	9,49	9,52
4	Evaluasi Internal	25	12,95	12,95
Nilai Evaluasi AKIP		100	60,18	60,85

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, sebagaimana rekomendasi Kementerian PANRB dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025, LKjIP Tahun 2025 ini menyajikan pengayaan informasi kinerja yang lebih komprehensif dan berorientasi hasil. Penguatan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan penjenjangan (*cascading*) kinerja hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF), perbaikan kualitas indikator agar memenuhi kriteria SMART, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Analisis pengukuran kinerja dilakukan secara lebih mendalam dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja, membandingkan capaian tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya, serta mengaitkannya dengan indikator makro daerah. Selain itu, disajikan pula keterkaitan antara program dan kegiatan beserta dukungan anggarannya terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi capaian kinerja, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis hasil.

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/508/AA.05/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperoleh nilai evaluasi sebesar 60,85 dengan predikat “B”, yang menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan baik pada tingkat pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih memerlukan penguatan dan perbaikan dalam beberapa aspek manajemen kinerja.

Menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan dalam LHE tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja secara berkelanjutan. Rencana tindak lanjut ini diharapkan menjadi instrumen perbaikan sistematis dalam rangka meningkatkan nilai AKIP serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil.

No	Area Perbaikan (Sesuai LHE)	Permasalahan Utama	Rencana Tindak Lanjut
1	Penjenjangan (<i>Cascading</i>) Kinerja	<i>Cascading</i> belum menjabarkan kinerja sampai level operasional dan belum berbasis <i>logical framework</i> & CSF	Melakukan reviu dan penyempurnaan pohon kinerja berbasis <i>logical framework</i> dan <i>Critical Success Factor</i> (CSF) hingga level eselon IV
2	Orientasi Hasil Sasaran PD	Masih terdapat sasaran/indikator belum berorientasi outcome	Reviu dan penyesuaian indikator agar berorientasi hasil dan berdampak langsung kepada masyarakat
3	Target Kinerja Kurang Menantang	Target belum mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya	Penetapan target kinerja berbasis tren capaian 3 tahun terakhir dan proyeksi makro daerah
4	Pemanfaatan TI dalam Pengukuran Kinerja	Monitoring dan evaluasi masih manual	Optimalisasi dan integrasi E-SAKIP dengan SIPD dan sistem perencanaan lainnya
5	Kualitas Indikator Belum SMART	Formulasi indikator belum spesifik dan terukur	Penyusunan pedoman teknis penyusunan IKU berbasis SMART lengkap dengan rumus perhitungan
6	Monitoring & Evaluasi Belum Optimal	Monev triwulanan belum konsisten dilaporkan	Penetapan jadwal monev triwulanan wajib dan publikasi pada portal E-SAKIP Reviu
7	Evaluasi Internal Belum Substantif	LHE internal belum menysasar akar masalah	Penyusunan pedoman evaluasi internal sesuai PermenPANRB 88/2021 dan pelatihan evaluator internal
8	Tindak Lanjut Rekomendasi Belum Dimonitor Berkala	Monitoring RTL belum terstruktur	Pembentukan Tim Monitoring RTL SAKIP dan pelaporan progres setiap triwulan
9	Pemanfaatan Laporan Kinerja Belum Optimal	Laporan belum sepenuhnya menjadi dasar perbaikan perencanaan	Menjadikan hasil LKJIP sebagai dasar penetapan target tahun berikutnya dan forum evaluasi kinerja tahunan

Rekomendasi yang disampaikan melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025 menjadi pijakan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk terus melakukan penyempurnaan manajemen kinerja secara sistematis. Melalui implementasi rencana tindak lanjut yang terarah dan terukur, diharapkan kualitas akuntabilitas kinerja semakin meningkat serta mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Akhirnya, LKJIP Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi instrumen pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur secara berkelanjutan pada periode pembangunan berikutnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Laporan Hasil Reviu Inspektorat	iv
Ikhtisar Eksekutif	xvi
Daftar Isi	xx
Daftar Tabel	xxii
Daftar Gambar	xxvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan	2
1.1.1 Latar Belakang	2
1.1.2 Dasar Hukum	3
1.1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.1.3.1 Maksud Penyusunan Laporan	4
1.1.3.2 Tujuan	5
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur	6
1.2.1 Aspek Geografi dan Luas Wilayah	7
1.2.2 Aspek Demografis	9
1.2.2.1 Jumlah Penduduk	9
1.2.3 Kondisi Pemerintahan	10
1.2.4 Aparatur Pemerintah (Aparatur Sipil Negara)	12
1.2.5 Isu Strategis Pembangunan Daerah	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Kedudukan Perencanaan Kinerja Tahun 2025	18
2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	19
2.2.1 Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	19
2.2.2 Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	21
2.2.2.1 Penjabaran Misi 1	22
2.2.2.2 Penjabaran Misi 2	23
2.2.2.3 Penjabaran Misi 3	24
2.2.2.4 Penjabaran Misi 4	26
2.2.2.5 Penjabaran Misi 5	27
2.2.2.6 Penjabaran Misi 6	27
2.2.2.7 Penjabaran Misi 7	28
2.2.2.8 Penjabaran Misi 8	28
2.2.2.9 Penjabaran Misi 9	29
2.2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	29
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	35
2.4 Perjanjian Kinerja	38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja	42
3.2 Pengukuran Target	43
3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	44
3.3.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.....	45
3.3.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	55
3.3.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kemantapan infrastruktur daerah.....	66
3.3.4 Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia.....	72
3.3.5 Sasaran Strategis 5 Menurunnya persentase penduduk miskin	85
3.3.6 Sasaran Strategis 6 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	96
3.3.7 Sasaran Strategis 7 Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat	105
3.3.8 Sasaran Strategis 8 Meningkatnya kualitas layanan publik	114
3.3.9 Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	128
3.3.10 Sasaran Strategis 10 Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	143
3.3.11 Sasaran Strategis 11 Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	152
3.3.12 Sasaran Strategis 12 Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	162
3.4 Realisasi Penggunaan Anggaran	174
3.4.1 Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Kinerja	174
BAB IV PENUTUP	195
4.1 Kesimpulan Umum Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025	196
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Tahun 2026	197

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur dirinci per Kecamatan.....	8
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Timur, 2025.....	9
Tabel 1.3	Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur	11
Tabel 1.4	Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 1.5	Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Eselon	14
Tabel 1.6	Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kelompok Jabatan	14
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	35
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	39
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja	43
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025	44
Tabel 3.3.1.1	Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2025	46
Tabel 3.3.1.2	Perbandingan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2022–2025	47
Tabel 3.3.1.3	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target RPJMD.....	48
Tabel 3.3.1.4	Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten dengan Provinsi	49
Tabel 3.3.1.5	Program dan Realisasi Anggaran dalam pencapaian indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	53
Tabel 3.3.1.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis: Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	54
Tabel 3.3.2.1	Pola Konsumsi Pangan dan Tingkat Kecukupan Gizi Penduduk Berdasarkan Data Susenas 2025	55
Tabel 3.3.2.2	Capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan	57
Tabel 3.3.2.3	Perbandingan Realisasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan Kinerja tahun 2022 S/D tahun 2025	58

Tabel 3.3.2.4	Program dan Realisasi Anggaran dalam pencapaian indikator Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan.....	63
Tabel 3.3.2.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis: Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah.....	64
Tabel 3.3.3.1	Indikator Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025.....	66
Tabel 3.3.3.2	Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2025 dengan Indikator Indeks Infrastruktur Daerah tahun sebelumnya	67
Tabel 3.3.3.3	Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2025 dengan Indikator Indeks Infrastruktur Daerah dengan target RPJMD	68
Tabel 3.3.3.4	Program dan Realisasi Anggaran dalam pencapaian indikator Indeks Infrastruktur Daerah.....	70
Tabel 3.3.3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis: Meningkatnya kemandirian infrastruktur daerah	71
Tabel 3.3.4.1	Capaian Indeks Pembangunan Manusia	72
Tabel 3.3.4.2	Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 s.d 2025	73
Tabel 3.3.4.3	Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 dengan target RPJMD	74
Tabel 3.3.4.4	Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi dan Nasional	75
Tabel 3.3.4.5	APK, APM, dan APS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2025	79
Tabel 3.3.4.6	Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia	82
Tabel 3.3.4.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	83
Tabel 3.3.5.1	Indikator Persentase Penduduk Miskin	86
Tabel 3.3.5.2	Perbandingan realisasi Indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin tahun 2023 s.d 2025	87
Tabel 3.3.5.3	Perbandingan Realisasi Indikator Indikator Kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD	88
Tabel 3.3.5.4	Perbandingan Realisasi capaian kinerja Indikator Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional	89
Tabel 3.3.5.5	Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Menurunnya persentase penduduk miskin	94
Tabel 3.3.5.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis : Menurunnya Persentase Penduduk Miskin	95
Tabel 3.3.6.1	Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi	96
Tabel 3.3.6.2	Perbandingan Realisasi Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 s.d 2025	97
Tabel 3.3.6.3	Perbandingan Realisasi capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 dengan target RPJMD	98

Tabel 3.3.6.4	Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur, Provinsi dan Nasional	99
Tabel 3.3.6.5	Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	103
Tabel 3.3.6.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	104
Tabel 3.3.7.1	Capaian Indikator Persentase Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk	106
Tabel 3.3.7.2	Perbandingan Realisasi Rasio Angka Kriminalitas Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2025	107
Tabel 3.3.7.3	Perbandingan Realisasi Rasio Angka Kriminalitas Tahun 2025 dengan Target RPJMD	108
Tabel 3.3.7.4	Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat	112
Tabel 3.3.7.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis : Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	113
Tabel 3.3.8.1	Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025.....	115
Tabel 3.3.8.2	Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2023 s.d 2025	116
Tabel 3.3.8.3	Perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik sampai dengan tahun 2025 dengan target RPJMD.....	116
Tabel 3.3.8.4	Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi Lampung	117
Tabel 3.3.8.5	Rekapitulasi Hasil SKM Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.....	120
Tabel 3.3.8.6	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.....	121
Tabel 3.3.8.7	Capaian Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2023 – 2025 .	121
Tabel 3.3.8.8	Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja tahun 2025 dengan target IKU	122
Tabel 3.3.8.9	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung	123
Tabel 3.3.8.10	Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik	125
Tabel 3.3.8.11	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis 8 ..	126
Tabel 3.3.9.1	Capaian Indikator Opini BPK/WTP (opini).....	129
Tabel 3.3.9.2	Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024	129
Tabel 3.3.9.3	Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2025 dengan target RPJMD ..	130
Tabel 3.3.9.4	Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung	130
Tabel 3.3.9.5	Capaian Indikator Nilai SAKIP	134
Tabel 3.3.9.6	Capaian Nilai SAKIP Perkomponen Tahun 2025	135

Tabel 3.3.9.7	Perbandingan Capaian nilai SAKIP Lampung Timur tahun 2020 s.d 2025	135
Tabel 3.3.9.8	Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD	137
Tabel 3.3.9.9	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi	137
Tabel 3.3.9.10	Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	141
Tabel 3.3.9.11	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis 9 ...	142
Tabel 3.3.10.1	Capaian Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah Tahun 2025..	144
Tabel 3.3.10.2	Perbandingan Realisasi capaian Indikator tahun 2025 dengan RPJMD	146
Tabel 3.3.10.3	Perbandingan Realisasi capaian Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional.....	147
Tabel 3.3.10.4	Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	150
Tabel 3.3.10.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis 10 .	151
Tabel 3.3.11.1	Capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah	153
Tabel 3.3.11.2	Perbandingan Realisasi capaian Indikator tahun 2025 dengan RPJMD	154
Tabel 3.3.11.3	Tabel Perbandingan IKD dan IRB Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2024–2025.....	155
Tabel 3.3.11.4	Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	160
Tabel 3.3.11.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis 11 .	161
Tabel 3.3.12.1	Capaian nilai indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.....	164
Tabel 3.3.12.2	Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	165
Tabel 3.3.12.3	Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2024 dengan target RPJMD	166
Tabel 3.3.12.4	Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional	167
Tabel 3.3.12.5	Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	171
Tabel 3.3.12.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis 12 .	172
Tabel 3.4.1	Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja berdasarkan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2025	174
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.....	196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur	7
Gambar 1.2	Grafik Jumlah ASN Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 -2026.....	13
Gambar 2.1	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	30
Gambar 3.1	Skor PPH kabupaten lampung Timur berdasarkan Hasil Susenas Tahun 2025.....	56
Gambar 3.2	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019-2025..	58
Gambar 3.3	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung Tahun 2017-2025.....	76
Gambar 3.4	Tren Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2025	77
Gambar 3.5	Perkembangan Angka HLS dan RLS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2025.....	77
Gambar 3.6	Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lampung Timur (ribu rupiah), 2021–2025.....	81
Gambar 3.7	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Timur, 2014-2025.....	85
Gambar 3.8	Perkembangan Nilai SAKIP Tahun 2020 – 2025	136
Gambar 3.9	Perkembangan investasi Kabupaten Lampung Timur tahun 2020–2025 dalam satuan miliar rupiah	145
Gambar 3.10	Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022 s.d 2025.....	153
Gambar 3.11	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lampung Timur Tahun 2025.....	163
Gambar 3.12	Grafik Tren Peningkatan IKLH Lampung Timur Tahun 2022-2025.....	165



**Laporan Kinerja
Intansi Pemerintah Daerah
Kabupaten lampung Timur
Tahun 2025**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

KABUPATEN LAMPUNG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik menuntut adanya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil. Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

Sebagai perwujudan prinsip tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode sebelumnya. Laporan ini tidak hanya memuat capaian kinerja, tetapi juga menyajikan analisis atas keberhasilan, kendala, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan pembangunan daerah, ditandai dengan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Lampung Timur

Tahun 2021–2026 dan ditetapkan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029. Dalam konteks tersebut, sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penyusunan LKjIP Tahun 2025 tetap berpedoman pada perencanaan dan indikator kinerja periode sebelumnya yang masih digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja pada tahun berjalan.

Meskipun demikian, LKjIP Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan arah kebijakan pembangunan daerah pada masa transisi, guna memberikan gambaran awal mengenai penyesuaian dan penguatan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029 pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, LKjIP ini diharapkan mampu menjembatani kesinambungan perencanaan dan kinerja pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Melalui penyusunan LKjIP ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SAKIP sebagai instrumen manajemen kinerja, sekaligus sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020–2024, sebagai dasar perencanaan kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja Tahun 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029, sebagai arah kesinambungan dan konteks perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi;
10. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025; Dasar hukum tersebut menjadi landasan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025 agar pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan secara terstruktur, terukur, dan akuntabel, serta sejalan dengan kebijakan nasional di bidang akuntabilitas kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.1.3 Maksud dan Tujuan

1.1.3.1 Maksud Penyusunan Laporan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur, sistematis, dan akuntabel, meliputi tingkat pencapaian sasaran strategis daerah, keberhasilan dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2025. Selain itu, LKjIP ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keterkaitan dan kesinambungan kebijakan pembangunan daerah pada masa transisi perencanaan, sebagai dasar penguatan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029.

1.1.3.2 Tujuan

Tujuan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang akurat dan terukur kepada pemerintah pusat dan masyarakat mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta hasil pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025;
- b. Menilai tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- c. Mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan melalui penyediaan informasi kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam rangka perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah pada tahun-tahun berikutnya;
- e. Mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur;
- f. Memberikan dasar penguatan kesinambungan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam masa transisi dari RPJMD periode sebelumnya menuju RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029.

1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa. Kemudian pada Tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan definitif.

Pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 Desa dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 257 desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 264 desa definitif.

Lebih lanjut, sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu *Bumei Tuwah Bepadan*, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

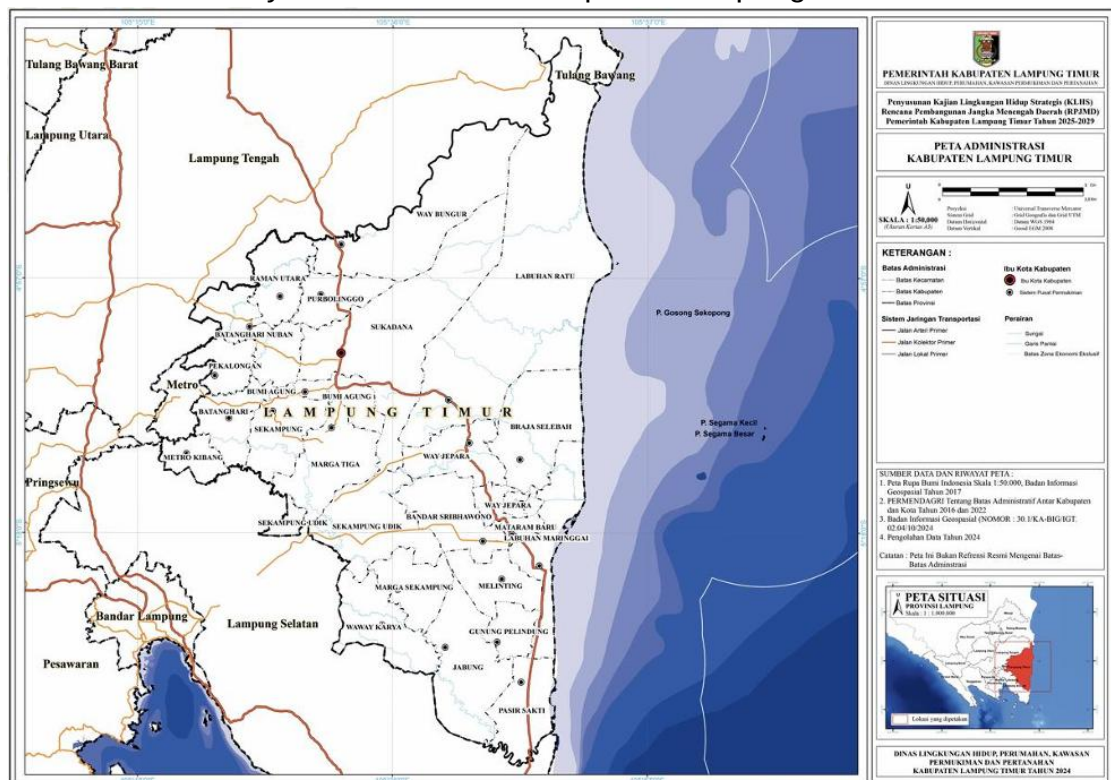
1.2.1 Aspek Geografi dan Luas Wilayah

Secara geografis, letak astronomis Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: 105015' - 106020' Bujur Timur dan 4037'-5037' Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah 5.325,03 km² atau sekitar 15,86 persen dari luas wilayah Provinsi Lampung. Kecamatan yang terluas ialah Sukadana (14,21 persen) dan terkecil ialah Kecamatan Bumi Agung (1,37 persen).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Data Wilayah Administrasi, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2024

Sementara itu, Kabupaten Lampung Timur memiliki lima buah pulau, yaitu Segama Besar Segama Kecil, Batang Besar, Batang Kecil, dan Gosong Sekopong. Tercatat juga ada 6 gunung dan 2 sungai utama, yaitu sungai Way Sekampung dan sungai Way Seputih.

Secara administratif, Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999. Seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan pelayanan pemerintahan, hingga saat ini Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan dan 264 desa. Rincian luas wilayah per kecamatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur dirinci per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas area (km ²)
1	Metro Kibang	Batangharjo	7	76,78
2	Batanghari	Banar Joyo	17	148,88
3	sekampung	Sumber Gede	17	148,34
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	250,73
5	Sekampung udik	Pugung Raharjo	15	339,12
6	Jabung	Negara Batin	15	267,85
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	8	193,94
8	Waway Karya	Labuhan Maringgai	11	211,07
9	Marga	Peniangan	8	177,32
10	Labuhan	Labuhan Maringgai	11	194,99
11	Mataram Baru	Mataram Baru	7	79,56
12	Bandar Sribawono	Sribawono	7	185,71
13	Melinting	Wana	6	139,30
14	Gunung	Negeri Agung	5	78,52
15	Way Jepara	Braja Sakti	15	229,27
16	Braja Selebah	Braja Harjosari	7	247,61
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	485,51
18	Sukadana	Sukadana	20	756,75
19	Bumi Agung	Donomulyo	8	73,17
20	Batang Hari	Sukaraja Nuban	13	180,69
21	Pekalongan	Pekalongan	12	100,13
22	Raman Utara	Kota Raman	11	161,37
23	Purbolinggo	Taman Fajar	12	222,03
24	Way Bunggur	Tambah subur	8	376,38
Jumlah			264	5.325,03

Sumber : BPS Lampung Timur, 2022.

1.2.2 Aspek Demografis

1.2.2.1 Jumlah Penduduk

Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur berdasarkan hasil proyeksi penduduk SP 2020 mencapai 1,164 juta jiwa atau sekitar 12,23 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Lampung. Posisi ini menempatkan Kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten terbanyak ketiga di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung masing-masing sebesar 1,541 juta dan 1,226 juta jiwa. Jika dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Lampung Timur berada pada urutan 2 terluas se-Lampung setelah Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk yang terbilang cukup tinggi. Kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Timur sebesar 302 jiwa per km².

Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang baik dapat menjadi modal pembangunan suatu wilayah, namun jumlah penduduk yang besar tanpa pengelolaan yang baik akan menyebabkan beban untuk pembangunan. Dilihat dari jumlah penduduk, pada tahun 2025 Kecamatan Labuhan Maringgai merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Lampung Timur yaitu sebanyak 80.643 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bumi Agung sebanyak 21.848 jiwa

Rincian laju pertumbuhan penduduk per kecamatan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Lampung Timur, 2025

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2025 (%)
1.	Metro Kibang	25,17	24,59
2.	Batanghari	61,45	12,14
3.	Sekampung	69,10	15,15
4.	Marga Tiga	50,53	16,10
5.	Sekampung Udik	80,17	17,45
6.	Jabung	56,26	20,43
7.	Pasir Sakti	42,97	24,47

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2025 (%)
8.	Waway Karya	43,79	26,88
9.	Marga Sekampung	30,64	17,38
10.	Labuhan Maringgai	81,01	22,79
11.	Mataram Baru	31,52	17,79
12.	Bandar Sribhawono	54,61	17,99
13.	Melinting	29,53	19,56
14.	Gunung Pelindung	24,34	15,33
15.	Way Jepara	60,57	18,18
16.	Braja Slebah	26,59	21,95
17.	Labuhan Ratu	52,69	26,87
18.	Sukadana	79,17	23,11
19.	Bumi Agung	20,95	23,37
20.	Batanghari Nuban	48,99	19,13
21.	Pekalongan	54,49	20,12
22.	Raman Utara	41,03	16,90
23.	Purbolinggo	46,49	15,39
24.	Way Bungur	41,25	25,12
Kabupaten Lampung Timur		1.140,29	19,30

1.2.3 Kondisi Pemerintahan

Susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021.

Dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur didukung oleh 27 perangkat daerah, yang terdiri dari sekretariat, dinas, dan badan daerah, serta 24 kecamatan sebagai perangkat wilayah. Struktur organisasi perangkat daerah ini menjadi unsur penting dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2025.

Tabel 1.3
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
6.	Dinas Kesehatan
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Satuan Polisi Pamong Praja
9.	Dinas Sosial
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.	Dinas Perikanan dan Peternakan
21.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
25.	Badan Pendapatan Daerah
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Kecamatan terdiri dari :	
1.	Kecamatan Metro Kibang
2.	Kecamatan Batanghari
3.	Kecamatan Sekampung
4.	Kecamatan Marga Tiga
5.	Kecamatan Sekampung Udik

Kecamatan terdiri dari :	
6.	Kecamatan Jabung
7.	Kecamatan Pasir Sakti
8.	Kecamatan Waway Karya
9.	Kecamatan Marga Sekampung
10.	Kecamatan Labuhan Maringgai
11.	Kecamatan Mataram Baru
12.	Kecamatan Bandar Sribhawono
13.	Kecamatan Melinting
14.	Kecamatan Gunung Pelindung
15.	Kecamatan Way Jepara
16.	Kecamatan Braja Selebah
17.	Kecamatan Labuhan Ratu
18.	Kecamatan Sukadana
19.	Kecamatan Bumi Agung
20.	Kecamatan Batang Hari Nuban
21.	Kecamatan Pekalongan
22.	Kecamatan Raman Utara
23.	Kecamatan Purbolinggo
24.	Kecamatan Way Bunggur

1.2.4 Aparatur Pemerintah (Aparatur Sipil Negara)

Sebagai dasar penyajian dan analisis data kepegawaian, berikut disampaikan rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan jenis kelamin. Data ini bersumber dari SIASN per 31 Desember 2025 dan menggambarkan komposisi ASN menurut status kepegawaian, yaitu CPNS, PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, yang menjadi landasan dalam memahami struktur sumber daya manusia aparatur serta perencanaan kebijakan kepegawaian daerah.

Tabel 1.4 Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

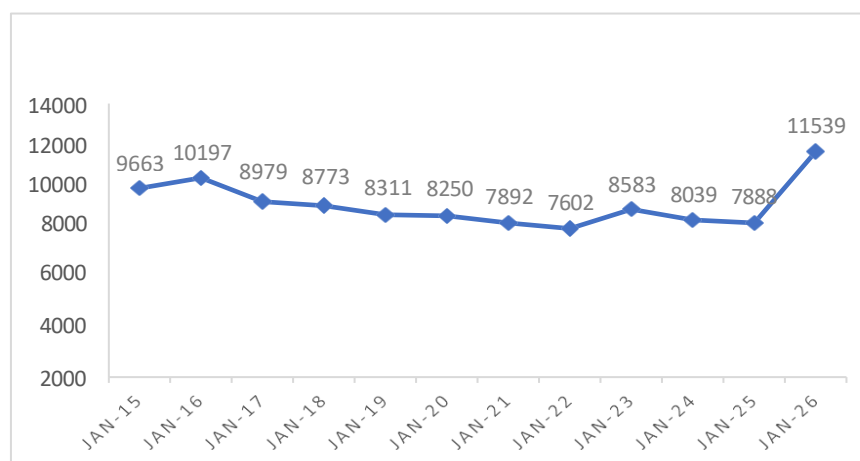
NO	Jenis Kelamin	CPNS	PNS	PPPK	PPPK PW	JML
1	Laki -laki	42	2115	604	1920	4681
2	Perempuan	51	3264	1347	2196	6858
TOTAL		93	5.379	1.951	4.116	11.539

Sumber : Data SIASN 31 Desember 2025

Berdasarkan data per 31 Desember 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebanyak 11.539 pegawai. Komposisi ASN tersebut terdiri atas PNS dan CPNS sebanyak 5.472 pegawai atau 47,42%, serta PPPK dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 6.067 pegawai atau 52,58%. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi pegawai PPPK dan PPPK Paruh Waktu lebih dominan dibandingkan PNS dan CPNS, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gambar 1.2

Grafik Jumlah ASN Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 -2026



Sumber : Data SIASN 31 Desember 2025

Perkembangan jumlah ASN Kabupaten Lampung Timur selama periode 2015–2026 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2015, jumlah ASN tercatat 9.663 pegawai dan sempat meningkat pada 2016 menjadi 10.197 pegawai. Selanjutnya, terjadi penurunan bertahap hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 sebanyak 7.602 pegawai, yang dipengaruhi oleh faktor pensiun pegawai, pembatasan penerimaan CPNS, serta kebijakan penataan ASN secara nasional.

Memasuki tahun 2023, jumlah ASN mulai mengalami peningkatan menjadi 8.583 pegawai, meskipun kembali mengalami fluktuasi pada tahun 2024 dan 2025. Lonjakan yang signifikan terjadi pada tahun 2026, di mana jumlah ASN meningkat tajam menjadi 11.539 pegawai. Kenaikan ini terutama didorong oleh pengangkatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu, sebagai langkah strategis

pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan, menjaga kesinambungan pelayanan publik, serta memperkuat kinerja perangkat daerah.

Secara keseluruhan, data komposisi dan tren jumlah ASN tersebut mencerminkan arah kebijakan penataan kepegawaian Kabupaten Lampung Timur yang menitikberatkan pada optimalisasi peran ASN, khususnya melalui skema PPPK, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, profesional, dan berkelanjutan.

Rincian ASN berdasarkan eselon dan kelompok jabatan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5

Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	CPNS	PNS	PPPK	PPPK PW	JML
1	II-a		1			1
2	II-b		20			20
3	III-a		60			60
4	III-b		117			117
5	IV-a		167			167
6	IV-b		35			35
7	Fungsional	33	4083	1864	1740	7720
8	JFU	60	896	87	2376	3419
TOTAL		93	5379	1951	4116	11.539

Sumber : Data SIASN 31 Desember 2025

Tabel 1.6

Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kelompok Jabatan

NO	JENIS JABATAN	CPN S	PNS	PPPK	PPPK PW	JML
1	Guru		2408	1737	1349	5494
2	Kesehatan		1175	71	391	1637
3	Teknis					
	a. Struktural		401			401
	b. Fungsional Teknis Lainnya	33	498	54		585
	c. Fungsional Umum	60	897	89	2376	3422
TOTAL		93	5.379	1.951	4.116	11.539

Sumber : Data SIASN 31 Desember 2025

1.2.5 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis dalam konteks pembangunan daerah merupakan tantangan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.

Pembangunan daerah tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Isu-isu strategis sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih menghadapi sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama, antara lain:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan;
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan;
3. Penurunan prevalensi stunting dan penyakit menular;
4. Pemenuhan cakupan jaminan Kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat;
6. Percepatan kemantapan infrastruktur dasar konektivitas;
7. Penanganan kawasan kumuh dan wilayah kantong kemiskinan;
8. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan;
9. Pengembangan kawasan sentra hilirisasi perikanan dan peternakan;
10. Pengembangan hilirisasi berbasis potensi unggulan lokal;
11. Penurunan persentase penduduk miskin;
12. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebudayaan lokal dalam mewujudkan semangat sakai sambayan membangun Lampung Timur;
13. Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digitalisasi.
14. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, termasuk peningkatan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki secara adil;

Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Lampung Timur ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Lampung;
- b) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c) Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
- d) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- e) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; serta
- f) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.



**Laporan Kinerja
Intansi Pemerintah Daerah
Kabupaten lampung Timur
Tahun 2025**

**BAB 2
PERENCANAAN KINERJA**

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Kedudukan Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah, seiring dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020–2024 dan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029. Dalam konteks tersebut, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perencanaan dan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 tetap berpedoman pada dokumen perencanaan, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Perjanjian Kinerja periode sebelumnya yang masih digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi kinerja pada tahun berjalan.

Perencanaan kinerja Tahun 2025 disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang telah ditentukan berdasarkan perencanaan periode sebelumnya. Dengan demikian, perencanaan kinerja ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, sekaligus menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Meskipun berpedoman pada perencanaan periode sebelumnya, perencanaan kinerja Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan daerah serta memastikan bahwa pelaksanaan program dan

kegiatan Tahun 2025 tetap mendukung arah pembangunan jangka menengah daerah pada periode selanjutnya.

Dengan kedudukan tersebut, perencanaan kinerja Tahun 2025 berfungsi sebagai jembatan transisi antara perencanaan pembangunan periode sebelumnya dengan perencanaan pembangunan periode 2025–2029. Perencanaan kinerja ini diharapkan mampu memastikan kesinambungan pencapaian kinerja pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada tahun-tahun berikutnya.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

2.2.1 Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

Visi pembangunan daerah merupakan arah dan cita-cita yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah. Visi pembangunan daerah yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 masih mengacu pada visi pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur periode 2021–2026, yaitu:

“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”

Visi tersebut menegaskan bahwa masyarakat merupakan subjek utama pembangunan daerah, dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang diarahkan untuk mewujudkan kejayaan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

a. Kehidupan masyarakat yang religious

Kehidupan masyarakat yang memiliki tata hubungan kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai agama (religius), kearifan lokal dan hukum, sehingga dapat tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Lampung Timur. Hubungan erat dan mendalam antara manusia dengan Tuhan dalam segala kiprah dan karyanya dalam

kehidupan, artinya masyarakat Lampung Timur selalu mengaitkan segala perbuatan, kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan khalik (pencipta hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur. Tata hubungan masyarakat tersebut mencakup hubungan antar dan inter agama, antar suku, antar budaya, senantiasa memegang teguh kebhinekaan dalam suasana yang agamis. Kondisi masyarakat Lampung Timur yang kental sekali dengan nilai-nilai agama akan menjadi modal dasar dalam membangun Lampung Timur kedepan.

b. Kehidupan masyarakat yang berdaya saing

Kehidupan masyarakat yang memiliki kekuatan potensi yang ada untuk dapat bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Aset utama daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya masyarakatnya. Satu juta lebih penduduk Kabupaten Lampung Timur kedepan diharapkan unggul, berkualitas, mampu berkompetisi, bisa berinovasi dan juga kreatif dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan nilai tambah (added value) yang tinggi, guna meningkatkan kualitas hidupnya.

c. Kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Kehidupan masyarakat yang berkeadilan mengandung makna suatu keadaan tatanan dasar kehidupan masyarakat Lampung Timur yang dapat terlayani secara adil dan merata diberbagai bidang kehidupan, dengan cukupnya ketersediaan fasilitas dan pelayanan dasar masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman tenteram dan damai. Tatanan dasar tersebut mencakup infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, iklim usaha yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional, jujur, peduli dan merakyat.

d. Kehidupan masyarakat yang sejahtera

Kehidupan masyarakat yang sejahtera mengandung makna kondisi masyarakat yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, sentosa dan makmur lahir batin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan

pangan, sandang dan papan, sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan keamanan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. Disamping itu pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.

Sejalan dengan berakhirnya periode RPJMD sebelumnya dan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur masa bakti 2025–2030, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan visi pembangunan daerah yang baru sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029, yaitu:

“LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS”

Visi pembangunan daerah pada periode 2025–2029 tersebut merupakan penguatan arah pembangunan dari visi pembangunan daerah pada periode sebelumnya. Makna kemakmuran dalam visi baru mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dan terarah, yang secara substansi sejalan dengan tujuan mewujudkan kejayaan rakyat sebagaimana tertuang dalam visi RPJMD periode 2021–2026. Frasa Menuju Indonesia Emas menegaskan peran pembangunan Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung agenda pembangunan nasional jangka panjang.

Dengan demikian, perumusan visi pembangunan daerah tersebut menjadi dasar dalam menjaga konsistensi arah pembangunan Kabupaten Lampung Timur, memastikan kesinambungan capaian kinerja, serta mendukung proses peralihan perencanaan pembangunan daerah secara tertib, terukur, dan akuntabel.

2.2.2 Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

Misi pembangunan daerah merupakan penjabaran dari visi pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam merumuskan tujuan, sasaran strategis, serta arah pelaksanaan pembangunan daerah. Misi juga berfungsi sebagai dasar penetapan indikator kinerja dan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Misi pembangunan daerah pada periode RPJMD 2021–2026 diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah, penguatan perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Misi atau langkah-langkah umum yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi “Rakyat Lampung Timur Berjaya” Tahun 2021-2026, disebut dengan SIWAO MISEI, terdiri dari :

- Misi – 1 : Meningkatkan Program Petani Berjaya
- Misi – 2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
- Misi – 3 : Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- Misi – 4 : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
- Misi – 5 : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
- Misi – 6 : Meningkatkan good governance (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab).
- Misi – 7 : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memperdayakan sumber daya kearifan lokal.
- Misi – 8 : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana.
- Misi – 9 : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

2.2.2.1 Misi 1

Meningkatkan Program Petani Berjaya

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian melalui Program Petani Berjaya. Dalam rangka percepatan implementasi dan perluasan cakupan, program tersebut akan terintegrasi dengan Program Kartu Petani Berjaya yang telah dilaksanakan oleh

Pemerintah Provinsi Lampung, yang telah mengintegrasikan seluruh kepentingan pertanian dalam arti luas untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan seluruh stake holder secara bersama-sama.

Para pihak yang terlibat dalam program ini direncanakan meliputi petani, distributor benih/pupuk/obat, kelompok tani, penyuluh, kios saprota, lembaga keuangan, buyer/pembeli, dan pemerintah daerah, yang memiliki peran sesuai kewenangannya. Terkait dengan peran perangkat daerah, meliputi fasilitasi kebijakan strategis dan teknis yang berkaitan dengan proses jalannya sistem, fasilitasi teknis yang berkaitan dengan registrasi akun operator masing-masing satuan kerja, dan fasilitasi teknis sosialisasi dan operasional untuk seluruh stake holder dibawahnya.

Implementasi Program Petani Berjaya dalam rangka meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan dilakukan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, melalui jaminan kepastian ketersediaan sarana produksi dalam usaha budidaya pertanian yang terintegrasi.
- b) Peningkatan tata kelola budidaya, penanganan panen dan pasca panen sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, melalui pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi.
- c) Peningkatan peran lembaga keuangan dalam meningkatkan akses keuangan dan permodalan untuk menunjang produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- d) Peningkatan pemasaran hasil usaha pertanian.

2.2.2.2 Misi 2

Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah. Infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan adalah infrastruktur yang meliputi kebutuhan dasar berbasis perdesaan yang dapat berfungsi

sebagai pendorong ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Kemajuan infrastruktur fisik perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan hidup, dilaksanakan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Membangun/memelihara jaringan jalan dan jembatan, irigasi yang berkualitas dan merata untuk melayani pergerakan orang dan barang
- b) Membangun/memelihara infrastruktur pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, kesenian dan budaya yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.
- c) Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih dan sanitasi
- d) Membangun/memelihara infrastruktur pemerintahan dan publik yang mencerminkan identitas Masyarakat Kabupaten Lampung Timur.
- e) Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten dan berkelanjutan.

2.2.2.3 Misi 3

Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas adalah aset utama pembangunan daerah dalam arti yang luas, oleh karenanya pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Lampung Timur.

Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas adalah aset utama pembangunan daerah dalam arti yang luas, oleh karenanya pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan yang lebih berkualitas.

- b) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat yang merata dan berdaya saing.
- c) Mewujudkan sistem pendidikan yang berkarakter dengan memadukan pendidikan agama dan umum.
- d) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang sekolah formal dan non formal.
- e) Peningkatan pelestarian seni dan budaya.
- f) Membangun sarana Balai Latihan Kerja Daerah.
- g) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan.
- h) Peningkatan perlindungan tenaga kerja jaminan sosial tenaga kerja.
- i) Peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga.
- j) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat.
- k) Membangun/memelihara sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang lebih berkualitas.
- l) Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh seluruh masyarakat.
- m) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar kompetensi.
- n) Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan kualitas kehidupan beragama di masyarakat.
- o) Memelihara hubungan harmonis antar dan intern umat beragama, antar suku, dan antar ras yang harmonis.
- p) Pemberian subsidi listrik untuk masjid, pondok pesantren, dan tempat ibadah lainnya.
- q) Pemberian uang duka bagi masyarakat Lampung Timur yang keluarganya meninggal dunia.
- r) Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum marginal dan rentan.
- s) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan social.
- t) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

2.2.2.4 Misi 4

Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal, khususnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor basis daerah, dengan meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya.

Peningkatan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal didukung dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Pengembangan aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan primer dan sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW.
- b) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana kegiatan perekonomian masyarakat dengan mengedepankan potensi ekonomi lokal yang berbasis pada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan
- c) Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- d) Membangun/memelihara pasar daerah, pasar rakyat dan sarana serta prasarana perekonomian masyarakat lainnya secara berkualitas.
- e) Pengembangan sentra industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, serta kawasan industri menengah dan besar.

2.2.2.5 Misi 5

Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam agenda politik daerah maupun nasional. Pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Upaya meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat, kemitraan masyarakat dan Polri/TNI
- b) Menciptakan wilayah yang aman dari tindak kejahatan dengan mengaktifkan program ronda malam dan kamtibmas yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, Polri dan TNI.
- c) Peningkatan sistem komunikasi dan informasi serta kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram.

2.2.2.6 Misi 6

Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab).

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Peningkatan good governance akan fokus pada peningkatan pelayanan publik dan penataan aparatur sipil negara. Peningkatan good governance dilaksanakan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Penataan ASN yang profesional, jujur, peduli dan merakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b) Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan.
- c) Pengintegrasian sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan basis data yang terkini dan akurat.
- d) Implementasi program perencanaan daerah yang partisipatif

- e) Membangun data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- f) Peningkatan inovasi dan kerjasama pemerintah dan dunia usaha.

2.2.2.7 Misi 7

Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan investasi daerah seluas-luasnya bagi dunia usaha pada bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan lokal. Peningkatan peluang usaha dan investasi dilaksanakan melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan investasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- b) Peningkatan investasi sektor pertambangan, energi dan sumber daya mineral.
- c) Peningkatan investasi sektor kepariwisataan
- d) Membuka dan meningkatkan kerjasama BUMD dan BUMDes.

2.2.2.8 Misi 8

Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana. Peningkatan penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana dilaksanakan melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan program penanganan pandemi penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.
- b) Menyelenggarakan program mitigasi, penanggulangan dan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- c) Menyelenggarakan program pencegahan dan pemberantasan narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

2.2.2.9 Misi 9

Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dilaksanakan melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup.
- b) Penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- c) Peningkatan penanganan kasus lingkungan hidup.
- d) Peningkatan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- e) Peningkatan pengelolaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

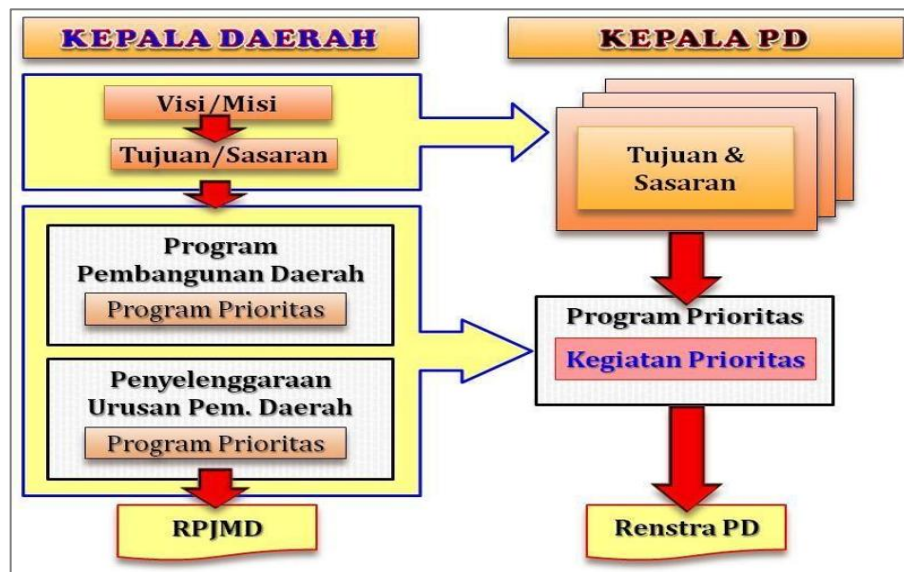
2.2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, termasuk penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahapan penting dalam perencanaan kebijakan (*policy planning*), karena menjadi penghubung antara visi dan misi kepala daerah dengan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam kerangka penerapan penganggaran berbasis kinerja serta prinsip *money follows priority*, perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada program-program prioritas yang berorientasi pada pencapaian target kinerja, baik pada tingkat dampak (*impact*), hasil (*outcome*), maupun keluaran (*output*).

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, yang kemudian menjadi landasan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang kuat antara arah kebijakan kepala daerah dan perencanaan kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Gambar 2.1
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penjabaran Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 terdiri dari :

Misi 1

Meningkatkan Program Petani Berjaya.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%).
		Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah.	Skor Pola Pangan Harapan.

Misi 2

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Multi Sektor Berbasis Pedesaan.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah berbasis pedesaan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan yang mantap dan merata	Tingkat Kemantapan Jalan (%)
			Penurunan kecelakaan lalu lintas (%).
		Peningkatan ketersediaan sumber daya air yang mantap	Persentase luas sawah beririgasi (%)
		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Rumah tangga pengguna sumber air minum bersih (%)
			Persentase angka BABS di tempat terbuka (%).
			Rasio ketersediaan penerangan jalan umum per desa.
			Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni (%).
		Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW
			Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (kecamatan).

Misi 3

Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter Melalui Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Dasar	Harapan Lama Sekolah (tahun)
			Rata-rata lama sekolah (tahun)
		Meningkatkan pelestarian seni dan budaya	Cakupan kelompok kesenian yang difasilitasi (%)
			Cakupan kelompok budaya yang difasilitasi (%)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
		Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
		Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda.
			Peringkat pada even olahraga PORPROV.
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)
		Pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%).
		Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Persentase keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat (%).
		Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG).
			Persentase Desa Layak Anak (%).

Misi 4

Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDES, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi lokal	Meningkatkan peran koperasi, BUMD, dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam perekonomian daerah.	Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%).
		Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%).
			Inflasi Pangan bergejolak (%)
			Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)
			Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB (%)
		Meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (%).

Misi 5

Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan kondisi ketentraman ketertiban masyarakat dan partisipasi politik.	Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk
		Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Indeks Demokrasi

Misi 6

Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab).

No	Tujuan	Sasaran	indikator
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Indeks Profesionalitas ASN
			Nilai SAKIP
			Persentase konsistensi program RKPD dengan program RPJMD (%)
			Indeks Inovasi Daerah
			Zona Pelayanan Ombudsman
			Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
			Persentase capaian target propemperda (%) (TPB)
			Persentase kepemilikan KTP-el (%)
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (opini)
			Kapabilitas APIP
		Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan (%).
		Memajukan desa	Jumlah Desa berpredikat Desa Maju (desa).
			Persentase rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (%).

Misi 7

Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan investasi daerah	Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan	Pertumbuhan kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)

Misi 8

Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan upaya penanganan penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba dan mitigasi Bencana.	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan narkoba.	Penurunan penyalahgunaan NAPZA (%)
			Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani (%)
		Meningkatkan upaya mitigasi Bencana.	Indeks Risiko Bencana Daerah
			Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

Misi 9

Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara
			Indeks Kualitas Lahan

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. IKU disusun sebagai alat ukur utama dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menghubungkan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja pemerintahan daerah.

IKU Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026, dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. IKU tersebut mencerminkan prioritas pembangunan daerah serta menjadi fokus utama pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

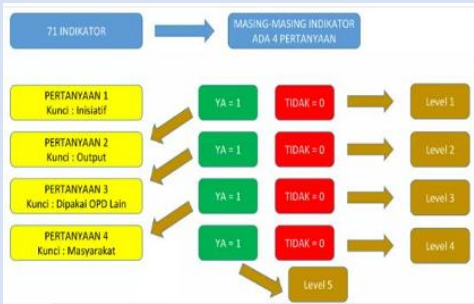
Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.01.a/08-UK/2024 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.306/08-UK/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Keputusan tersebut menjadi dasar hukum dalam penetapan dan penyempurnaan IKU sebagai instrumen pengukuran kinerja daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus Perhitungan
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	Persentase	$= \frac{\text{PDRB Sektor Pertanian Thn } n - \text{PDRB Sektor Pertanian Thn } (n-1)}{\text{PDRB Sektor Pertanian Thn } (n-1)} \times 100\%$
2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	Skor PPH=% kontribusi energi AGK X bobot

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus Perhitungan
3	Meningkatnya kemantapan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	Indeks Infrastruktur Daerah = $[30\%(I_J) + 25\%(I_I) + 20\%(I_{PR}) + 25\%(I_{Pm}) + 50\%(I_{AIR}) + 50\%(I_{BAB})]$ Perhitungan : $I_J = \frac{\text{Panjang Jalan kondisi mantap} - \text{panjang jalan kondisi mantap minimum}}{\text{Panjang Jalan mantap maksimum} - \text{panjang jalan kondisi mantap minimum}}$ $I_I = \frac{\text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik} - \text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik minimum}}{\text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik maksimum} - \text{panjang jaringan irigasi kondisi baik minimum}}$ $I_{PR} = \frac{\text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW} - \text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW minimum}}{\text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW maksimum} - \text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW minimum}}$ $I_{Pm} = \frac{\text{Jumlah RT pengguna SPAM terlayani} - \text{Jumlah RT pengguna SPAM terlayani minimum}}{\text{Jumlah RT pengguna SPAM terlayani maksimum} - \text{Jumlah RT pengguna SPAM terlayani minimum}}$ $I_{BAB} = \frac{\text{Jumlah RT berfasilitas tempat BAB} - \text{Jumlah RT berfasilitas tempat BAB minimum}}{\text{Jumlah RT berfasilitas tempat BAB maksimum} - \text{Jumlah RT berfasilitas tempat BAB minimum}}$ Keterangan : I_J : Indeks Kemantapan Jalan I_I : Indeks Kemantapan Jaringan Irigasi I_{PR} : Indeks Penataan Ruang I_{Pm} : Indeks RT berfasilitas air minum bersih I_{AIR} : Indeks RT berfasilitas air minum bersih I_{BAB} : Indeks RT berfasilitas tempat BAB Range Kemantapan : 0,67 – 1,00 : MANTAP 0,34 – 0,66 : SEDANG 0,00 – 0,33 : TIDAK MANTAP
4	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	$IMP = \frac{1}{3} (X_1 + X_2 + X_3)$ Keterangan : X_1 = Indeks Harapan Hidup X_2 = Indeks Pendidikan X_3 = Indeks Standar Hidup Layak
5	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ Keterangan: $\alpha = 0$. z = garis kemiskinan. y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$. Q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	Persentase	$R(t-1, t) = \frac{[PDB_t - PDB_{t-1}]}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan : R = tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen PDB_t = pendapatan nasional pada tahun t. PDB_{t-1} = pendapatan nasional pada tahun $t-1$ (tahun sebelumnya)
7	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk	N/A	$\text{Rasio Angka Kriminalitas} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kriminal}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$ Penjelasan - Jumlah Kasus Kriminalitas: Total jumlah kejahatan yang dilaporkan atau tercatat dalam tahun n di wilayah geografis tertentu. - Total Jumlah Penduduk: Jumlah penduduk di wilayah tersebut pada tahun n. 1000 : Faktor pengali untuk mendapatkan hasil rasio per 1000 penduduk

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus Perhitungan																																				
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	IPP = Nilai Aspek Pelayanan Publik X bobot																																				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$																																				
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP (opini)	Opini	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah																																				
		Nilai SAKIP	Nilai	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi AKIP terdiri dari komponen sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Sub Komponen 1 Keberadaan 20%</th><th>Sub Komponen 2 Kualitas 30%</th><th>Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td colspan="2">Nilai hasil Tingkat Akutabilitas</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table>	No	Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	2	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	3	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	4	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai hasil Tingkat Akutabilitas		20	30	50	100
No	Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Bobot																																			
1	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																			
2	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																			
3	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																			
4	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25																																			
Nilai hasil Tingkat Akutabilitas		20	30	50	100																																			
10	Meningkatnya pertumbuhan insvestasi daerah	Pertumbuhan investasi daerah (%).	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi Daerah (Rp.milyar) tahun n} - \text{Jumlah Realisasi Investasi Daerah (Rp.milyar) tahun n - 1}}{\text{Jumlah Realisasi Investasi Daerah (Rp.milyar) tahun n}} \times 100\%$																																				
11	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks																																					
12	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	IKA Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu IKU Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} x (leu - 0,1) \right)$ IKL Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. $IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) x 100 \right) x \frac{50}{54,3}$ IKLH Kabupaten $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$																																				

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji pimpinan instansi pemerintah untuk mencapai kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja menjadi instrumen penting dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja pemerintahan daerah.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja aparatur pemerintah sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah;
2. Menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan organisasi;
4. Menjadi dasar dalam pemberian penghargaan (reward) maupun penerapan sanksi (punishment) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penerapan SAKIP secara menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang, sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing unit organisasi, mulai dari Kepala Daerah hingga pimpinan Perangkat Daerah.

Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 setelah perubahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).	2,5
2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92
3	Meningkatnya kemantapan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	0,45
4	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,75
5	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	12,97
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	4,35
7	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk	0,92
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,03
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP (opini)	WTP
		Nilai SAKIP	B
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Pertumbuhan investasi daerah	20
11	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah	0,48
12	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	68,81

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 pada tingkat Pemerintah Daerah telah ditetapkan pada awal Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan kebijakan serta hasil evaluasi kinerja.



**Laporan Kinerja
Intansi Pemerintah Daerah
Kabupaten lampung Timur
Tahun 2025**

**BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA**

KABUPATEN LAMPUNG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggambarkan hasil pengukuran kinerja dalam mencapai sasaran strategis daerah pada akhir satu periode tahun anggaran. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan, yang dilaksanakan melalui koordinasi unsur perencanaan, keuangan, pengawasan, serta pengendalian pembangunan daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara capaian kinerja dengan program dan kebijakan pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3.1 METODOLOGI PENGUKUAN KINERJA

Metodologi pengukuran kinerja digunakan untuk memastikan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat diukur secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{rencana} - \text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\% \text{ Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

3.2 Pengukuran Target

Pengukuran target atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pengukuran tersebut digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun Anggaran 2025.

Pengukuran kinerja dilaksanakan terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Lampung Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati Lampung Timur Tahun 2021–2026. Sasaran strategis dan IKU tersebut merupakan dasar pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada masa transisi perencanaan pembangunan daerah.

Target kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja Tahun 2025 adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Lampung Timur

Tahun 2025, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah pada tahun berjalan.

Hasil pengukuran target dan realisasi IKU Bupati Lampung Timur Tahun 2025 selanjutnya disajikan secara ringkas pada bagian berikut, yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan.

3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis menggambarkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana telah dijelaskan dalam metodologi pengukuran kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis yang diukur melalui 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,5	7,85	314
2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92	90,12	97,96
3	Meningkatnya kemantapan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	0,45	0,55	122,22
4	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,75	73,92	100,2
5	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	12,97	12,15	106,75
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,35	4,65	106,9

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET REALISASI		CAPAIAN (%)
7	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk	0,92	0,92	100
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,03	3,66	90,82
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87,76	103,25
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	100
		Nilai SAKIP	B	B	100
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Pertumbuhan investasi daerah	20	23,26	116,30
11	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah	0,48	0,75	156,25
12	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,81	72,23	104,97

3.3.1 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan.

Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (%).

Sasaran Strategis 1 diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kabupaten Lampung Timur. Mengingat karakteristik daerah yang masih didominasi oleh sektor primer serta besarnya jumlah penduduk yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor ini, pertumbuhan sektor pertanian menjadi indikator utama dalam menilai stabilitas dan daya tahan ekonomi daerah.

Pengukuran kinerja sasaran ini menggunakan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010). Penggunaan harga konstan dimaksudkan untuk mengukur pertumbuhan riil, sehingga mencerminkan peningkatan volume produksi dan produktivitas yang sebenarnya, bukan sekadar dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi).

Perkembangan sektor ini dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, termasuk adanya kontraksi pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian tahun 2025 menjadi penting untuk melihat arah pemulihan dan keberlanjutan pertumbuhan sektor primer di Kabupaten Lampung Timur.

a. Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2025

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010), sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 tumbuh sebesar 7,85. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mengalami kontraksi sebesar -0,82, sehingga mencerminkan adanya pemulihan dan akselerasi sektor primer pada tahun 2025.

Dengan target pertumbuhan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2,5, maka realisasi pertumbuhan sebesar 7,85 menghasilkan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

$$\frac{7,85}{2,5} \times 100\% = 314,00\%$$

Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3.1.1
Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,5	7,85	314

Secara substantif, pertumbuhan yang cukup tinggi ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan, membaiknya kondisi produksi dibandingkan tahun sebelumnya, serta dukungan program pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas dan pemulihan sektor primer. Namun demikian, selisih capaian yang sangat besar terhadap target

juga menunjukkan bahwa penetapan target kinerja masih perlu disempurnakan agar lebih mencerminkan proyeksi ekonomi riil dan dinamika sektoral.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2022 s.d. 2025

Perkembangan laju pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur atas dasar harga konstan (ADHK 2010) selama periode 2022–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung membaik pada tahun terakhir.

Tabel 3.3.1.2
Perbandingan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan Tahun 2022–2025

Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi (%)
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2022	1,41
	2023	0,03
	2024	-0,82
	2025	7,85

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2022 masih berada pada level moderat sebesar 1,41%, kemudian melambat secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 0,03%. Pada tahun 2024, sektor ini bahkan mengalami kontraksi sebesar -0,82%, yang mengindikasikan adanya tekanan produksi, kemungkinan akibat faktor cuaca, fluktuasi harga komoditas, maupun gangguan distribusi.

Namun pada tahun 2025, sektor pertanian menunjukkan pemulihan yang kuat dengan pertumbuhan sebesar 7,85%. Kenaikan yang cukup tajam ini menandai adanya rebound ekonomi sektor primer setelah periode perlambatan dan kontraksi pada dua tahun sebelumnya.

Secara tren, pola ini menunjukkan bahwa sektor pertanian Kabupaten Lampung Timur masih rentan terhadap faktor eksternal seperti kondisi iklim, harga komoditas, dan stabilitas rantai pasok. Meskipun demikian, pemulihan pada tahun 2025 memberikan sinyal positif terhadap efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan produktivitas dan stabilisasi sektor pertanian.

c. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026, pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 4%. Target ini ditetapkan sebagai upaya menjaga stabilitas pertumbuhan sektor primer secara berkelanjutan.

Realisasi pertumbuhan sektor pertanian tahun 2025 berdasarkan data ADHK 2010 mencapai 7,85%, sehingga tingkat capaian terhadap target RPJMD adalah:

$$\frac{7,85}{4} \times 100\% = 196,25\%$$

Tabel 3.3.1.3
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,00	7,85	196,25

Capaian sebesar 196,25% menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian tahun 2025 melampaui target RPJMD secara signifikan. Kinerja ini mencerminkan pemulihan sektor primer setelah kontraksi pada tahun 2024 serta adanya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah.

Namun demikian, meskipun capaian melampaui target, evaluasi perencanaan menunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan dalam RPJMD masih bersifat konservatif. Ke depan, penetapan target perlu mempertimbangkan tren historis, potensi rebound ekonomi, serta analisis risiko sektor agar indikator kinerja lebih mencerminkan tingkat tantangan yang aktual.

d. Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten dengan Provinsi.

Perbandingan kinerja pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan antara Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung selama periode 2022–2025 menunjukkan dinamika yang relatif sejalan, namun dengan tingkat akselerasi yang berbeda pada tahun terakhir.

Tabel 3.3.1.4

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten dengan Provinsi

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.	Realisasi			
	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Lampung Timur	1,41	0,03	-0,82	7,85
Provinsi Lampung	1,98	0,55	-1,95	5,91

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026
BPS Provinsi Lampung, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan sektor pertanian Provinsi Lampung sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lampung Timur. Namun pada tahun 2024, baik kabupaten maupun provinsi mengalami kontraksi, dengan penurunan lebih dalam terjadi di tingkat provinsi (-1,95%) dibandingkan kabupaten (-0,82%).

Pada tahun 2025, Kabupaten Lampung Timur menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 7,85%, melampaui pertumbuhan Provinsi Lampung sebesar 5,91%. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Lampung Timur berlangsung lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan rata-rata provinsi.

Secara komparatif, kinerja Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 berada di atas capaian provinsi, yang mengindikasikan efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong pemulihan produksi dan stabilisasi sektor pertanian. Namun demikian, fluktuasi pertumbuhan pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa sektor ini masih rentan terhadap faktor eksternal seperti kondisi iklim dan harga komoditas.

e. Langkah-langkah yang Dilakukan dalam Pencapaian Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan berbagai langkah strategis yang berfokus pada peningkatan produktivitas, penguatan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana dan prasarana produksi. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. **Penguatan kapasitas pertanian melalui penerapan Standar Good Agricultural Practices (GAP) dan sertifikasi benih**, guna meningkatkan mutu produksi serta daya saing komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan.
2. **Pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan**, termasuk dukungan alat tangkap dan fasilitas budidaya untuk meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan.
3. **Pelaksanaan pertemuan dan penguatan kapasitas bagi petani, penangkar benih, dan penyuluh**, sebagai upaya meningkatkan kompetensi teknis dan adopsi inovasi pertanian.
4. **Optimalisasi Lahan dan Pompanisasi (PAT/Oplah)**, untuk meningkatkan intensitas tanam dan memperluas cakupan produksi pada lahan potensial.
5. **Penambahan Areal Tanam (PAT) melalui Optimalisasi Lahan (Oplah)** serta pemasangan pompa irigasi, guna menjaga ketersediaan air pada musim kemarau dan meningkatkan indeks pertanaman.
6. **Pembangunan rumah pompa dan sistem irigasi perpompaan**, yang bertujuan meningkatkan produktivitas padi sekaligus meminimalkan risiko banjir dan kekeringan.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan sektor primer sebagai penopang utama ekonomi daerah.

f. Permasalahan dalam Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Meskipun pertumbuhan tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat sejumlah kendala struktural dan teknis yang mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan sektor, antara lain:

1. **Keterbatasan SDM penyuluh pertanian**, sehingga transfer pengetahuan dan inovasi belum merata di seluruh wilayah.
2. **Keterbatasan sarana dan prasarana produksi**, termasuk irigasi, alsintan, dan akses teknologi.
3. **Pergeseran musim dan dampak perubahan iklim**, serta tingginya harga pupuk dan keterbatasan benih unggul.
4. **Belum optimalnya digitalisasi dan hilirisasi pertanian**, sehingga nilai tambah masih terbatas pada produksi primer.
5. **Tingginya biaya operasional nelayan**, khususnya kenaikan harga BBM dan biaya melaut.

Secara umum, kendala tersebut menunjukkan bahwa rantai dukungan produksi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan belum sepenuhnya optimal. Minimnya penyuluh dan keterbatasan infrastruktur dasar berdampak pada efisiensi usaha tani. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim dan dinamika harga komoditas global turut mempengaruhi capaian pertumbuhan sektor.

g. Solusi Permasalahan dalam Pencapaian Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. **Penguatan SDM penyuluh pertanian**, melalui usulan penambahan formasi penyuluh serta rekomendasi perpindahan jabatan ke fungsional penyuluh pertanian, disertai evaluasi wilayah binaan agar lebih efektif.

2. **Penyediaan sarana dan prasarana pertanian secara bertahap**, termasuk bantuan benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta alat dan mesin pertanian dari pengolahan tanah hingga pasca panen. Selain itu, dibangun Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi untuk memperlancar distribusi hasil panen.
3. **Penguatan ketersediaan air dan kesuburan tanah**, melalui pembangunan sumur bor dan embung (meskipun sempat terkendala efisiensi anggaran), serta edukasi penggunaan pupuk organik.
4. **Pemberian bantuan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)** dan pelatihan pembuatan pupuk serta pestisida organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
5. **Penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim**, melalui sosialisasi dan fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) guna meminimalkan risiko gagal panen.
6. **Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**, melalui bantuan alat pengendali seperti stik kompor tikus, pembangunan Rumah Burung Hantu (RUBUHA), serta pelatihan budidaya pengendalian hayati dan pestisida alami.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pertumbuhan sektor pertanian tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan secara nyata.

h. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan produksi, penguatan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan usaha perikanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan perikanan.

Program-program tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Perikanan dan Peternakan, yang memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan perekonomian daerah.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan produksi, penguatan kelembagaan petani dan nelayan, serta pengembangan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan. Rincian program dan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.1.5 Program dan Realisasi Anggaran dalam pencapaian indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

No	SASARAN / PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN / TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
1	Sasaran Strategis 1 :			
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan			
	Indikator Kinerja :			
	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,5	7,85	314,0
	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 9.808.418.311	Rp 9.202.843.941	93,83
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.434.177.779	Rp 1.390.795.252	96,98
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 303.590.341	Rp 244.243.931	80,45
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 20.234.256	Rp 19.369.700	95,73
	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 652.532.584	Rp 513.148.312	78,64
	Dinas Perikanan Dan Peternakan			
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 255.394.058	Rp 35.220.865	13,79
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 507.475.215	Rp 471.235.004	92,86
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp 90.000.000	Rp 89.983.217	99,98
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 302.781.398	Rp 123.906.480	40,92

Pada tahun 2025, target pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ditetapkan sebesar 2,5%, sementara realisasi mencapai 7,85%, sehingga capaian kinerja mencapai 314% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Dari sisi pendanaan, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah, terutama Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Perikanan dan Peternakan. Tingkat realisasi anggaran pada sebagian besar program berada pada kategori baik, dengan tingkat penyerapan berkisar antara 78,64% hingga 96,98%, bahkan beberapa program mencapai hampir seluruh pagu anggaran.

Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan tingkat penyerapan anggaran, terlihat bahwa capaian indikator kinerja yang sangat tinggi (314%) dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran telah memberikan output yang optimal terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tabel 3.3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran Strategis: *Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan*

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,5	7,85	314	88,00*	Efisien

Keterangan:

*Rata-rata realisasi anggaran dihitung dari program yang mendukung pencapaian indikator pada perangkat daerah terkait.

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 314%, sedangkan rata-rata realisasi anggaran program pendukung sekitar 88%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga tingkat efisiensi penggunaan anggaran dapat dikategorikan efisien. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan output yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang relatif terkendali.

3.3.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah.

Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan.

Kualitas sumberdaya manusia dan kehidupan masyarakat umumnya dipengaruhi oleh keadaan gizinya. Keadaan gizi pada dasarnya ditentukan oleh konsumsi pangan dan kemampuan tubuh untuk menggunakan zat gizi. Adapun konsumsi zat gizi secara umum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kebiasaan makan masyarakat. Cara atau kebiasaan makan yang salah dapat berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada produktivitas kerja.

Dari segi kuantitas, situasi konsumsi pangan Kabupaten Lampung Timur berdasarkan hasil data sekunder susenas tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024. Jumlah energi yang dikonsumsi penduduk pada tahun 2025 adalah sebesar 1.949,73 kkal/kap/hari, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 1.964 Kkal/kap/hari dan masih di bawah tingkat konsumsi yang direkomendasikan WKNPG XI tahun 2018 sebesar 2.100 kkal/kap/hari (AKE). Mengacu pada standar anjuran tersebut dan data pada Tabel 3, terlihat tingkat konsumsi energi rumah tangga di Kabupaten Lampung Timur masih dibawah standar yang dianjurkan.

Tabel 3.3.2.1

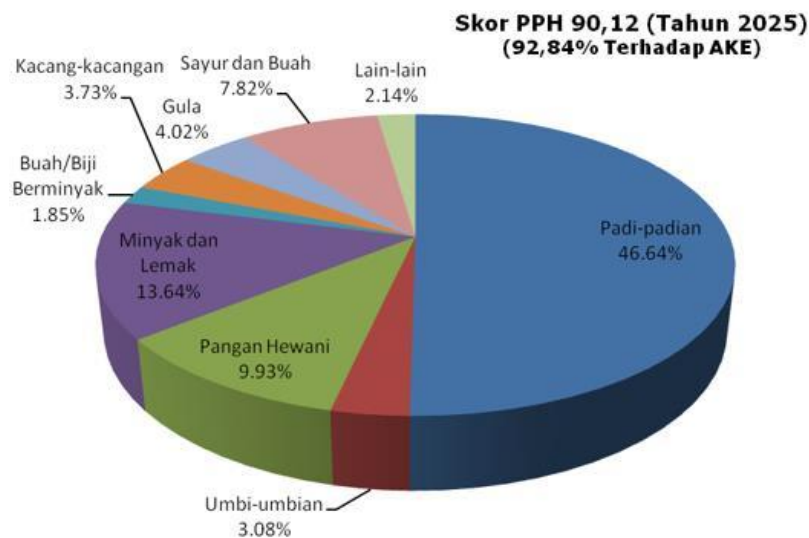
Pola Konsumsi Pangan dan Tingkat Kecukupan Gizi Penduduk Berdasarkan Data Susenas 2025

Kelompok/Jenis Pangan	Konsumsi Energi*)			AKE	
	Standar*)	Kalori	%	Standar	TKE (%)
Kab. Lampung Timur	2.100	1.949,73	100	100	92,84
1. Padi-padian	1.050	979,37	50,23	50	46,64
2. Umbi-umbian	126	64,61	3,31	6	3,08
3. Pangan Hewani	252	208,55	10,7	12	9,93
4. Minyak dan Lemak	210	286,4	14,69	10	13,64
5. Buah/Biji Berminyak	63	38,87	1,99	3	1,85
6. Kacang-kacangan	105	78,35	4,02	5	3,73
7. Gula	105	84,45	4,33	5	4,02
8. Sayur dan Buah	126	164,13	8,42	6	7,82
9. Lain-Lain	63	44,99	2,31	3	2,14

Sumber : Susenas Tahun 2025

Keterangan = *) Kkal/Kap/Ha

Gambar 3.1
Skor PPH kabupaten lampung Timur berdasarkan Hasil Susenas
Tahun 2025



Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2025, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 90,12, atau setara dengan 92,84 persen terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE). Capaian ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat sudah berada pada kategori baik dan semakin mendekati komposisi konsumsi pangan yang ideal sesuai prinsip gizi seimbang, meskipun masih terdapat ketimpangan pada beberapa kelompok pangan.

Struktur konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh kelompok padi-padian sebesar 46,64 persen, yang mencerminkan ketergantungan cukup tinggi terhadap sumber karbohidrat utama. Konsumsi kelompok minyak dan lemak mencapai 13,64 persen, sedangkan pangan hewani sebesar 9,93 persen, yang menunjukkan kontribusi protein hewani yang perlu terus ditingkatkan guna memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat.

Kelompok sayur dan buah menyumbang 7,82 persen, sementara umbi-umbian sebesar 3,08 persen, yang mengindikasikan perlunya penguatan diversifikasi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat alternatif dan peningkatan konsumsi serat. Konsumsi kelompok lainnya seperti gula (4,02 persen), kacang-kacangan (3,73 persen), buah/biji berminyak (1,85 persen), serta lain-lain (2,14 persen) turut melengkapi struktur konsumsi pangan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian Skor PPH Tahun 2025 menunjukkan arah perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Namun demikian, upaya diversifikasi dan peningkatan konsumsi pangan bergizi seimbang, khususnya peningkatan konsumsi protein hewani, sayur, dan buah, perlu terus didorong melalui program ketahanan pangan dan edukasi gizi masyarakat agar komposisi konsumsi semakin mendekati pola pangan yang ideal.

a. Capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan

Tabel 3.3.2.2
Capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Skor Pola Pangan Harapan	92	90,12	97,96

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Timur mencapai 90,12, melampaui target yang ditetapkan sebesar 92. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini adalah 97,96%. Sehingga capaian kinerja Skor PPH Tahun 2025 sebesar 97,96 persen dan berada pada kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Lampung Timur semakin mendekati komposisi pangan ideal sesuai prinsip gizi seimbang. Hasil ini mencerminkan adanya perbaikan pola konsumsi masyarakat yang lebih beragam dan bergizi, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong peningkatan konsumsi pangan sumber protein, sayur, dan buah guna mencapai struktur konsumsi yang lebih seimbang.

Secara keseluruhan, capaian Skor PPH Tahun 2025 menunjukkan bahwa program ketahanan pangan dan edukasi gizi masyarakat telah berjalan dengan baik serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Lampung Timur.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan tahun 2022 S/D tahun 2025

Tabel 3.3.2.3

Perbandingan Realisasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan Kinerja tahun 2022 S/D tahun 2025

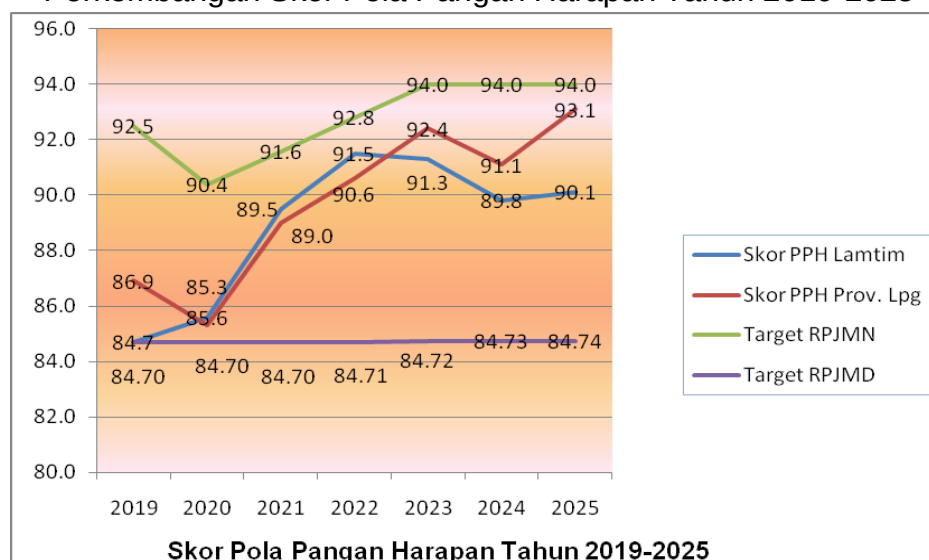
Indikator	Realisasi				Capaian (%)			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Skor Pola Pangan Harapan	91,5	91,3	89,8	90,1	108	107	106	97,96

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022–2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan selalu melampaui target yang ditetapkan. Realisasi skor PPH tercatat sebesar 91,5 (2022), 91,3 (2023), 89,8 (2024), dan meningkat kembali menjadi 90,1 pada Tahun 2025 dengan capaian kinerja 97,96 persen. Meskipun terjadi fluktuasi kecil, secara umum capaian indikator ini menunjukkan bahwa kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat berada pada kategori baik dan mendukung upaya peningkatan ketahanan serta gizi masyarakat secara berkelanjutan.

c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan kinerja sampai dengan tahun sebelumnya dengan target RPJMD, Provinsi Lampung dan RPJMN.

Gambar 3.2

Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019-2025



Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Dibandingkan dengan target RPJMD yang berada pada kisaran 84–85, capaian PPH Kabupaten Lampung Timur secara konsisten telah melampaui target daerah. Jika dibandingkan dengan target RPJMN yang berada pada kisaran 94, capaian daerah masih berada sedikit di bawah target nasional, namun menunjukkan tren mendekati. Sementara itu, dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung, skor PPH Kabupaten Lampung Timur relatif sejalan dan kompetitif. Secara umum, perkembangan ini mencerminkan bahwa kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat telah terjaga dan menunjukkan perbaikan, meskipun masih diperlukan penguatan diversifikasi pangan untuk mendekati standar nasional.

d. Analisis Faktor Keberhasilan , Hambatan dan Solusi Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan

Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 telah melampaui target kinerja daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target nasional (RPJMN), nilai tersebut masih berada di bawah standar yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur konsumsi pangan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

1) Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target kinerja daerah antara lain:

- a) Pelaksanaan program diversifikasi pangan melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah tangga, seperti program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), yang mulai meningkatkan konsumsi sayur dan pangan lokal pada sebagian rumah tangga.
- b) Kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan B2SA yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama TP-PKK, sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan yang beragam.

- c) Ketersediaan produksi pangan pokok daerah yang relatif stabil, khususnya komoditas padi dan beberapa komoditas hortikultura, yang menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap peningkatan skor PPH dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun peningkatannya belum signifikan untuk mencapai target nasional.

2) *Faktor Hambatan dan Analisis Penyebab*

Meskipun terdapat kemajuan, peningkatan skor PPH belum optimal. Berdasarkan analisis kondisi daerah dan data pendukung, terdapat beberapa faktor penghambat utama sebagai berikut:

- a) Dominasi konsumsi padi-padian yang masih tinggi

Struktur konsumsi pangan masyarakat Lampung Timur masih didominasi oleh beras sebagai sumber energi utama. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya konsumsi serta keterbatasan pengembangan pangan alternatif berbasis sumber daya lokal seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan.

- b) Fluktuasi pendapatan rumah tangga petani

Sebagian besar masyarakat Lampung Timur bekerja pada sektor pertanian. Penurunan produksi akibat perubahan iklim, serangan hama tanaman, serta kenaikan harga pupuk dan sarana produksi menyebabkan daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi menjadi terbatas.

- c) Pengaruh harga pangan dan inflasi daerah

Kenaikan harga komoditas pangan tertentu seperti telur, ikan, dan daging menyebabkan masyarakat cenderung memilih pangan yang lebih murah dan mengenyangkan, sehingga komposisi konsumsi pangan menjadi kurang seimbang.

- d) Distribusi dan akses pangan yang belum merata

Pada beberapa wilayah pedesaan, akses terhadap pangan bergizi seperti buah, sayur, dan sumber protein hewani masih terbatas karena rantai distribusi yang panjang serta keterbatasan pasar pangan lokal.

- e) Produktivitas dan diversifikasi produksi pangan lokal masih terbatas

Pemanfaatan teknologi pertanian modern, pengembangan komoditas pangan alternatif, serta pengolahan pasca panen masih belum optimal, sehingga pasokan pangan beragam belum tersedia secara stabil.

3) *Solusi dan Program Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan*

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan akan memperkuat beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana aksi perangkat daerah. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan diversifikasi konsumsi pangan, penguatan kelembagaan pangan masyarakat, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bergizi.

a) Penguatan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat

Melalui kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia, pemerintah daerah akan memperkuat peran kelompok masyarakat dalam distribusi dan pemasaran pangan. Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang lebih beragam dengan harga yang terjangkau, sekaligus mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat daerah.

b) Pengendalian Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis

Pemerintah daerah akan melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis guna memastikan ketersediaan pangan serta menjaga keterjangkauan harga pangan di masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan harga secara berkala, penguatan koordinasi dengan pelaku usaha pangan, serta pelaksanaan operasi pasar pada periode tertentu apabila terjadi kenaikan harga pangan yang signifikan.

c) Penguatan Perencanaan Konsumsi Pangan Daerah

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas konsumsi masyarakat, pemerintah daerah akan melakukan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi pola konsumsi masyarakat. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam merancang intervensi program peningkatan kualitas konsumsi pangan.

d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal

Melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, pemerintah daerah akan mendorong pemanfaatan pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, serta komoditas hortikultura sebagai bagian dari pola konsumsi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan pengolahan pangan lokal, pendampingan kelompok wanita tani, serta promosi menu pangan lokal yang beragam dan bergizi.

e) Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan

Dalam rangka memastikan ketersediaan pangan yang merata, pemerintah daerah akan melaksanakan kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai dasar dalam menentukan wilayah prioritas intervensi ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat pada wilayah yang mengalami kerawanan pangan.

f) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Untuk menjamin pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas, pemerintah daerah akan meningkatkan kegiatan penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan di daerah. Upaya ini bertujuan memastikan pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan pangan serta mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Melalui penguatan implementasi program-program tersebut secara konsisten dan terarah, diharapkan struktur konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Lampung Timur dapat menjadi lebih beragam dan seimbang. Pelaksanaan program ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH), pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui beberapa program yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, ketersediaan pangan, serta pengawasan keamanan pangan. Realisasi program dan penggunaan anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2.4 Program dan Realisasi Anggaran dalam pencapaian indikator Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan

NO	SASARAN / PROGRAM SASARAN / PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		
		TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN / TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
2	Sasaran Strategis 2 :			
	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah			
	Indikator Kinerja :			
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92	90,2	97,96
	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rp 20.509.542	Rp 19.603.000	95,58
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rp 1.588.950.326	Rp 1.051.134.422	66,15
	Program penanganan kerawanan pangan	Rp 304.355.032	Rp 252.317.618	82,90
	Program pengawasan keamanan pangan	Rp 239.416.422	Rp 131.491.700	54,92

Berdasarkan tabel di atas, indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92, dengan realisasi sebesar 90,2, sehingga capaian kinerja mencapai 97,96% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program peningkatan ketahanan pangan

daerah telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sedikit selisih terhadap target yang direncanakan.

Dari sisi penggunaan anggaran, beberapa program menunjukkan tingkat realisasi yang relatif baik, seperti Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan tingkat realisasi sebesar 95,58%, serta Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan realisasi 82,90%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang mendukung ketahanan pangan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Namun demikian, terdapat beberapa program dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif rendah, seperti Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Masyarakat dengan realisasi 66,15%, serta Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan realisasi 54,92%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan sebagian kegiatan belum berjalan secara optimal sehingga berpotensi mempengaruhi capaian indikator secara keseluruhan.

Secara umum, pelaksanaan program ketahanan pangan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek diversifikasi pangan, edukasi konsumsi pangan bergizi, serta peningkatan pengawasan keamanan pangan agar capaian indikator dapat lebih optimal pada tahun berikutnya.

Tabel 3.3.2.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92	90,2	97,96	74,89*	Efisien

Keterangan:

Realisasi anggaran merupakan rata-rata realisasi program yang mendukung pencapaian indikator.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan tingkat realisasi anggaran program pendukung, terlihat bahwa capaian kinerja indikator sebesar **97,96%** dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dapat dikategorikan **efisien**, karena capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mampu menghasilkan output yang cukup optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif terkendali. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan beberapa program yang tingkat realisasinya masih rendah agar penggunaan anggaran dapat semakin optimal dalam mendukung pencapaian indikator kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3.3.3 Sasaran Strategis 3

Meningkatkan Kemantapan Infrastruktur Daerah.

Indikator Infrastruktur Daerah.

Sasaran strategis ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kemantapan infrastruktur daerah sebagai penunjang utama aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Lampung Timur. Infrastruktur yang mantap diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan aksesibilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

a. Capaian indikator kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025

Tabel 3.3.3.1
Indikator Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur Daerah	0,45	0,55	122,22

Berdasarkan tabel tersebut, target Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,45, dengan realisasi sebesar 0,55, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 122,22 persen dan berada pada kategori Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur daerah telah berjalan sesuai arah kebijakan, meskipun masih terdapat kesenjangan terhadap target yang ditetapkan.

Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa komponen pembentuk, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Indeks Kemantapan Jalan (I_J) : 56,74
- 2) Indeks Kemantapan Jaringan Irigasi (I_I) : 47,88
- 3) Indeks Penataan Ruang (I_{PR}) : 15,09
- 4) Indeks Kemantapan Sarana Permukiman (I_{PM}) : 91,84
- 5) Indeks RT Berfasilitas Air Minum Bersih (I_{AIR}) : 83,70
- 6) Indeks RT Berfasilitas Tempat BAB (I_{BAB}) : 99,98

Berdasarkan hasil perhitungan, realisasi Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025 sebesar 0,55. Jika mengacu pada rentang klasifikasi tingkat kemantapan sebagai berikut:

0,67 – 1,00 : Mantap

0,34 – 0,66 : Sedang

0,00 – 0,33 : Tidak Mantap

Maka nilai 0,55 berada pada kategori *Sedang*.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum infrastruktur di Kabupaten Lampung Timur telah tersedia dan berfungsi, namun kualitas dan kemantapannya belum optimal. Status “Sedang” mengindikasikan masih terdapat proporsi infrastruktur yang belum memenuhi standar teknis kemantapan, khususnya pada komponen jaringan irigasi dan penataan ruang yang memberikan kontribusi rendah terhadap nilai indeks.

b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2025 dengan Indikator Indeks Infrastruktur Daerah tahun sebelumnya.

Tabel 3.3.3.2
Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2025 dengan Indikator Indeks Infrastruktur Daerah tahun sebelumnya

Indikator	Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025
Indeks Infrastruktur Daerah	0,53	0,55	88,33	122,22

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi Indeks Infrastruktur Daerah mengalami peningkatan dari 0,53 pada Tahun 2024 menjadi 0,55 pada Tahun 2025. Kenaikan sebesar 0,02 poin tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas dan kemantapan infrastruktur daerah, meskipun peningkatannya masih relatif terbatas.

Dari sisi capaian kinerja, pada Tahun 2024 tingkat capaian tercatat sebesar 88,33 persen, sedangkan pada Tahun 2025 sebesar 122,22 persen. Penurunan persentase capaian ini terjadi karena target Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga meskipun nilai indeks meningkat, tingkat pencapaiannya terhadap target menjadi lebih rendah.

Secara substantif, tren kenaikan nilai indeks mencerminkan adanya perbaikan bertahap pada beberapa komponen infrastruktur, terutama pada aspek sarana permukiman dan akses sanitasi. Namun demikian, peningkatan belum signifikan pada komponen kemantapan jalan dan jaringan irigasi, sehingga pertumbuhan indeks masih terbatas.

c. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2025 dengan Indikator Indeks Infrastruktur Daerah dengan target RPJMD

Tabel 3.3.3.3

Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2025 dengan Indikator Indeks Infrastruktur Daerah dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2025	Capaian kinerja
Indeks Infrastruktur Daerah	0,45	0,55	122,22

Berdasarkan Tabel diatas, target Indeks Infrastruktur Daerah dalam RPJMD ditetapkan sebesar 0,45, sedangkan realisasi sampai dengan Tahun 2025 tercatat sebesar 0,55, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 122,22 persen.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Secara kuantitatif, terdapat selisih sebesar 0,13 poin antara target RPJMD dan realisasi Tahun 2025. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas dan kemantapan infrastruktur masih memerlukan percepatan, khususnya pada komponen yang memiliki kontribusi rendah terhadap indeks, seperti kemantapan jaringan irigasi dan penataan ruang.

Apabila dikaitkan dengan klasifikasi tingkat kemantapan, realisasi sebesar 0,55 masih berada pada kategori Sedang, sementara target RPJMD telah mengarah pada kategori Mantap. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan belanja modal produktif, penajaman prioritas rehabilitasi infrastruktur dasar, serta penguatan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan agar capaian dapat lebih mendekati target RPJMD pada periode selanjutnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan nilai Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025 antara lain:

- 1) Peningkatan akses sarana permukiman dan sanitasi, tercermin dari tingginya Indeks RT Berfasilitas Tempat BAB (99,98) dan Indeks RT Berfasilitas Air Minum Bersih (83,70).
- 2) Konsistensi program pemeliharaan jalan dan infrastruktur dasar, sehingga nilai Indeks Kemantapan Jalan tetap terjaga.
- 3) Sinergi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program infrastruktur prioritas, khususnya pada sektor permukiman dan pelayanan dasar.
- 4) Optimalisasi sumber pendanaan melalui DAK dan dukungan provinsi/pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Meskipun terdapat peningkatan dibanding tahun sebelumnya, capaian belum memenuhi target RPJMD. Beberapa penyebabnya antara lain:

- 1) Rendahnya kemantapan jaringan irigasi (47,88) yang masih berada di bawah standar ideal, sehingga menahan kenaikan indeks secara signifikan.
- 2) Indeks Penataan Ruang yang sangat rendah (15,09), menunjukkan belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW dan lemahnya pengendalian tata ruang.
- 3) Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, sehingga alokasi anggaran belum mampu menutup seluruh kebutuhan rehabilitasi dan peningkatan kualitas infrastruktur.
- 4) Tingginya kebutuhan pemeliharaan dibanding peningkatan kapasitas, menyebabkan belanja lebih banyak terserap pada perbaikan rutin daripada pembangunan strategis.
- 5) Faktor eksternal, seperti cuaca ekstrem dan intensitas penggunaan infrastruktur yang mempercepat penurunan kualitas.

Secara umum, peningkatan nilai indeks menunjukkan adanya progres, namun belum cukup signifikan untuk mencapai kategori “Mantap” sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD. Diperlukan penguatan prioritas pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kenaikan indeks, khususnya pada jaringan irigasi dan penataan ruang, serta peningkatan efektivitas penganggaran berbasis kinerja.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Indeks Infrastruktur Daerah, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan infrastruktur. Realisasi penggunaan anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.3.4 Program dan Realisasi Anggaran dalam pencapaian indikator Indeks Infrastruktur Daerah

NO	SASARAN / PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN / TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
3	Sasaran Strategis 3			
	Meningkatnya kemantapan infrastruktur daerah			
	<i>Indikator Kinerja :</i>			
	Indeks Infrastruktur Daerah	0,45	0,55	122,22
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp 12.857.577.344	Rp 11.460.887.375	89,14
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 10.874.393.622	Rp 7.888.293.152	72,54
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 3.577.644.818	Rp 3.329.810.624	93,07
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 4.861.877.252	Rp 4.678.836.685	96,24
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 24.748.868.582	Rp 22.051.902.724	89,10
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 42.447.801.480	Rp 23.606.330.468	55,61
	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp372.888.781.559	Rp350.685.276.767	94,05
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 865.763.468	Rp 86.803.076	10,03
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1.954.506.800	Rp 1.218.529.452	62,34

Berdasarkan tabel di atas, indikator Indeks Infrastruktur Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,45, sedangkan realisasi mencapai 0,55, sehingga capaian kinerja mencapai 122,22% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur daerah mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan target yang direncanakan.

Dari sisi penggunaan anggaran, sebagian besar program pembangunan infrastruktur menunjukkan tingkat realisasi yang relatif tinggi. Beberapa program bahkan memiliki tingkat penyerapan anggaran di atas 90%, seperti Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (93,07%), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (98,24%), serta

Program Penyelenggaraan Jalan (94,05%). Tingginya tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan cukup optimal.

Namun demikian, masih terdapat beberapa program dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif rendah, seperti Program Pengembangan Jasa Konstruksi (10,03%) serta Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya (55,81%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan sebagian kegiatan belum berjalan secara optimal, baik karena adanya penyesuaian kegiatan, keterbatasan waktu pelaksanaan, maupun faktor teknis dalam proses pembangunan.

Tabel 3.3.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran Strategis : Meningkatnya kemantapan infrastruktur daerah

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Infrastruktur Daerah	0,45	0,55	122,22	±74,00*	Efisien

Keterangan:

Realisasi anggaran merupakan rata-rata realisasi program yang mendukung pencapaian indikator.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan tingkat realisasi anggaran program pendukung, terlihat bahwa capaian kinerja indikator sebesar **122,22%** dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan kemantapan infrastruktur daerah dapat dikategorikan **efisien**, karena capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan pembangunan infrastruktur telah mampu menghasilkan output yang cukup optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif terkendali. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan beberapa program yang tingkat realisasinya masih rendah agar penggunaan anggaran dapat semakin optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah.

3.3.4 Sasaran Strategis 4

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Selain itu, Indonesia juga selalu melakukan penyesuaian metodologi sesuai dengan penyempurnaan yang dilakukan oleh UNDP. Mulai dari tahun 2015 hingga saat ini, Indonesia menggunakan metodologi terakhir yang disempurnakan oleh UNDP pada tahun 2014 sebagai standar penghitungan IPM. BADAN PUSAT STATISTIK juga sudah secara rutin melakukan penghitungan IPM level nasional, provinsi maupun kabupaten/kota setiap tahunnya, termasuk Kabupaten Lampung Timur.

Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2021 hingga 2025. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai IPM Kabupaten Lampung Timur selama periode tersebut dimana pada tahun 2021 sebesar 70,91 dan pada tahun 2025 sebesar 73,98. Dengan nilai IPM tersebut, sejak tahun 2020 Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam kategori wilayah dengan IPM “tinggi”.

a. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 3.3.4.1
Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	73,75	73,92	100,2

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar **73,92**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **73,750**, dengan tingkat capaian kinerja sebesar **100,2 persen** dan termasuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan

standar hidup layak. Peningkatan IPM ini didukung oleh upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap memerlukan penguatan kebijakan secara berkelanjutan, khususnya dalam menjaga pemerataan kualitas layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar peningkatan IPM dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 s/d 2025

Tabel 3.3.4.2
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Manusia
tahun 2023 s.d 2025

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia	72,44	73,05	73,92	102,3	104,9	100,2

Capaian :

Tahun 2023 : 102,31% → Realisasi melampaui target sebesar 2,31 %.

Tahun 2024 : 104,95% → Realisasi melampaui target sebesar 4,95 %.

Tahun 2025 : 100,2 % → Realisasi melampaui target sebesar 0,57 %.

Berdasarkan perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode Tahun 2023–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023, capaian IPM tercatat sebesar 71,21 dengan tingkat capaian 102,31 persen, yang menunjukkan realisasi melampaui target sebesar 2,31 persen. Selanjutnya pada Tahun 2024, realisasi IPM meningkat menjadi 73,05 dengan capaian 104,95 persen, atau melampaui target sebesar 3,22 persen. Pada Tahun 2025, capaian IPM kembali meningkat menjadi 73,92 dengan tingkat capaian 100,2 persen, yang berarti realisasi melampaui target sebesar 0,57 persen.

Peningkatan capaian IPM yang berkelanjutan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berjalan efektif dan terarah, khususnya dalam peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan,

kesehatan, serta perbaikan standar hidup masyarakat. Tren capaian yang terus meningkat juga mencerminkan adanya perbaikan kinerja pembangunan manusia secara bertahap, meskipun masih diperlukan upaya penguatan untuk menjaga keberlanjutan dan pemerataan capaian IPM antarwilayah dan kelompok masyarakat pada tahun-tahun selanjutnya.

c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 dengan target RPJMD.

Berdasarkan perbandingan antara target RPJMD dan realisasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sampai dengan Tahun 2025, diketahui bahwa target IPM yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 69,9, sedangkan realisasi capaian IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 73,92.

Tabel 3.3.4.3
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2025	Capaian kinerja
Indeks Pembangunan Manusia	69,9	73,92	105,7

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi IPM telah melampaui target RPJMD sebesar 5,7 persen dan berada pada kategori sangat baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Timur berjalan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Capaian IPM yang melampaui target RPJMD mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan standar hidup masyarakat. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap memerlukan upaya penguatan dan pemerataan, agar peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur dan berkelanjutan pada periode pembangunan berikutnya.

d. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi dan Nasional

Tabel 3.3.4.4

Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi dan Nasional

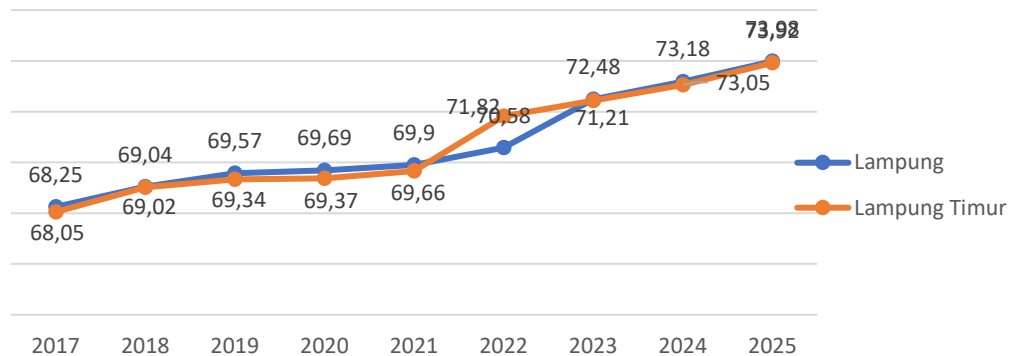
Indikator Kinerja: Indeks Pembangunan Manusia	Realisasi Tahun (n)		
	2023	2024	2025
Kabupaten Lampung Timur	72,44	73,05	73,92
Provinsi Lampung	72,48	73,13	73,98
Nasional	74,39,	75,02	75,90

Berdasarkan Tabel tersebut, realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada Tahun 2023, IPM Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 72,44, meningkat menjadi 73,05 pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 73,92 pada Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Lampung Timur masih berada sedikit di bawah rata-rata provinsi, namun menunjukkan pola pertumbuhan yang searah dan relatif stabil. Pada Tahun 2025, IPM Provinsi Lampung mencapai 73,98, sedangkan IPM Kabupaten Lampung Timur sebesar 73,92, dengan selisih yang semakin kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Timur yang terus mendekati capaian tingkat provinsi.

Sementara itu, dibandingkan dengan capaian IPM nasional, IPM Kabupaten Lampung Timur masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada Tahun 2025, IPM nasional tercatat sebesar 75,90, sedangkan IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 73,92. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan kualitas pembangunan manusia di tingkat daerah, masih diperlukan upaya penguatan kebijakan dan program pembangunan manusia agar mampu mengejar ketertinggalan terhadap capaian nasional.

Gambar 3.3
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung Tahun 2017-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, 2025.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian IPM tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Timur berada pada tren yang positif, namun tetap memerlukan peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk memperkecil kesenjangan dengan capaian provinsi dan nasional pada tahun-tahun mendatang.

e. Analisis Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Lampung Timur

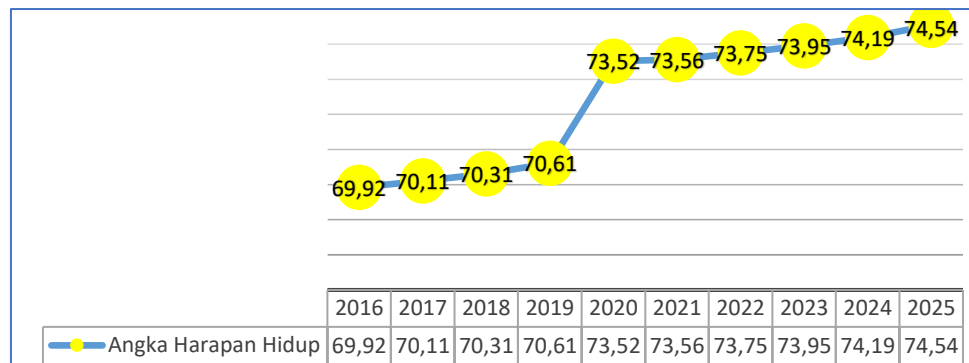
1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup secara konsep diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Lampung Timur selama periode 2021-2025 mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021 sebesar 73,756. Pada tahun 2025, usia harapan hidup penduduk Kabupaten Lampung Timur telah mencapai 74,54. Hal ini berarti bahwa bayi yang baru lahir rata-rata dapat bertahan hidup hingga usia 74 sampai 75 tahun.

Peningkatan Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan

peningkatan kesehatan lingkungan. Kenaikan Angka Harapan Hidup terjadi setiap tahun pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2025 Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Gambar 3.4
Tren Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2025

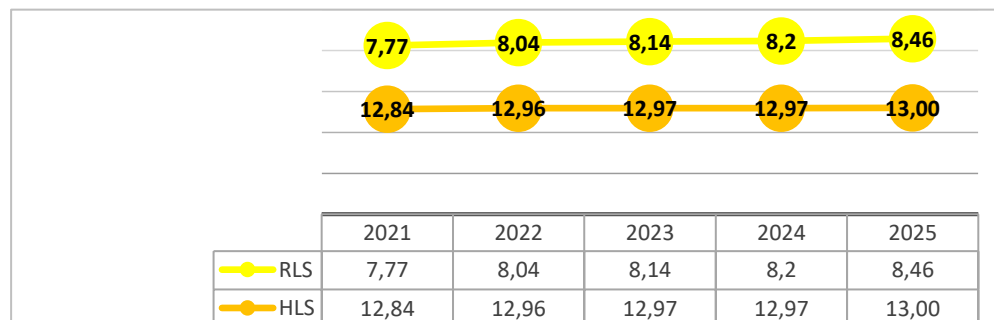


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur

2) Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pendidikan ataupun pengetahuan merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam pembangunan manusia. Kinerja pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ataupun pengetahuan dari manusia tersebut. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Di Kabupaten Lampung Timur, kedua indikator ini terus meningkat setiap tahunnya. Selama periode 2021 hingga 2025, HLS meningkat sebesar 0,14 tahun, sementara RLS meningkat 0,69 tahun.

Gambar 3.5
Perkembangan Angka HLS dan RLS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, 2025.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang relatif lambat dan cenderung stagnan pada beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2021, HLS tercatat sebesar 12,84 tahun, meningkat menjadi 12,96 tahun pada Tahun 2022 atau naik sebesar 0,12 tahun. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah, yang didukung oleh upaya pemerintah daerah dalam memperluas layanan pendidikan.

Selanjutnya, pada Tahun 2023, HLS meningkat sangat tipis menjadi 12,97 tahun atau hanya bertambah 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, nilai HLS tetap berada pada angka 12,97 tahun, yang menunjukkan kondisi stagnan. Baru pada Tahun 2025, HLS kembali mengalami peningkatan menjadi 13,00 tahun, yang mengindikasikan adanya perbaikan meskipun dalam skala yang masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan harapan lama sekolah masih menghadapi tantangan, terutama dalam mendorong partisipasi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tren peningkatan yang lebih konsisten dibandingkan HLS. RLS meningkat dari 7,77 tahun pada Tahun 2021 menjadi 8,04 tahun pada Tahun 2022, kemudian meningkat lagi menjadi 8,14 tahun pada Tahun 2023, 8,20 tahun pada Tahun 2024, dan mencapai 8,46 tahun pada Tahun 2025. Peningkatan RLS ini mencerminkan semakin banyak penduduk usia dewasa yang berhasil menyelesaikan pendidikan formal, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

Secara keseluruhan, perkembangan HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Lampung Timur berada pada arah yang positif, namun dengan laju peningkatan yang belum optimal, khususnya pada indikator HLS. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan pendidikan yang lebih terarah, terutama dalam meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan ke jenjang menengah atas dan pendidikan tinggi, serta penguatan dukungan sosial dan ekonomi

bagi masyarakat agar dapat mempertahankan partisipasi sekolah dalam jangka waktu yang lebih panjang.

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator-indikator tersebut menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah.

Tabel 3.3.4.5
APK, APM, dan APS Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2021–2025

Indikator	Karakteristik	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
APK	SD/MI	102,88	103,38	102,24	99,93	104,74
	SMP/MTs	97,92	95,72	97,92	101,87	90,46
	SMA/SMK/MA	88,63	78,98	89,15	84,4	84,57
	PT	–	–	23,7	17,05	20,94
APM	SD/MI	99,35	98,25	97,98	96,26	99,37
	SMP/MTs	90,75	89,19	88,59	86,92	86,32
	SMA/SMK/MA	60,69	60,53	62,47	67,37	69,98
	PT	–	–	17,93	11,72	13,65
APS	7–12 tahun	99,78	98,25	99,68	99,43	99,82
	13–15 tahun	94,92	97,55	100	98,97	96,13
	16–18 tahun	67,11	67,58	67,79	72,73	72,3
	19–23 tahun	–	–	34,92	22,12	15,37

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret

Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya dapat ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Murni (APM). APM selalu lebih rendah dibandingkan APK, karena APM membatasi usia siswa sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil. APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah di suatu jenjang Pendidikan dan usianya sesuai dengan usia sekolah pada jenjang Pendidikan tersebut. APM yang bernilai 100 menunjukkan bahwa semua penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang

pendidikannya. APM SD/MI di Kabupaten Lampung Timur yang sebesar 99,37 persen, artinya sebanyak 99,37 persen siswa usia sekolah SD bersekolah tepat waktu sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

Tabel di atas menunjukkan terjadi sedikit penurunan angka APM tahun 2025 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. Hal ini memberi indikasi bahwa penduduk usia sekolah yang bersekolah di jenjang SMP/MTs tahun 2025 sedikit menurun dibandingkan tahun 2024, hal ini berbeda dengan jenjang pendidikan SD/MI, SMA/SMK/MA dan PT. Masih terdapatnya murid yang mengikuti jenjang pendidikan tertentu yang tidak sesuai dengan kelompok umur pendidikannya dapat dilihat dari selisih antara APK dan APM. Sebagai contoh pada jenjang pendidikan SD/MI, capaian APK SD/MI Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 sebesar 104,74 masih relatif cukup besar selisihnya dengan capaian APM SD/MI yang sebesar 99,37 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 5,37 persen murid yang bersekolah di SD tidak sesuai dengan kelompok umur pendidikannya (7–12 tahun).

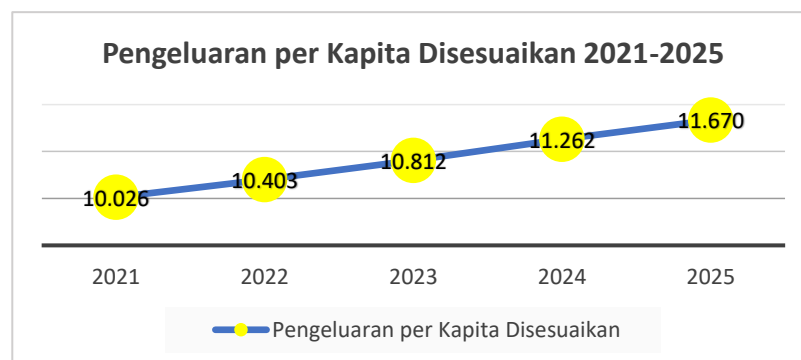
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APS digunakan untuk menilai pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Pada tahun 2025 masih terdapat sekitar 0,18 persen penduduk Lampung Timur umur 7–12 tahun yang belum mengenyam pendidikan SD/MI atau tidak bersekolah. Untuk kelompok umur 13–15 tahun, masih terdapat sekitar 3,87 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan di tingkat SMP/MTs. Untuk kelompok umur 16–18 tahun, masih terdapat sekitar 27,70 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA. Untuk kelompok umur 19–23 tahun, masih terdapat sekitar 75,63 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan.

4) Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012). Jika dilihat kembali dalam konsep pembangunan manusia adalah proses untuk memperluas pilihan dengan salah satu pilihan tersebut adalah untuk dapat hidup dengan layak dan hidup yang sesuai dengan pilihannya. Dalam paradigma pembangunan ini, pendapatan adalah alat untuk menguasai sumber daya agar dapat hidup dengan layak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk mendukung standar hidup yang layak.

Berdasarkan konsep tersebut, pendapatan sebagai pendekatan dari tingkat hidup yang layak, dipilih sebagai salah satu indikator pembangunan manusia. Tetapi seringkali data indikator pendapatan ini sangat sulit didapatkan karena seringkali *under estimate* sehingga diperlukan sebuah indikator lainnya yang dapat mendekati indikator pendapatan ini. Di dalam penghitungan IPM, digunakan indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (*Purchasing Power Parity*) untuk mendekati indikator pendapatan.

Gambar 3.6
Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lampung Timur
(ribu rupiah), 2021–2025



Pada tahun 2025 pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Lampung Timur mencapai 11,670 juta rupiah per tahun. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat meningkat sekitar 1,644 juta rupiah atau 16,40 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024 sebesar 450 ribu rupiah.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, yang berperan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Realisasi penggunaan anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.4.6 Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia

NO	SASARAN / PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		
		TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN / TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
4	Sasaran Strategis 4			
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia			
	Indikator Kinerja :			
	Indeks Pembangunan Manusia	73,75	73,92	100,2
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	Program Pengelolaan Pendidikan	247.582.254.166	245.625.193.041	99,21
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	28.779.472.215	28.705.893.786	99,74
	Dinas Kesehatan			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86.822.795.853	80.037.339.209	92,18
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.789.337.350	2.383.103.099	85,44
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	602.020.000	294.361.600	48,90
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	944.426.080	372.033.800	39,39

Berdasarkan tabel di atas, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 73,75, sedangkan realisasi mencapai 73,92, sehingga capaian kinerja mencapai 100,2% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di

Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan dan berhasil melampaui target yang direncanakan.

Dari sisi penggunaan anggaran, program pada sektor pendidikan menunjukkan tingkat realisasi yang sangat baik. Program Pengelolaan Pendidikan memiliki tingkat realisasi anggaran sebesar 99,21%, sementara Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan mencapai 99,74%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sektor pendidikan berjalan secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Pada sektor kesehatan, sebagian program juga menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang cukup baik, seperti Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi 92,18%, serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan realisasi 85,44%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa program dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif rendah, seperti Program Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan realisasi 48,90%, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan realisasi 39,39%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sebagian kegiatan belum berjalan secara optimal, sehingga masih diperlukan peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar kontribusi program terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat lebih maksimal.

Tabel 3.3.4.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Pembangunan Manusia	73,75	73,92	100,2	±80,8*	Efisien

Keterangan:

Realisasi anggaran merupakan rata-rata realisasi program yang mendukung pencapaian indikator.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan tingkat realisasi anggaran program pendukung, terlihat bahwa capaian kinerja indikator sebesar 100,2% dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran

yang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dikategorikan efisien, karena capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa program pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan telah mampu memberikan hasil yang cukup optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan beberapa program yang memiliki tingkat realisasi anggaran rendah agar kontribusi program terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

3.3.5 Sasaran Strategis 5

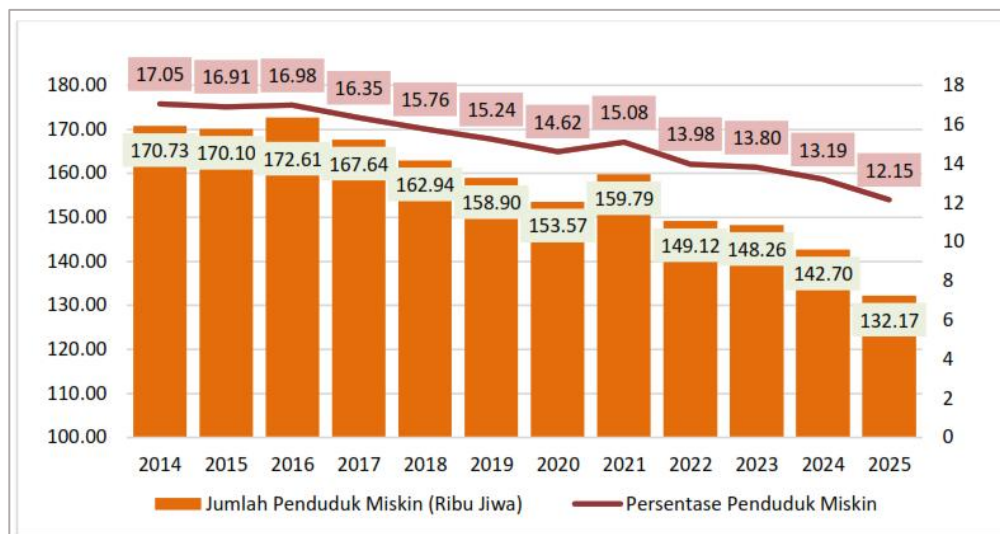
Menurunnya Persentase Penduduk Miskin

Indikator Persentase Penduduk Miskin.

Kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga atau penduduk. Konsep kemiskinan di Indonesia diukur menggunakan pendekatan pengeluaran yang dikenal dengan kebutuhan dasar minimum (*basic needs approach*). Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang yang mencakup kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita sehari ditambah dengan kebutuhan non makanan yang mendasar (pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya). Ukuran ini disebut dengan garis kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin, apabila memiliki pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung dalam bentuk absolut berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Indikator kemiskinan di level Kabupaten diestimasi menggunakan data Susenas Maret yang dikumpulkan secara berkala setiap tahun.

Gambar 3.7

Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Timur, 2014-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2014-2025

Berdasarkan Gambar 3.7, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur secara umum mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir setelah meningkat cukup signifikan pada tahun 2021. Pada tahun 2025 persentase penduduk miskin di Lampung Timur menjadi sebesar 12,15 persen dengan jumlah penduduk miskin, yaitu sebanyak 132,17 ribu orang. Angka tersebut menjadi yang paling terendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

a. Realisasi capaian kinerja Indikator Persentase Penduduk Miskin.

Tabel 3.3.5.1
Indikator Persentase Penduduk Miskin.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Penduduk Miskin	12,95	12,15	106,58

Indikator Persentase Penduduk Miskin merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan target persentase penduduk miskin sebesar 12,95 persen.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi persentase penduduk miskin pada Tahun 2025 tercatat sebesar 12,15 persen, atau lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Dengan capaian tersebut, tingkat kinerja indikator persentase penduduk miskin mencapai 106,58 persen, sehingga termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur telah berjalan efektif dan melampaui target kinerja yang direncanakan.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 132,17 ribu orang. Penurunan persentase penduduk miskin ini mencerminkan hasil dari pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tetap perlu menjaga konsistensi dan keberlanjutan kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta memperkuat sinergi lintas sektor agar penurunan angka kemiskinan dapat terus dipertahankan dan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

b. Perbandingan realisasi Indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin tahun 2023 s.d 2025

Tabel 3.3.5.2
Perbandingan realisasi Indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin tahun 2023 s.d 2025

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase Penduduk Miskin	13,8	13,19	12,15	105,5	108,4	106,58

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja selama periode Tahun 2023–2025, realisasi Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada Tahun 2023, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 13,8 persen, kemudian menurun menjadi 13,19 persen pada Tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 12,15 persen pada Tahun 2025.

Sejalan dengan penurunan realisasi indikator tersebut, tingkat capaian kinerja juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023, capaian kinerja tercatat sebesar 105,5 persen, meningkat menjadi 108,4 persen pada Tahun 2024, dan mencapai 106,58 persen pada Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase penduduk miskin setiap tahunnya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Penurunan persentase penduduk miskin secara bertahap ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, termasuk peningkatan akses layanan dasar, penguatan perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD

Tabel 3.3.5.3
Perbandingan Realisasi Indikator Indikator Kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase Penduduk Miskin	14	12,15	115,2

Berdasarkan perbandingan antara target RPJMD dan realisasi indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin, diketahui bahwa target RPJMD yang ditetapkan sebesar 14,0 persen telah terlampaui dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 12,15 persen. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator persentase penduduk miskin mencapai 115,2 persen dan berada pada kategori sangat baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menurunkan angka kemiskinan telah berjalan efektif dan mampu melampaui target pembangunan jangka menengah daerah. Penurunan persentase penduduk miskin ini mencerminkan hasil pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan, termasuk peningkatan akses terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

d. Perbandingan Realisasi capaian kinerja Indikator Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional.

Sebagai bagian dari evaluasi capaian Sasaran Strategis Penurunan Persentase Penduduk Miskin, dilakukan analisis komparatif antara Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi Lampung dan tingkat Nasional. Perbandingan ini bertujuan untuk mengukur posisi relatif daerah dalam konteks pembangunan kesejahteraan, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang masih perlu ditangani melalui kebijakan dan program yang lebih terarah.

Berikut disajikan perbandingan realisasi indikator persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional.

Tabel 3.3.5.4
Perbandingan Realisasi capaian kinerja Indikator Persentase Penduduk
Miskin Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin	Realisasi		
	2023	2024	2025
Kabupaten Lampung Timur	13,8	13,19	12,15
Provinsi Lampung	11,11	10,69	10,00
Nasional	9,36	8,57	8,25

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 angka kemiskinan tercatat sebesar 13,8%, menurun menjadi 13,19% pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 12,15% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan Nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Timur masih berada di atas rata-rata. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung sebesar 10,00%, sedangkan tingkat nasional sebesar 8,25%. Selisih antara Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi Lampung sebesar 2,15 poin persentase, dan dengan Nasional sebesar 3,90 poin persentase, menunjukkan masih adanya gap kesejahteraan yang perlu menjadi perhatian.

Secara tren, penurunan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur berjalan searah dengan tren provinsi dan nasional, yang juga menunjukkan penurunan konsisten dari tahun 2023 hingga 2025. Namun laju penurunan di tingkat kabupaten relatif lebih lambat dibandingkan provinsi dan nasional, sehingga diperlukan penguatan intervensi yang lebih terfokus pada kelompok rentan, wilayah kantong kemiskinan, serta penguatan sektor produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun capaian penurunan kemiskinan menunjukkan progres positif, tantangan utama ke depan adalah mempercepat konvergensi angka kemiskinan agar mendekati bahkan berada di bawah rata-rata provinsi.

e. Analisis faktor keberhasilan, hambatan dan solusi dalam penurunan angka kemiskinan.

1) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan Kabupaten Lampung Timur dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi 12,15 persen pada tahun 2025, yang merupakan salah satu penurunan terbesar di Provinsi Lampung, didukung oleh kombinasi kebijakan pro-rakyat, pembangunan infrastruktur, penguatan perlindungan sosial, serta efisiensi dan optimalisasi anggaran daerah. Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut antara lain:

a) Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, Jalan Usaha Tani (JUT), serta peningkatan konektivitas antarwilayah telah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat produksi dan pasar. Perbaikan infrastruktur ini berdampak pada kelancaran distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga turut mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga.

b) Optimalisasi Program Pro-Rakyat yang Tepat Sasaran

Efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan tetap terjaga meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran. Program Beasiswa Makmur yang menjangkau 58.285 siswa, Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin, serta Kartu Sehat Makmur dan reaktivasi BPJS Non Aktif sebanyak 85.175 jiwa (118% dari target) menunjukkan keberpihakan anggaran pada kelompok rentan. Intervensi ini secara langsung mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

c) Fokus pada Kesejahteraan Berkelanjutan dan Pengurangan Ketimpangan

Kebijakan daerah tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan hunian melalui Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Pendekatan ini mendorong perbaikan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

d) Penguatan Peran Sosial dan Kelembagaan

Peran aktif Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dan perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan distribusi bantuan sosial, termasuk bantuan permakanan lansia, dukungan bagi penyandang disabilitas, serta rehabilitasi sosial ODGJ. Sinergi kelembagaan ini memperluas jangkauan intervensi sosial hingga tingkat akar rumput.

e) Sinergi Pusat dan Daerah Berbasis Data

Penurunan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur berjalan searah dengan target Provinsi Lampung dalam pengurangan kemiskinan ekstrem. Penggunaan data yang lebih akurat dalam penentuan sasaran serta koordinasi program pusat dan daerah meningkatkan efektivitas intervensi dan mencegah duplikasi bantuan.

2) Hambatan dan Permasalahan

Meskipun tren penurunan angka kemiskinan menunjukkan progres positif, masih terdapat sejumlah hambatan struktural dan operasional yang mempengaruhi percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

a) *Ketergantungan pada sektor primer berproduktivitas rendah*

Sebagian besar penduduk miskin masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas dan nilai tambah yang terbatas. Fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim menyebabkan pendapatan rumah tangga miskin tidak stabil.

b) *Terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal*

Struktur ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja produktif ke sektor formal. Dominasi sektor informal menyebabkan pendapatan masyarakat rentan terhadap guncangan ekonomi.

c) *Masih adanya kantong kemiskinan wilayah*

Beberapa wilayah pedesaan dan daerah dengan keterbatasan akses infrastruktur dasar masih menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Intervensi belum sepenuhnya terintegrasi berbasis pendekatan kewilayahan.

d) *Ketepatan sasaran program belum optimal*

Meskipun telah dilakukan pemutakhiran data, integrasi dan validasi data kemiskinan masih perlu diperkuat agar program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi lebih presisi dan tepat sasaran.

e) *Dampak ekonomi eksternal dan inflasi*

Tekanan inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta dinamika ekonomi nasional dan global turut mempengaruhi daya beli masyarakat miskin, sehingga sebagian manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok rentan.

3) Solusi dan Langkah Strategis

Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan memperkecil kesenjangan terhadap rata-rata Provinsi Lampung dan Nasional, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan langkah strategis yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan berkelanjutan, sebagai berikut:

b) *Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal*

Mendorong penguatan sektor unggulan daerah, khususnya pertanian, perikanan, dan UMKM, melalui hilirisasi produk, peningkatan akses pasar, dan penguatan rantai nilai. Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan stabilitas pendapatan masyarakat miskin.

c) *Penguatan Intervensi di Wilayah Kantong Kemiskinan*

Melaksanakan intervensi terintegrasi berbasis kewilayahan dengan memprioritaskan desa/kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi, melalui pendekatan lintas sektor (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi).

d) *Peningkatan Kualitas dan Ketepatan Sasaran Program*

Memperkuat integrasi dan pemutakhiran data kemiskinan melalui sinkronisasi dengan data pusat dan provinsi, sehingga program

bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi lebih tepat sasaran dan menghindari duplikasi.

e) *Peningkatan Kualitas SDM dan Akses Kerja Produktif*

Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja lokal, serta memperluas kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal.

f) *Penguatan Perlindungan Sosial Adaptif*

Meningkatkan responsivitas program perlindungan sosial terhadap risiko ekonomi dan bencana, termasuk penguatan jaminan kesehatan, bantuan pangan, dan dukungan bagi kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

g) *Efisiensi dan Reorientasi Anggaran Pro-Rakyat*

Mengoptimalkan belanja daerah dengan prinsip *money follow priority*, sehingga alokasi anggaran lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Persentase Penduduk Miskin, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan berbagai program yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, antara lain Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Penanganan Bencana. Program-program tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial, meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, serta memberikan bantuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Realisasi penggunaan anggaran pada program-program yang mendukung pencapaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.5.5 Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran
Menurunnya persentase penduduk miskin

NO	SASARAN / PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		
		TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	TARGET/ ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Sasaran Strategis 5			
	Menurunnya persentase penduduk miskin			
	<i>Indikator Kinerja :</i>			
	<i>Persentase Penduduk Miskin</i>	12,97	12,15	106,75
	Dinas Sosial			
	Program Pemberdayaan Sosial	1.585.436.674	1.080.132.375	68,13
	Program Rehabilitasi Sosial	1.138.026.633	977.834.073	85,92
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	418.009.000	360.847.562	86,33
	Program Penanganan Bencana	370.425.000	350.466.480	94,61

Berdasarkan data capaian kinerja, indikator Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 12,97%, sedangkan realisasi mencapai 12,15%, sehingga capaian kinerja mencapai 106,75% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik dan berhasil melampaui target yang direncanakan.

Dari sisi penggunaan anggaran, sebagian besar program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial menunjukkan tingkat realisasi yang cukup baik. Program Penanganan Bencana memiliki tingkat realisasi sebesar 94,61%, sementara Program Rehabilitasi Sosial mencapai 85,92%. Selain itu, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki tingkat realisasi anggaran sebesar 86,33%, yang berkontribusi dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Namun demikian, terdapat program dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif lebih rendah, yaitu Program Pemberdayaan Sosial dengan tingkat realisasi sebesar 68,13%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sebagian kegiatan pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih optimal.

Secara umum, berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 3.3.5.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran
Sasaran Strategis : Menurunnya Persentase Penduduk Miskin

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Penduduk Miskin	12,97	12,15	106,75	±83,75*	Efisien

Keterangan:

Realisasi anggaran merupakan rata-rata realisasi program yang mendukung pencapaian indikator.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan tingkat realisasi anggaran program pendukung, terlihat bahwa capaian indikator sebesar 106,75% dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur dapat dikategorikan efisien, karena capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa program-program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang dilaksanakan telah mampu memberikan hasil yang cukup optimal dalam mendukung penurunan tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan beberapa program, khususnya pada kegiatan pemberdayaan sosial, agar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat semakin optimal pada tahun-tahun berikutnya.

3.3.6 Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menggambarkan peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan dinamika sektor-sektor ekonomi daerah serta menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah dalam mendorong aktivitas produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan daya saing daerah. Oleh karena itu, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi indikator penting dalam mendukung sasaran strategis pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

a. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 diukur berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Perbandingan antara target dan realisasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.6.1
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	Target	Realisasi tahun 2025	Capaian kinerja
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,35	4,65	106,9

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebesar 4,65%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,35%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,90%. Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berada pada kategori Sangat Baik, karena melebihi target yang direncanakan.

Pencapaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan kinerja sektor-sektor unggulan, stabilitas harga, serta penguatan investasi dan konsumsi rumah tangga. Kinerja ini juga menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong produktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian dan UMKM, serta peningkatan belanja yang bersifat produktif.

Secara makro, pertumbuhan ekonomi yang melampaui target memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta mendukung upaya penurunan angka kemiskinan. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan mampu menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah agar dampaknya lebih merata.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 s.d. 2025

Untuk melihat tren kinerja pertumbuhan ekonomi secara lebih komprehensif, dilakukan perbandingan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai konsistensi pertumbuhan serta dinamika ekonomi daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.3.6.2
Perbandingan Realisasi Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi
tahun 2022 s.d 2025

Indikator	Realisasi				Capaian			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,02	3,51	4,62	4,65	57	100,2	128,3	106,9

Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur selama periode 2022–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir.

- Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,02% dengan capaian kinerja 57%, menunjukkan bahwa realisasi belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi

pascapandemi yang belum sepenuhnya stabil serta tekanan inflasi dan penyesuaian harga komoditas.

- Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan menjadi 3,51% dengan capaian 100,2%, yang berarti target berhasil dicapai. Hal ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi daerah dan meningkatnya kontribusi sektor-sektor produktif.
- Tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang lebih kuat dengan realisasi sebesar 4,62% dan capaian 128,3%, melampaui target secara signifikan. Kondisi ini menggambarkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh penguatan sektor pertanian, perdagangan, serta peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.
- Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 4,65% dengan capaian 106,9%, tetap berada di atas target yang ditetapkan. Meskipun capaian tidak setinggi tahun 2024, realisasi tahun 2025 menunjukkan stabilitas pertumbuhan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tren 2022–2025 menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur mengalami perbaikan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menandakan efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah, meskipun tetap diperlukan penguatan struktur ekonomi agar pertumbuhan semakin inklusif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur sesuai RPJMD ditetapkan sebesar 4,00%, sedangkan realisasi tahun 2025 mencapai 4,65%.

Tabel 3.3.6.3

Perbandingan Realisasi capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2025	Capaian kinerja
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4	4,65	116,25

Mengacu pada rumus pengukuran indikator yang semakin tinggi semakin baik:

$$Capaian = \frac{4,65}{4,00} \times 100\% = 116,25\%$$

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target RPJMD sebesar 116,25%, yang termasuk dalam kategori *Sangat Baik* karena melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga melampaui target pembangunan jangka menengah daerah. Kondisi ini mencerminkan stabilitas dan penguatan aktivitas ekonomi daerah yang ditopang oleh peningkatan kinerja sektor-sektor utama, khususnya pertanian, perdagangan, dan jasa.

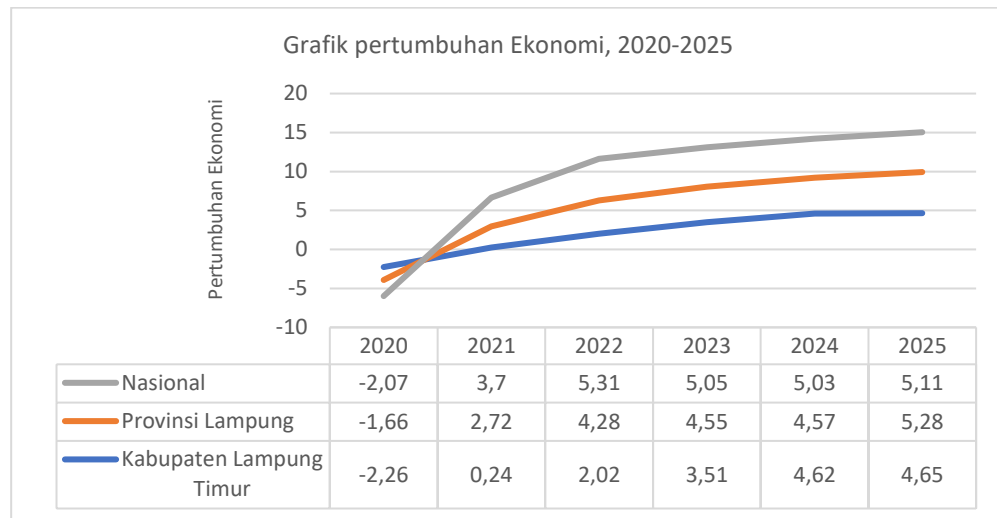
Melampauinya target RPJMD juga mengindikasikan bahwa strategi pembangunan ekonomi yang dijalankan telah efektif dalam mendorong peningkatan nilai tambah dan produktivitas daerah. Namun demikian, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut bersifat inklusif, mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, serta berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.

d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Tabel 3.3.6.4
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi dan Nasional

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi	Realisasi			
	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Lampung Timur	2,02	3,51	4,62	4,65
Provinsi Lampung	4,28	4,55	4,57	5,28
Nasional	5,31	5,05	5,03	5,11

Grafik 3.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur,
Provinsi Lampung, dan Nasional



Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur selama periode 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, meskipun secara komparatif masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung dan Nasional.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,02%, lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung (4,28%) dan Nasional (5,31%). Kondisi ini mencerminkan fase pemulihan ekonomi daerah yang relatif lebih lambat dibandingkan skala provinsi dan nasional.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Lampung Timur meningkat menjadi 3,51%, namun masih berada di bawah Provinsi Lampung (4,55%) dan Nasional (5,05%). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi, meskipun kesenjangan (gap) pertumbuhan masih cukup signifikan.

Tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang lebih kuat dengan realisasi 4,62%, mendekati capaian Provinsi Lampung (4,57%) dan mulai memperkecil selisih terhadap Nasional (5,03%). Ini menunjukkan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin kompetitif.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur mencapai 4,65%, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, angka ini masih berada di bawah Provinsi Lampung (5,28%) dan Nasional (5,11%). Meskipun terjadi peningkatan secara absolut, selisih pertumbuhan dengan provinsi dan nasional masih perlu menjadi perhatian.

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur menunjukkan perbaikan yang konsisten dan semakin mendekati rata-rata provinsi. Namun demikian, untuk meningkatkan daya saing daerah, diperlukan penguatan struktur ekonomi yang lebih produktif, peningkatan investasi, serta diversifikasi sektor-sektor unggulan agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berkelanjutan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pembangunan daerah. Capaian kinerja Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,65%, melampaui target sebesar 4,35%, dengan capaian kinerja sebesar 106,90%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 4,00%, capaian bahkan mencapai 116,25%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian daerah terus mengalami penguatan dan mampu menjaga momentum pertumbuhan secara berkelanjutan.

Kontribusi utama terhadap pertumbuhan ekonomi masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai struktur dominan ekonomi daerah. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta jasa lainnya turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan PDRB. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Lampung Timur masih berbasis sektor primer, namun secara bertahap mulai ditopang oleh sektor perdagangan dan jasa yang lebih produktif.

Meskipun capaian pertumbuhan ekonomi tergolong baik, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ke depan lebih stabil, inklusif, dan berdaya saing.

1) Permasalahan

- a. Struktur ekonomi masih didominasi sektor primer dengan nilai tambah yang relatif rendah, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim.

- b. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat secara merata.
- c. Daya saing produk lokal masih terbatas, terutama dalam aspek kualitas, kemasan, dan akses pasar digital.
- d. Hilirisasi dan pengolahan produk unggulan daerah belum optimal sehingga nilai tambah ekonomi masih terbatas.
- g. Investasi dan penciptaan lapangan kerja formal masih perlu ditingkatkan untuk memperluas basis pertumbuhan ekonomi.

2) Solusi dan Langkah Strategis

- a. Mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor unggulan daerah, khususnya pertanian dan perikanan, guna meningkatkan nilai tambah dan stabilitas pendapatan.
- b. Memperkuat pengembangan UMKM melalui pelatihan manajemen usaha, akses pembiayaan, sertifikasi produk, dan digitalisasi pemasaran.
- c. Meningkatkan iklim investasi daerah melalui penyederhanaan perizinan berbasis digital dan promosi potensi unggulan daerah.
- d. Mengembangkan sektor non-primer seperti perdagangan, jasa, dan industri kecil menengah untuk diversifikasi sumber pertumbuhan.
- e. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan kerja, serta penguatan kewirausahaan lokal.
- h. Melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah untuk menekan biaya logistik dan memperlancar distribusi barang dan jasa.

Dengan langkah strategis tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur diharapkan tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan berbagai program yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan sektor industri dan perdagangan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan daya saing produk daerah.

Realisasi penggunaan anggaran pada program-program yang mendukung pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.6.5 Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

NO	SASARAN / PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		
		TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	TARGET/ ANGGARAN
1	2	3	4	5
6	Sasaran Strategis 6			
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah			
	<i>Indikator Kinerja :</i>			
	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).</i>	4,35	4,65	106,9
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja			
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	54.392.701	47.855.144	87,98
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	32.363.495	31.602.800	97,65
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	11.274.230	11.004.100	97,60
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	39.677.230	39.406.496	99,32
	Program Pembeerdayaan Dan Perlindungan Koperasi	772.620.229	754.173.586	97,61
	Program Pengembangan UMKM	1.251.594.227	410.218.270	32,78
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	41.143.915	39.379.800	95,71
	Program Penempatan Tenaga Kerja	618.647.190	563.221.766	91,04
	Program Hubungan Industrial	77.716.769	67.315.486	86,62
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan			
	Urusan Bidang Perindustrian	797.526.438	693.844.540	87,00
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	749.540.291	683.108.483	91,14
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	23.612.092	-	0,00
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	24.374.055	10.736.057	44,05
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.644.636	5.973.400	56,12
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.194.899.202	1.114.561.261	93,28
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	421.695.030	409.817.095	97,18
	Program Pengembangan Ekspor	659.912.281	492.145.055	74,58
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	68.372.644	67.574.920	98,83

Berdasarkan data capaian kinerja, indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,35%, sedangkan realisasi mencapai 4,65%, sehingga capaian kinerja mencapai 106,9% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Lampung Timur mengalami pertumbuhan yang positif dan berhasil melampaui target yang direncanakan.

Dari sisi penggunaan anggaran, sebagian besar program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah menunjukkan tingkat realisasi yang cukup baik. Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, beberapa program memiliki tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi, seperti Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dengan realisasi 99,32%, serta Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan realisasi 95,71%. Program-program tersebut berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat daya saing pelaku usaha.

Sementara itu, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, beberapa program juga menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang tinggi, seperti Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan realisasi 98,83%, serta Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan realisasi 97,18%. Program tersebut berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasar serta mendukung kelancaran aktivitas perdagangan di daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa program dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif rendah, seperti Program Pengembangan UMKM dengan realisasi 32,78% serta Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan realisasi 44,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sebagian kegiatan masih belum optimal sehingga perlu dilakukan peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih maksimal.

Tabel 3.3.6.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran
Sasaran Strategis : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,35	4,65	106,9	±84,50*	Efisien

Keterangan:

Realisasi anggaran merupakan rata-rata realisasi program yang mendukung pencapaian indikator.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan tingkat realisasi anggaran program pendukung, terlihat bahwa capaian indikator sebesar 106,9% dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dikategorikan efisien, karena capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program pengembangan usaha, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta penguatan sektor industri dan perdagangan telah mampu memberikan kontribusi yang cukup optimal terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan beberapa program yang tingkat realisasinya masih rendah agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat semakin optimal pada tahun-tahun berikutnya.

3.3.7 Sasaran Strategis 7

Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat. Indikator
Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi tersebut adalah Rasio Angka Kriminalitas per 1.000 penduduk. Indikator ini menggambarkan tingkat kejadian tindak kriminal dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah, sehingga dapat menunjukkan tingkat keamanan secara kuantitatif.

Penurunan rasio kriminalitas mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan rasa aman masyarakat.

a. Realisasi capaian kinerja Indikator Persentase Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk

Tabel 3.3.7.1

Capaian Indikator Persentase Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk

Indikator	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian kinerja
Persentase Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk	0,92	0,92	100

Berdasarkan Tabel 3.3.7.1, target Rasio Angka Kriminalitas per 1.000 penduduk pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,92, dan realisasi juga tercatat sebesar 0,92, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah berhasil dipenuhi sesuai perencanaan. Stabilitas rasio kriminalitas tersebut mencerminkan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kriminalitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama aparat keamanan, termasuk peningkatan patroli, penguatan sistem keamanan lingkungan, serta sinergi dengan masyarakat melalui program keamanan berbasis partisipatif.

Meskipun capaian telah sesuai target, upaya peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban tetap perlu diperkuat agar rasio kriminalitas dapat terus ditekan di bawah angka target pada tahun-tahun berikutnya. Pendekatan preventif, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keamanan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial secara berkelanjutan.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Rasio Angka Kriminalitas Tahun 2021 s.d. 2025

Untuk melihat dinamika kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat secara lebih komprehensif, dilakukan perbandingan realisasi rasio angka kriminalitas per 1.000 penduduk selama periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah kejadian kriminalitas dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan.

Tabel 3.3.7.2
Perbandingan Realisasi Rasio Angka Kriminalitas Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2025

No	Tahun	Jumlah Kasus Kriminalitas	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Rasio Kriminalitas per 1.000 Penduduk
1	2021	813	1.101,97	0,74
2	2022	955	1.127,95	0,85
3	2023	1.198	1.110,00	1,08
4	2024	1.086	1.122,60	0,97
5	2025	1.069	1.164,70	0,92

Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2021 jumlah kasus kriminalitas tercatat sebanyak 813 kasus dengan jumlah penduduk sekitar 1.101,97 ribu jiwa, sehingga rasio kriminalitas mencapai 0,74 per 1.000 penduduk.

Pada tahun 2022, jumlah kasus kriminalitas meningkat menjadi 955 kasus dengan jumlah penduduk sekitar 1.127,95 ribu jiwa, sehingga rasio kriminalitas juga meningkat menjadi 0,85 per 1.000 penduduk.

Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah kasus kriminalitas kembali meningkat menjadi 1.198 kasus dengan jumlah penduduk sekitar 1.110 ribu jiwa, sehingga rasio kriminalitas mencapai 1,08 per 1.000 penduduk, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini

menunjukkan adanya peningkatan kejadian kriminalitas yang perlu mendapat perhatian serius.

Pada tahun 2024, jumlah kasus kriminalitas menurun menjadi 1.086 kasus dengan jumlah penduduk sekitar 1.122,6 ribu jiwa, sehingga rasio kriminalitas turun menjadi 0,97 per 1.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu pada tahun 2025, jumlah kasus kriminalitas kembali menurun menjadi 1.069 kasus dengan jumlah penduduk sekitar 1.164,7 ribu jiwa, sehingga rasio kriminalitas tercatat sebesar 0,92 per 1.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pengendalian kriminalitas yang relatif efektif melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Secara keseluruhan, tren rasio kriminalitas Kabupaten Lampung Timur menunjukkan peningkatan pada periode 2021–2023, namun mulai mengalami penurunan pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat mulai memberikan dampak positif, meskipun masih diperlukan langkah-langkah preventif dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar rasio kriminalitas dapat terus ditekan pada tahun-tahun mendatang.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD sekaligus memuat capaian kinerja.

Untuk menilai konsistensi pencapaian kinerja terhadap arah pembangunan jangka menengah daerah, dilakukan perbandingan antara realisasi indikator Rasio Angka Kriminalitas per 1.000 penduduk Tahun 2025 dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 3.3.7.3
Perbandingan Realisasi Rasio Angka Kriminalitas Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)
Rasio Angka Kriminalitas per 1.000 Penduduk	0,88	0,92	95,65

Berdasarkan hasil pengukuran, target RPJMD untuk indikator Rasio Angka Kriminalitas per 1.000 penduduk pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,88, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,92. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target RPJMD dihitung sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{0,88}{0,92} \times 100\% = 95,65\%$$

Sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target RPJMD sebesar 95,65%, yang termasuk dalam kategori **Baik**.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun rasio kriminalitas masih sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lampung Timur relatif terkendali. Selisih yang tidak terlalu besar antara target dan realisasi mengindikasikan bahwa upaya pengendalian kriminalitas telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan penguatan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum agar rasio kriminalitas dapat ditekan lebih rendah sesuai target pembangunan daerah.

Upaya peningkatan keamanan masyarakat perlu terus dilakukan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, sehingga tercipta kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif bagi aktivitas pembangunan daerah.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala dalam Penurunan Angka Kriminalitas serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Kriminalitas merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu wilayah. Penurunan angka kriminalitas mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif bagi aktivitas masyarakat serta pembangunan daerah.

Berdasarkan data Polres Lampung Timur, angka tindak pidana menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.198 kasus, kemudian menurun menjadi 1.086 kasus pada tahun

2024, dan kembali menurun menjadi 1.069 kasus pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya penguatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama aparat kepolisian telah memberikan dampak positif terhadap pengendalian kriminalitas di Kabupaten Lampung Timur.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program penguatan keamanan daerah, seperti patroli rutin terpadu, peningkatan kapasitas personel keamanan, serta penguatan koordinasi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Selain itu, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum juga turut berkontribusi terhadap menurunnya angka kriminalitas.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian agar kondisi keamanan daerah dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan secara berkelanjutan.

1) Permasalahan

Beberapa faktor yang masih menjadi kendala dalam upaya menekan angka kriminalitas antara lain:

- a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai norma dan aturan hukum, khususnya di kalangan remaja dan pelajar.
- b) Kurangnya pembinaan karakter dan pengawasan dari lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan, yang seharusnya menjadi benteng awal dalam mencegah perilaku menyimpang.
- c) Pengaruh budaya luar yang tidak tersaring secara baik, sehingga berpotensi mempengaruhi perilaku generasi muda.
- d) Faktor sosial ekonomi, seperti tingkat kemiskinan dan keterbatasan kesempatan kerja yang dapat memicu terjadinya tindak kriminal.
- e) Belum optimalnya sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat di beberapa wilayah desa.

2) Solusi dan Langkah Strategis

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut serta menjaga tren penurunan angka kriminalitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama aparat penegak hukum melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- a) Penguatan penegakan hukum secara tegas dan konsisten, guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak kriminal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- b) Peningkatan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam memberikan pembinaan moral serta edukasi hukum kepada generasi muda sejak dini.
- c) Penguatan nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan, sebagai upaya menjaga ketahanan sosial masyarakat dari pengaruh negatif budaya luar.
- d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi kelompok rentan, guna meminimalkan faktor ekonomi sebagai pemicu tindak kriminal.
- e) Penguatan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat, melalui pembentukan dan pengaktifan kembali kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tingkat desa.
- f) Peningkatan sinergi lintas sektor, antara pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta lembaga pendidikan dalam implementasi program *community policing*.

Dengan penguatan langkah-langkah tersebut, diharapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lampung Timur dapat terus terjaga secara berkelanjutan, sehingga mendukung terciptanya lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung aktivitas pembangunan daerah.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja

Realisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.7.4 Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat

NO	SASARAN / PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		
		TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN / TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
7	Sasaran Strategis 7			
	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat			
	<i>Indikator Kinerja :</i>			
	<i>Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk</i>	0,92	0,92	100
	Satuan Polisi Pamong Praja			
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	9.826.236.275	9.600.040.347	97,70

Sumber : LKPJ Satuan Polisi Pamong Praja, 2025.

Berdasarkan data capaian kinerja, indikator Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,92, dan realisasi capaian indikator juga sebesar 0,92, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lampung Timur dapat terjaga dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengalokasikan anggaran melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Program ini memiliki tingkat realisasi anggaran sebesar 97,70%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan secara optimal.

Program tersebut meliputi berbagai kegiatan seperti pengawasan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pengamanan kegiatan masyarakat, serta koordinasi dengan aparat keamanan dan unsur masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Pelaksanaan kegiatan tersebut

berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Tabel 3.3.7.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran Strategis : Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk	0,92	0,92	100	97,70	Cukup Efisien

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan tingkat realisasi anggaran program pendukung, terlihat bahwa capaian indikator sebesar 100% dicapai dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 97,70%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dikategorikan cukup efisien, karena capaian kinerja yang diperoleh relatif sebanding dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum telah berjalan secara efektif dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Namun demikian, peningkatan efektivitas program serta penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat tetap perlu dilakukan agar kondisi keamanan daerah dapat terus terjaga dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

3.3.8 Sasaran Strategis 8

Meningkatnya kualitas layanan publik.

- a. Indikator Indeks Pelayanan Publik.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran strategis ini diarahkan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengukuran capaian sasaran strategis ini dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

1) Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. IPP mencerminkan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme aparatur, sarana dan prasarana, serta mekanisme pengaduan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

a. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik

Realisasi capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 didasarkan pada hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025.

No	Instansi	Indeks	Kategori
190	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	3,78	B
191	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	3,78	B
192	Pemerintah Kabupaten Lamongan	3,77	B
193	Pemerintah Kabupaten Bangli	3,76	B
194	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	3,76	B
195	Pemerintah Kabupaten Kupat Lemang	3,74	B
196	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	3,74	B
197	Pemerintah Kabupaten Komoro Selatan	3,74	B
198	Pemerintah Kabupaten Jember	3,74	B
199	Pemerintah Kabupaten Wabek	3,74	B
200	Pemerintah Kabupaten Boyolali	3,74	B
201	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	3,74	B
202	Pemerintah Kabupaten Kepulauan	3,73	B
203	Pemerintah Kabupaten Samosir	3,73	B
204	Pemerintah Kabupaten Nias	3,72	B
205	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	3,72	B
206	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	3,71	B
207	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	3,71	B
208	Pemerintah Kabupaten Serang	3,70	B
209	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	3,69	B
210	Pemerintah Kabupaten Rorotan	3,69	B
211	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	3,68	B
212	Pemerintah Kabupaten Batai Bera	3,68	B
213	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	3,67	B
214	Pemerintah Kabupaten Karo	3,67	B
215	Pemerintah Kabupaten Bengkulu	3,66	B
216	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	3,66	B
217	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	3,66	B
218	Pemerintah Kabupaten Pangkajene	3,65	B
219	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	3,64	B
220	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	3,64	B
221	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	3,63	B
222	Pemerintah Kabupaten Rote	3,63	B
223	Pemerintah Kabupaten Berau	3,62	B
224	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	3,61	B
225	Pemerintah Kabupaten Supitng	3,58	B
226	Pemerintah Kabupaten Lematika	3,57	B
227	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	3,56	B

Sumber : Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026

Berdasarkan keputusan tersebut, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Timur memperoleh nilai 3,66 dengan kategori B (Baik). Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai kategori yang lebih tinggi.

Tabel 3.3.8.1
Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik	4,03	3,66	90,82

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Lampung Timur mencapai nilai 3,66 dari target 4,03, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90,82 persen dan berada pada kategori baik. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik secara umum telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target secara optimal.

Belum tercapainya target IPP sepenuhnya dipengaruhi oleh perlunya penguatan konsistensi penerapan standar pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta penguatan kompetensi aparatur pada beberapa unit layanan. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu memperkuat inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat agar kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan dan target IPP dapat tercapai secara optimal.

b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2023 s.d 2025

Tabel 3.3.8.2
Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2023 s.d 2025

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Pelayanan Publik	2,10	3,99	3,66	100	114	90,82

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun 2023 - 2025 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Pada Tahun 2023, realisasi IPP tercatat sebesar 2,10 dengan capaian kinerja 100 persen. Selanjutnya pada Tahun 2024, realisasi IPP meningkat signifikan menjadi 3,99 dengan tingkat capaian 114 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara cukup pesat.

Namun demikian, pada Tahun 2025 realisasi IPP mengalami penurunan menjadi 3,66 dengan tingkat capaian 90,82 persen. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian IPP Tahun 2025 masih berada pada kategori baik, yang mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum tetap terjaga, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Perkembangan capaian IPP tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur telah memberikan hasil positif, namun masih memerlukan konsistensi dan penguatan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu terus meningkatkan penerapan standar pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, serta kompetensi aparatur pelayanan agar kinerja pelayanan publik dapat lebih stabil dan meningkat secara berkesinambungan.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik sampai dengan tahun 2025 dengan target RPJMD.

Tabel 3.3.8.3
Perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik sampai dengan tahun 2025 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik	4,10	3,66	89,27

Berdasarkan perbandingan antara target RPJMD dan realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) sampai dengan Tahun 2025, diketahui bahwa target IPP sebesar 4,10 belum sepenuhnya tercapai, dengan realisasi sebesar 3,66. Tingkat capaian kinerja mencapai 89,3 persen, yang berada pada kategori cukup.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur telah mengalami perbaikan, namun masih memerlukan penguatan untuk memenuhi target jangka menengah daerah. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan antara lain konsistensi penerapan standar pelayanan, kualitas sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan kompetensi aparatur pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu memperkuat inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan pengawasan mutu layanan agar capaian Indeks Pelayanan Publik dapat terus ditingkatkan dan target RPJMD dapat dicapai secara optimal.

d. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi

Tabel 3.3.8.4
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi Lampung

Indeks Pelayanan Publik	Realisasi		
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur	2,10	3,99	3,66
Provinsi Lampung	4,05	4,27	4,19

Realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang belum stabil jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung. Pada Tahun 2023, IPP Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 2,10, masih jauh di bawah capaian IPP Provinsi Lampung sebesar 4,05. Selanjutnya pada Tahun 2024, IPP Kabupaten Lampung Timur meningkat signifikan menjadi 3,99, meskipun masih berada di bawah capaian IPP Provinsi Lampung yang mencapai 4,27.

Pada Tahun 2025, realisasi IPP Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 3,66, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara IPP Provinsi Lampung berada pada angka 4,19. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur mengalami perbaikan dibandingkan tahun awal pengukuran, namun masih terdapat kesenjangan capaian dengan rata-rata provinsi.

Perbandingan tersebut mengindikasikan perlunya penguatan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur, khususnya melalui peningkatan konsistensi penerapan standar pelayanan, penguatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkecil kesenjangan capaian IPP antara Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung pada tahun-tahun mendatang.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala dalam Peningkatan Indeks Pelayanan Publik serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target RPJMD. Pencapaian tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun pelaksanaan layanan di unit pelayanan.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) dilakukan pada beberapa perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian. Lokus nasional PEKPP Tahun 2025 ditentukan oleh Kementrian PANRB meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan lokus PEKPP mandiri meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), RSUD Sukadana, Dinas Sosial, Puskesmas Sukadana, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penetapan lokus tersebut mendorong peningkatan perhatian dan perbaikan kualitas pelayanan pada unit-unit strategis yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

1) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan peningkatan IPP didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Adanya upaya penyederhanaan prosedur pelayanan dan peningkatan kecepatan layanan pada unit pelayanan publik;
- b) Meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam penerapan standar pelayanan publik;
- c) Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan, khususnya pada OPD yang menjadi lokus penilaian PEKPP;
- d) Peningkatan koordinasi dan pembinaan pelayanan publik oleh perangkat daerah terkait.

2) Kendala yang Dihadapi

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:

- a) Belum seluruh perangkat daerah memiliki dan menerapkan standar pelayanan secara lengkap dan konsisten;
- b) Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum sepenuhnya terintegrasi pada seluruh unit layanan;
- c) Kualitas sumber daya manusia pelayanan yang belum merata, khususnya terkait disiplin dan orientasi pelayanan;
- d) Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang belum optimal dalam hal kecepatan dan ketuntasan tindak lanjut.

3) Alternatif Solusi dan Langkah Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- a) Penguatan dan penetapan standar pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah;
- b) Penyempurnaan dan penerapan SOP pelayanan secara konsisten;
- c) Pengembangan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi kualitas layanan;
- d) Penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat agar lebih responsif dan terintegrasi;
- e) Pembinaan khusus pada perangkat daerah yang menjadi lokus PEKPP nasional dan mandiri sebagai model peningkatan kualitas pelayanan publik.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. IKM menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, termasuk kemudahan akses, kecepatan layanan, kejelasan informasi, dan sikap petugas pelayanan.

a. Realisasi Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 diperoleh berdasarkan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan melibatkan beberapa Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP), antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta RSUD Sukadana.

Rekapitulasi hasil SKM per Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) menggambarkan variasi capaian pada masing-masing unit pelayanan serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan. Adapun rincian nilai SKM per OPP dan akumulasi nilai IKM Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.8.5
Rekapitulasi Hasil SKM Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP)
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Disdukcapil	Semester	80,5	80,5	69,25	100	80,25	78,25	80,25	82	78	82	B (Baik)
2	Dinsos	Tahunan	93	92,5	92,75	97	93	94,25	92,5	96,5	91,5	95,75	A (Sangat Baik)
3	DPMPTSP	Triwulan	88,8	87,5	83,5	95,5	86,5	86,5	90	85,5	96	89,69	A (Sangat Baik)
3	RSUD	Tahunan	81,3	82,5	79,9	93,6	82	82,5	86,2	79,1	85,4	83,61	B (Baik)
IKM Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025			85,90	85,75	81,35	96,53	85,44	85,38	87,24	85,78	87,73	87,76	B (Baik)

Pelaksanaan SKM dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur mencapai 87,76, yang berada pada kategori **Baik**, serta melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3.8.6
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87,76	103,25

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2025, target IKM ditetapkan sebesar 85.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi IKM Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 mencapai 87,76, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 103,3 persen dan berada pada kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan telah mampu memenuhi bahkan melampaui harapan masyarakat.

Tingginya capaian IKM mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam aspek kemudahan prosedur, kejelasan informasi, serta sikap dan responsivitas petugas pelayanan. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tetap perlu menjaga konsistensi kualitas pelayanan dan melakukan evaluasi berkelanjutan agar tingkat kepuasan masyarakat dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 – 2025.

Tabel 3.3.8.7
Capaian Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2023 - 2025

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat	85,55	87,11	87,76	103,07	103,7	103,25

Berdasarkan Tabel 3.54, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada Tahun 2023, realisasi IKM tercatat sebesar 85,55 dengan capaian kinerja 103,07 persen. Selanjutnya pada Tahun 2024, realisasi IKM meningkat menjadi 87,11 dengan capaian kinerja 103,7 persen, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 87,76 dengan capaian kinerja 103,25 persen.

Peningkatan nilai IKM tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur terus mengalami perbaikan dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Konsistensi capaian kinerja di atas 100 persen mengindikasikan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan publik, baik melalui perbaikan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, maupun penguatan sarana dan prasarana pelayanan, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan dengan target IKU.

Tabel 3.3.8.8
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja tahun 2025 dengan target IKU

Indikator	Target IKU	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87,76	102,04

Berdasarkan Tabel 3.55, perbandingan antara target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa target IKU yang ditetapkan sebesar 86 telah terlampaui dengan realisasi sebesar 87,76. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 102,04 persen dan berada pada kategori sangat baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mampu memenuhi dan melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam IKU. Hal ini mencerminkan efektivitas upaya peningkatan pelayanan publik, baik melalui perbaikan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, maupun penguatan sistem evaluasi kepuasan masyarakat.

d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi Lampung.

Tabel 3.3.8.9
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung

Indeks Kepuasan Masyarakat	Capaian		
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur	85,55	87,11	87,76
Provinsi Lampung	79,07	80,04	87,46

Berdasarkan data perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023–2025, capaian IKM Kabupaten Lampung Timur secara umum berada di atas rata-rata Provinsi Lampung. Pada tahun 2023, IKM Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 85,55, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Lampung yang mencapai 79,07. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur telah berjalan dengan baik dan mendapat penilaian positif dari masyarakat.

Pada tahun 2024, capaian IKM Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan menjadi 87,11, sedangkan Provinsi Lampung mencapai 80,04. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur serta kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kinerja pelayanan yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi.

Selanjutnya pada tahun 2025, IKM Kabupaten Lampung Timur kembali meningkat menjadi 87,76, sementara Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan signifikan hingga 87,46. Meskipun selisih capaian semakin kecil, Kabupaten Lampung Timur masih berada sedikit di atas rata-rata provinsi, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala dalam Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 yang berada di atas target menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah mampu memenuhi harapan masyarakat. Keberhasilan tersebut didukung oleh perbaikan prosedur pelayanan, peningkatan sikap dan responsivitas petugas, serta adanya tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada beberapa unit pelayanan. Konsistensi pelaksanaan survei dan penyusunan rencana tindak lanjut menjadi faktor penting dalam menjaga tingkat kepuasan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi peningkatan IKM, antara lain belum meratanya pelaksanaan SKM di seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP), variasi kualitas layanan antar unit pelayanan, serta belum optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan layanan. Selain itu, keterbatasan inovasi pelayanan pada beberapa unit juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan penguatan kewajiban pelaksanaan SKM pada seluruh OPP, mendorong penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil SKM secara konsisten, serta mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara berkelanjutan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja Meningkatnya kualitas layanan publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Lampung Timur, pemerintah daerah melaksanakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan standar pelayanan, penguatan tata kelola pelayanan publik, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara keseluruhan, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Program-program yang mendukung pencapaian indikator tersebut dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui kegiatan fasilitasi pelayanan publik, penataan tata laksana pemerintahan, serta monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik pada perangkat daerah.

Rincian program dan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian indikator peningkatan kualitas layanan publik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.8.10 Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik

NO	SASARAN / PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		
		TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN / TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
8	Sasaran Strategis 8			
	Meningkatnya kualitas layanan publik			
	Indikator Kinerja 1 :			
	Indeks Pelayanan Publik	4,03	3,66	90,82
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah			
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	106.478.675	90.854.500	85,33
	Indikator Kinerja 2 :			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87,76	103,25
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah			
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	107.850.209	80.791.420	74,91

Sumber : LKPJ Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2025

Berdasarkan data capaian kinerja, indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,03, sedangkan realisasi mencapai 3,66, sehingga capaian kinerja mencapai 90,82% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Sementara itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 85, sedangkan realisasi mencapai 87,76, sehingga capaian kinerja mencapai 103,25% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah di Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan.

Dari sisi penggunaan anggaran, kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan publik menunjukkan tingkat realisasi yang cukup baik. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana memiliki tingkat realisasi anggaran sebesar 85,33%, sedangkan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengoordinasian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana memiliki tingkat realisasi anggaran sebesar 74,91%.

Secara umum, pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam penguatan standar pelayanan publik dan pengawasan kualitas pelayanan pada perangkat daerah, agar capaian Indeks Pelayanan Publik dapat lebih optimal pada tahun berikutnya.

Tabel 3.3.8.11 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik	4,03	3,66	90,82	85,33	Cukup Efisien
Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87,76	103,25	74,91	Efisien

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan tingkat realisasi anggaran program pendukung, terlihat bahwa indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan kategori efisien, karena capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa program monitoring dan evaluasi pelayanan publik telah mampu memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.

Sementara itu, indikator Indeks Pelayanan Publik dapat dikategorikan cukup efisien, karena capaian kinerja yang diperoleh relatif sebanding dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa program fasilitasi pelayanan publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan, namun masih diperlukan penguatan pada aspek standar pelayanan, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan kapasitas penyelenggara pelayanan publik agar kualitas pelayanan publik dapat semakin meningkat.

3.3.9 Sasaran Strategis 9

Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- a. Indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan.
- b. Indikator Nilai SAKIP

1) Indikator Opini BPK/WTP

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja merupakan garda terdepan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan instansi pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk menghasilkan pelayanan publik secara optimal. Bentuk akuntabilitas dari tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sedangkan, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 6 dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 yaitu "Meningkatkan good governance (Pemerintah yang baik dan bertanggung jawab)".

a. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Opini BPK/WTP (Opini)

Tabel 3.3.9.1
Capaian Indikator Opini BPK/WTP (opini)

Indikator	Target	Realisasi tahun 2025	Capaian kinerja
Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	WTP

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menargetkan untuk kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Target tersebut ditetapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024, pemerintah daerah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung oleh pengungkapan yang memadai, sistem pengendalian intern yang berjalan efektif, serta tingkat kepatuhan yang baik terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP secara konsisten dari tahun ke tahun mencerminkan bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Lampung Timur telah berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa upaya pembinaan, pengawasan, serta pengendalian pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2023 s.d 2025

Tabel 3.3.9.2
Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Bahwa capaian opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah diraih dari tahun 2018 sampai tahun 2025 masih berhasil mempertahankan opini WTP.

c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2025 dengan target RPJMD

Tabel 3.3.9.3

Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2025 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2025	Capaian kinerja
Opini BPK/WTP (opini).	WTP	WTP	WTP

Capaian ini sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu memperoleh opini WTP secara konsisten hingga akhir periode perencanaan. Opini WTP yang diraih pada tahun 2025 menjadi indikator bahwa Pemerintah Daerah berada pada jalur yang tepat dalam mencapai target kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Ke depan, Pemerintah Daerah akan terus melakukan langkah perbaikan berkelanjutan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, memperkuat sistem pengendalian intern, serta meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan guna mempertahankan opini WTP hingga akhir periode RPJMD.

d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.3.9.4

Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung

Opini BPK/WTP (opini).	Capaian		
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur	WTP	WTP	WTP
Provinsi Lampung	WTP	WTP	WTP

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Capaian ini sekaligus memperpanjang prestasi yang telah diraih secara konsisten sejak tahun 2018 hingga tahun 2025, menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian opini WTP tersebut antara lain:

1. Dukungan berbagai pihak, antara lain adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Timur dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2. Pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah, penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, selanjutnya konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan dengan baik.
3. Peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah melalui review terhadap laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Inspektorat Daerah juga dilakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus serta pendampingan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun audit Inspektorat Daerah. Disamping hal itu untuk peningkatan kapasitas penyusun laporan keuangan diadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, bimtek penyusunan laporan keuangan BLUD, dan koordinasi/pertemuan untuk persiapan menyusun laporan keuangan akhir tahun.
4. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah disusun kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pengelolaan

keuangan daerah dilaksanakan program dan kegiatan pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yaitu BPKAD Kabupaten Lampung Timur dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah serta reviu dan pengawasan oleh APIP. Pada konteks SKPKD diadakan rekonsiliasi setiap bulan dengan perangkat daerah agar terjadi kesesuaian dalam penatausahaan keuangan.

5. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran penyusunan APBD 2024, dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
6. Pengelolaan aset menggunakan instrumen aplikasi eBMD yang telah digunakan sejak tahun 2021.
7. Rekonsiliasi laporan fisik dan keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengetahui serapan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah sebagai upaya pengendalian pembangunan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. telah dilakukan.
8. Implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebagai instrumen aplikasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lampung Timur, Pengadaan barang dan jasa dengan lelang yang selama ini dilaksanakan telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Namun, meskipun capaian opini WTP berhasil dipertahankan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian untuk memastikan keberlanjutan kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.

1) Permasalahan

- a. Belum seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang seragam terkait penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi daerah.

- b. Proses rekonsiliasi keuangan dan aset antarperangkat daerah terkadang mengalami keterlambatan, yang dapat memengaruhi keakuratan laporan keuangan.
- c. Kapasitas SDM keuangan di beberapa perangkat daerah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
- d. Pemanfaatan sistem informasi keuangan (SIPKD, eBMD, dan SIPD) belum sepenuhnya optimal di seluruh perangkat daerah.

2) Solusi dan Langkah Strategis

Untuk menjaga keberlanjutan opini WTP dan memperkuat akuntabilitas keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komitmen antara Bupati, DPRD, Sekretaris Daerah, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.
- b. Melaksanakan reviu laporan keuangan oleh Inspektorat Daerah sebelum disampaikan ke BPK, guna memastikan kesesuaian dengan SAP.
- c. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pendampingan teknis bagi pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, dan penyusun laporan keuangan perangkat daerah.
- d. Melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset secara rutin setiap bulan, untuk memastikan keakuratan data laporan keuangan.
- e. Mengoptimalkan penerapan aplikasi keuangan daerah seperti SIPKD, SIPD, dan e-BMD untuk efisiensi penatausahaan keuangan dan aset.
- f. Menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Langkah-langkah tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan serta memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

2) Indikator Nilai SAKIP

Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penerapan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Penilaian SAKIP mencerminkan keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara menyeluruh. Nilai SAKIP juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

a. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Nilai SAKIP

Tabel 3.3.9.5
Capaian Indikator Nilai SAKIP

Indikator	Target	Realisasi	Capaian kinerja
Nilai SAKIP	B	B	100

Evaluasi SAKIP tahun 2024 yang dilaksanakan penilaian di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan target nilai SAKIP B sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, efisiensi anggaran, dan efektivitas pencapaian program pembangunan daerah.

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/508/AA.05/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperoleh nilai evaluasi sebesar 60,85 dengan predikat “B”, yang menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan baik pada tingkat pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih memerlukan penguatan dan perbaikan dalam beberapa aspek manajemen kinerja. Adapun rincian nilai per komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.9.6
Capaian Nilai SAKIP Perkomponen Tahun 2025

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	22,68
2	Pengukuran Kinerja	30	15,70
3	Pelaporan Kinerja	15	9,52
4	Evaluasi Internal	25	12,95
Nilai Evaluasi AKIP		100	60,85

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, sebagaimana rekomendasi Kementerian PANRB dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025, LKJIP Tahun 2025 ini menyajikan pengayaan informasi kinerja yang lebih komprehensif dan berorientasi hasil. Penguatan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan penjenjangan (*cascading*) kinerja hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF), perbaikan kualitas indikator agar memenuhi kriteria SMART, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja.

Analisis pengukuran kinerja dilakukan secara lebih mendalam dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja, membandingkan capaian tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya, serta mengaitkannya dengan indikator makro daerah. Selain itu, disajikan pula keterkaitan antara program dan kegiatan beserta dukungan anggarannya terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi capaian kinerja, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis hasil.

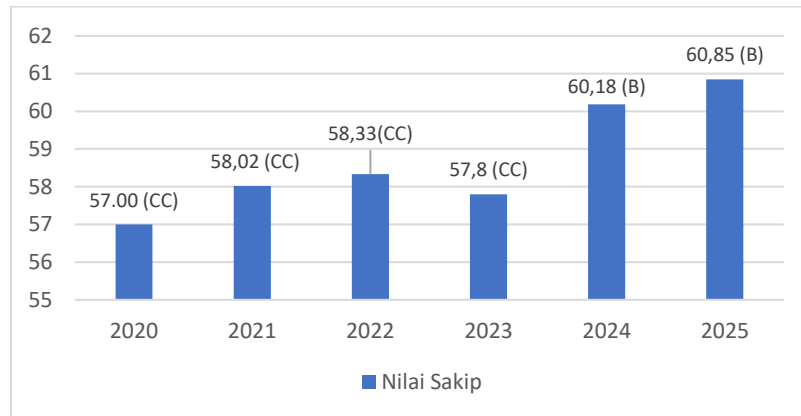
b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2020 s.d 2025

Tabel 3.3.9.7
Perbandingan Capaian nilai SAKIP Lampung Timur tahun 2020 s.d 2025

Indikator	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai SAKIP	57,00 (CC)	58,02 (CC)	58,33 (CC)	57,80 (CC)	60,18 (B)	60,85 (B)

Perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2020-2024 dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Gambar 3.8
Perkembangan Nilai SAKIP Tahun 2020 – 2025



Berdasarkan Tabel 3.66, perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2020 nilai SAKIP tercatat sebesar 57,00 (CC), kemudian meningkat menjadi 58,02 (CC) pada Tahun 2021 dan 58,33 (CC) pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 sempat mengalami penurunan menjadi 57,80 (CC), namun kembali meningkat secara signifikan pada Tahun 2024 menjadi 60,18 (B) dan terus meningkat pada Tahun 2025 menjadi 60,85 (B).

Kenaikan nilai dari kategori CC menjadi B pada Tahun 2024 dan bertahan pada Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi internal. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta meningkatnya kualitas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Meskipun demikian, nilai SAKIP masih berada pada kategori B, sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja menuju kategori yang lebih tinggi. Penguatan *cascading* kinerja, penyempurnaan indikator yang lebih *outcome-oriented*, serta peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan nilai SAKIP pada periode berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2025 dengan target RPJMD.

Tabel 3.3.9.8
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja tahun 2025
dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2025	Capaian kinerja
Nilai SAKIP	B	B	B

Capaian nilai SAKIP B tahun 2025 merupakan bukti nyata dari keberhasilan pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi. Untuk ke depan, upaya peningkatan tetap diperlukan agar predikat menuju BB.

d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi.

Tabel 3.3.9.9
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi

Nilai SAKIP	Capaian		
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur	57,80 (CC)	60,18 (B)	60,85 (B)
Provinsi Lampung	68,10 (B)	68,36 (B)	BB

Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. Pada Tahun 2023 nilai SAKIP sebesar 57,80 (CC), meningkat menjadi 60,18 (B) pada Tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 60,85 (B) pada Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas implementasi manajemen kinerja di tingkat kabupaten.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Provinsi Lampung, capaian Kabupaten Lampung Timur masih berada di bawah rata-rata provinsi. Provinsi Lampung pada Tahun 2023 telah mencapai nilai 68,10 (B) dan meningkat menjadi 68,36 (B) pada Tahun 2024, bahkan pada Tahun 2025 telah mencapai kategori BB, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi.

Perbandingan ini mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Lampung Timur telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan peningkatan kategori dari CC menjadi B, masih terdapat kesenjangan kinerja dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kualitas perencanaan berbasis *outcome*, konsistensi *cascading* kinerja hingga level perangkat daerah, serta peningkatan efektivitas evaluasi internal agar capaian nilai SAKIP dapat ditingkatkan menuju kategori yang lebih tinggi pada periode mendatang.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai SAKIP Kabupaten Lampung Timur meningkat dari 60,18 (2024) menjadi 60,85 (2025) dan tetap berada pada kategori B. Peningkatan ini didukung oleh beberapa faktor berikut:

1. Perbaikan pada Komponen Perencanaan Kinerja, dengan adanya peningkatan nilai dari 21,54 menjadi 22,68
2. Kualitas pelaporan kinerja yang relatif baik, dimana laporan telah memuat analisis ketercapaian, data pembandingan, faktor pendukung/penghambat, serta analisis efisiensi
3. Peningkatan capaian indikator makro, seperti Angka Kemiskinan yang menurun dan IPM yang meningkat, yang menunjukkan dampak nyata pembangunan daerah.
4. Komitmen pimpinan daerah dalam mempertahankan kategori B serta mendorong implementasi SAKIP secara lebih terstruktur.

Meskipun terjadi peningkatan nilai, LHE mengidentifikasi beberapa kelemahan mendasar yang masih perlu diperbaiki

- 1) Pada Komponen Perencanaan
 - Cascading kinerja belum sepenuhnya logis dan belum mengacu pada *logical framework* serta CSF.
 - Masih terdapat sasaran dan indikator yang belum berorientasi hasil (*outcome*).
 - Penetapan target belum mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya (belum *challenging* dan *sustainable*).
 - Kepatuhan penyampaian dokumen perencanaan belum optimal.

2) Pada Komponen Pengukuran

- Pengukuran kinerja masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi sistem.
- Beberapa indikator belum memenuhi kriteria SMART.
- Monitoring dan evaluasi triwulanan belum optimal serta belum terdokumentasi dengan baik di portal E-SAKIP Reviu.

3) Pada Komponen Pelaporan

- Kualitas analisis belum merata di seluruh perangkat daerah.
- Pemanfaatan laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan belum optimal (target tahun berikutnya masih lebih rendah dari realisasi sebelumnya).

4) Pada Komponen Evaluasi Internal

- Belum tersedia pedoman evaluasi internal sesuai PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021.
- Rekomendasi evaluasi internal belum menysasar akar masalah.
- Monitoring tindak lanjut rekomendasi belum dilakukan secara berkala.

Berdasarkan rekomendasi LHE yang disampaikan evaluator Kementrian PANRB, langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. Reviu dan penyempurnaan *cascading* kinerja berbasis *logical framework* dan CSF hingga level operasional.
2. Perbaikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi prinsip SMART serta berorientasi outcome.
3. Penetapan target yang lebih menantang dan berkelanjutan, dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
4. Penguatan sistem manajemen kinerja berbasis digital, terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengukuran, dan pelaporan.
5. Penyusunan pedoman evaluasi internal AKIP dan penguatan peran Inspektorat dalam *quality assurance*.
6. Monitoring berkala atas tindak lanjut rekomendasi serta pelaporan melalui portal E-SAKIP Reviu.

7. Standarisasi kualitas laporan kinerja agar seluruh perangkat daerah memiliki kualitas analisis yang setara.

Peningkatan nilai SAKIP Tahun 2025 menunjukkan adanya progres implementasi manajemen kinerja di Kabupaten Lampung Timur. Namun, untuk mencapai kategori BB, diperlukan penguatan mendasar pada kualitas perencanaan berbasis outcome, integrasi sistem pengukuran, serta efektivitas evaluasi internal. Fokus perbaikan harus diarahkan pada transformasi manajemen kinerja yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak langsung pada peningkatan kinerja pembangunan daerah.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas tersebut tercermin dari kualitas pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penguatan sistem pelaporan kinerja, serta peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah serta Nilai SAKIP yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen kinerja pada instansi pemerintah daerah.

Program-program yang mendukung pencapaian indikator tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan keuangan daerah serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam penguatan implementasi SAKIP dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.

Rincian program dan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian indikator peningkatan akuntabilitas pemerintahan daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.9.10 Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

NO	SASARAN / PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		
		TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN / TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
9	Sasaran Strategis 9			
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah			
	<i>Indikator Kinerja 1:</i>			
	<i>Opini BPK/WTP (opini)</i>	WTP	WTP	100
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	513.570.330.440	499.035.205.815	97,17
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.505.419.000	1.510.728.620	60,30
	<i>Indikator Kinerja 2 :</i>			
	<i>Nilai SAKIP</i>	B	B	100
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	139.411.865	112.213.032	80,49

Sumber : LKPJ BPKAD dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2025

Berdasarkan data capaian kinerja, indikator Opini BPK pada tahun 2025 ditargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan realisasi capaian juga memperoleh opini WTP, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sementara itu, indikator Nilai SAKIP pada tahun 2025 ditargetkan memperoleh nilai B, dan realisasi capaian juga memperoleh nilai B, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berjalan dengan baik, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

Dari sisi penggunaan anggaran, program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki tingkat realisasi anggaran sebesar 97,17%, yang menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara optimal. Sementara itu, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki

tingkat realisasi sebesar 60,30%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan yang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan rencana.

Pada sisi penguatan akuntabilitas kinerja, kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memiliki tingkat realisasi anggaran sebesar 80,49%, yang menunjukkan bahwa kegiatan penyusunan laporan kinerja dan penguatan implementasi SAKIP telah berjalan dengan baik.

Secara umum, pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 3.3.9.11 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Opini BPK	WTP	WTP	100	97,17	Cukup Efisien
Nilai SAKIP	B	B	100	80,49	Efisien

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan tingkat realisasi anggaran program pendukung, terlihat bahwa indikator Nilai SAKIP menunjukkan kategori efisien, karena capaian kinerja yang diperoleh dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penguatan implementasi SAKIP dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah telah dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

Sementara itu, indikator Opini BPK dapat dikategorikan cukup efisien, karena capaian kinerja yang diperoleh relatif sebanding dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan aset daerah serta penguatan sistem pengendalian intern agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

3.3.10 Sasaran Strategis 10

Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah

Indikator Pertumbuhan Investasi daerah

Sasaran strategis ini diarahkan untuk mendorong peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal, memperluas basis usaha, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Pengukuran capaian sasaran dilakukan melalui indikator Pertumbuhan Investasi Daerah, yang menggambarkan persentase peningkatan realisasi investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap iklim usaha daerah, efektivitas pelayanan perizinan, serta daya tarik potensi ekonomi Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan data realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM, capaian investasi Kabupaten Lampung Timur menunjukkan peningkatan pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024.

Pada Tahun 2024, total realisasi investasi tercatat sebesar Rp463.854.833.889,35, yang terdiri dari:

- PMDN sebesar Rp340.437.368.280 (73,39%)
- PMA sebesar Rp123.417.465.609,35 (26,61%)

Sementara itu, pada Tahun 2025 total realisasi investasi meningkat menjadi Rp571.762.610.310,00, dengan rincian:

- PMDN sebesar Rp492.897.379.572,00 (86,21%)
- PMA sebesar Rp78.865.230.738,00 (13,79%)

Dari perbandingan tersebut, terjadi kenaikan total investasi sebesar Rp107.907.776.420,65 atau tumbuh sekitar 23,26% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dilihat berdasarkan jenis investasi:

- PMDN mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp152.460.011.292 atau tumbuh sekitar 44,79% dibandingkan Tahun 2024. Peningkatan ini menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan investasi daerah pada Tahun 2025.
- PMA mengalami penurunan sebesar Rp44.552.234.871,35 atau turun sekitar 36,10% dibandingkan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi investasi asing masih fluktuatif dan memerlukan strategi penguatan promosi serta peningkatan daya saing daerah.

Secara komposisi, terjadi pergeseran struktur investasi dimana pada Tahun 2025 ketergantungan terhadap PMDN semakin dominan. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan investor domestik terhadap iklim usaha di Kabupaten Lampung Timur.

Dengan pertumbuhan total investasi sebesar 23,26%, maka capaian indikator Pertumbuhan Investasi Daerah pada Tahun 2025 dapat dinilai berkinerja baik, meskipun optimalisasi peningkatan PMA tetap menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan investasi tahun berikutnya.

a. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah

Tabel 3.3.10.1
Capaian Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan Investasi Daerah	20	23,26	116,30

Berdasarkan Tabel diatas, target Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar 20%, dengan realisasi capaian sebesar 23,26%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 116,30% dari target yang telah ditetapkan.

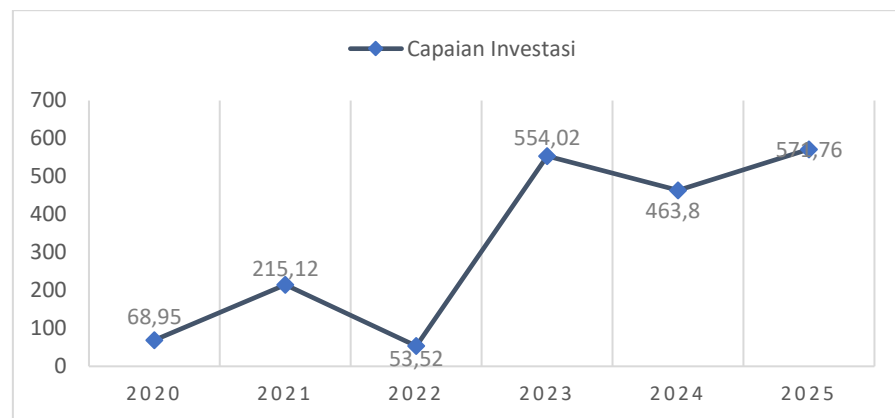
Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mendorong pertumbuhan investasi daerah pada Tahun 2024 berada pada kategori sangat baik, karena melampaui target yang direncanakan.

Pertumbuhan investasi sebesar 23,26% tersebut didukung oleh meningkatnya realisasi investasi yang tercatat sebesar Rp463.854.833.889,35, yang terdiri dari PMDN sebesar Rp340.437.368.280 dan PMA sebesar Rp123.417.465.609,35. Peningkatan ini mencerminkan adanya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kabupaten Lampung Timur serta efektivitas kebijakan pelayanan perizinan dan promosi investasi yang telah dilaksanakan.

b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2020 s.d 2025

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan dinamika yang dapat diamati melalui grafik berikut :

Gambar 3.9
Perkembangan investasi Kabupaten Lampung Timur
tahun 2020–2025 dalam satuan miliar rupiah



Sumber : LKjIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2025

Berdasarkan Gambar 3.9, perkembangan realisasi investasi Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada Tahun 2020 realisasi investasi tercatat sebesar Rp68,95 miliar, kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2021 menjadi Rp215,12 miliar.

Namun demikian, pada Tahun 2022 terjadi penurunan cukup tajam menjadi Rp53,52 miliar. Kondisi ini kemudian berbalik pada Tahun 2023 dengan lonjakan realisasi investasi yang sangat signifikan hingga mencapai Rp554,02 miliar.

Pada Tahun 2024, realisasi investasi tercatat sebesar Rp463,8 miliar. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi perlambatan pertumbuhan investasi. Penurunan ini bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental

ekonomi daerah, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung pada tahun tersebut.

Momentum politik tersebut cenderung menimbulkan sikap *wait and see* dari para investor, baik dalam negeri maupun asing, dalam mengambil keputusan penanaman modal. Investor pada umumnya menunggu kepastian arah kebijakan dan stabilitas politik pasca pelaksanaan pesta demokrasi sebelum merealisasikan investasi dalam skala besar.

Meskipun demikian, pada Tahun 2025 realisasi investasi kembali menunjukkan peningkatan menjadi Rp571,76 miliar, yang menandakan pulihnya kepercayaan investor setelah kondisi politik kembali stabil. Hal ini menunjukkan bahwa perlambatan pada Tahun 2024 bersifat sementara (temporer) dan tidak mencerminkan penurunan daya saing investasi daerah secara struktural.

Secara keseluruhan, tren investasi selama periode 2020–2025 memperlihatkan bahwa Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi pertumbuhan investasi yang kuat, meskipun tetap dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti kondisi politik nasional. Ke depan, penguatan kepastian regulasi, stabilitas kebijakan, serta promosi investasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pertumbuhan investasi daerah.

c. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator tahun 2025 dengan RPJMD

Tabel 3.3.10.2

Perbandingan Realisasi capaian Indikator tahun 2025 dengan RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi tahun 2025	Capaian kinerja
Pertumbuhan Investasi Daerah	20	23,26	116,30

Berdasarkan Tabel 3.75, target Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD ditetapkan sebesar 20%. Adapun realisasi capaian pada Tahun 2025 sebesar 23,26%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 116,30% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 melampaui target RPJMD dan berada

pada kategori sangat baik. Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya realisasi investasi daerah, terutama dari PMDN.

Secara keseluruhan, indikator pertumbuhan investasi daerah telah tercapai secara optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Tabel 3.3.10.3

Perbandingan Realisasi capaian Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Pertumbuhan Investasi Daerah	Realisasi		
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur	943,9	-16,28	23,26
Provinsi Lampung	16,28	-11,29	76,44
Nasional	17,54	20,81	12,7

Pertumbuhan investasi Kabupaten Lampung Timur menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan Provinsi Lampung dan capaian nasional. Pada Tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur mencatat pertumbuhan sangat tinggi sebesar 943,9%, jauh melampaui Provinsi Lampung (16,28%) dan nasional (17,54%). Namun pada Tahun 2024 terjadi kontraksi sebesar -16,28%, sejalan dengan penurunan di tingkat provinsi (-11,29%), sementara nasional masih tumbuh 20,81%.

Pada Tahun 2025, pertumbuhan investasi Kabupaten Lampung Timur kembali positif sebesar 23,26%. Meskipun lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung (76,44%), capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 12,7%.

Secara keseluruhan, kinerja pertumbuhan investasi Kabupaten Lampung Timur cukup kompetitif dan mampu pulih setelah perlambatan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya ketahanan dan daya tarik investasi daerah yang tetap terjaga.

e. Analisis Penyebab Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Dilakukan

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mencapai Rp571,76 miliar, terdiri atas PMDN sebesar Rp492,90 miliar dan PMA sebesar Rp78,87 miliar. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp463,85 miliar, terjadi peningkatan sebesar Rp107,91 miliar atau tumbuh sekitar 23,26%, sehingga target pertumbuhan 20% telah terlampaui. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja investasi daerah pada Tahun 2025 mengalami pemulihan yang signifikan setelah perlambatan pada Tahun 2024.

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan realisasi investasi Tahun 2025 antara lain:

- a) Stabilitas politik dan pemerintahan pasca Pemilu dan Pilkada, yang meningkatkan kembali kepercayaan investor.
- b) Dominasi peningkatan PMDN, yang menunjukkan kuatnya kepercayaan investor domestik terhadap iklim usaha daerah.
- c) Perbaikan pelayanan perizinan melalui optimalisasi OSS dan DPMPSTSP, sehingga proses investasi menjadi lebih cepat dan transparan.
- d) Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung percepatan realisasi proyek investasi.
- e) Promosi potensi unggulan daerah yang lebih terarah pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan usaha berbasis sumber daya lokal.

Namun demikian, kontribusi PMA masih mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diversifikasi sumber investasi tetap menjadi perhatian.

Untuk menjaga tren positif dan meningkatkan kualitas investasi, langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan promosi investasi yang lebih agresif dan terfokus pada investor asing.
- b) Mengembangkan kawasan potensial berbasis komoditas unggulan daerah.
- c) Mendorong investasi yang berorientasi pada hilirisasi dan penciptaan nilai tambah.

- d) Memberikan fasilitasi dan pendampingan bagi investor agar realisasi investasi berjalan tepat waktu.
- e) Memperkuat monitoring dan evaluasi realisasi investasi secara triwulanan.

Dengan strategi tersebut, diharapkan pertumbuhan investasi Kabupaten Lampung Timur dapat terus meningkat secara berkelanjutan serta memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja daerah.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan promosi potensi daerah, memberikan kemudahan pelayanan perizinan, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dan mendorong peningkatan investasi di daerah.

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Timur serta memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi.

Rincian program dan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian indikator pertumbuhan investasi daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.10.4 Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah

NO	SASARAN / PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		
		TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN / TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
10	Sasaran Strategis 10			
	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah			
	Indikator Kinerja :			
	Pertumbuhan investasi daerah	20	23,26	116,3
	Dinas Penanaman Modal Layanan Terpadu Satu Pintu			
	Program pengembangan iklim penanaman modal	596.970.897	439.279.723	73,58
	Program promosi penanaman modal	282.464.211	281.555.910	99,68
	Program pelayanan penanaman modal	579.065.738	564.993.924	97,57
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	56.851.083	54.947.926	96,65

Sumber : LKPJ Dinas Penanaman Modal Layanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Berdasarkan data capaian kinerja, indikator Pertumbuhan Investasi Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 20%, sedangkan realisasi mencapai 23,26%, sehingga capaian kinerja mencapai 116,3% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi di Kabupaten Lampung Timur mengalami perkembangan yang positif serta melampaui target yang direncanakan.

Peningkatan investasi tersebut didukung oleh berbagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, antara lain melalui peningkatan pelayanan perizinan berbasis elektronik, penyederhanaan prosedur perizinan usaha, serta peningkatan promosi potensi investasi daerah kepada investor.

Dari sisi penggunaan anggaran, sebagian besar program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang cukup baik. Program Promosi Penanaman Modal memiliki tingkat realisasi sebesar 99,68%, sementara Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki tingkat realisasi sebesar 97,57%, yang menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan dan promosi investasi telah dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal juga memiliki tingkat realisasi anggaran yang tinggi yaitu 98,65%, yang berperan dalam memastikan bahwa kegiatan investasi yang telah masuk ke daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, terdapat program dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif lebih rendah, yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan tingkat realisasi sebesar 73,58%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang mendukung penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah.

Secara umum, pelaksanaan program peningkatan investasi daerah telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya aktivitas investasi di Kabupaten Lampung Timur yang tercermin dari meningkatnya nilai pertumbuhan investasi daerah.

Tabel 3.3.10.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Pertumbuhan investasi daerah (%)	20	23,26	116,3	±92,37*	Cukup Efisien

Keterangan:

Realisasi anggaran merupakan rata-rata realisasi program yang mendukung pencapaian indikator.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan tingkat realisasi anggaran program pendukung, terlihat bahwa capaian indikator sebesar 116,3% dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan investasi daerah dapat dikategorikan cukup efisien, karena capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa program promosi investasi, pelayanan penanaman modal, serta pengendalian pelaksanaan investasi telah mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Lampung Timur. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pada program pengembangan iklim investasi agar daya tarik investasi daerah dapat semakin meningkat pada tahun berikutnya.

3.3.11 Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Upaya Mitigasi bencana alam dan Kebakaran.

Indikator Ketahanan Daerah

Sasaran strategis ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana alam dan kebakaran, baik melalui upaya pencegahan, mitigasi, maupun penanganan tanggap darurat. Peningkatan ketahanan daerah menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat, melindungi aset daerah, serta menjamin keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan hasil verifikasi dan finalisasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025 yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Surat Nomor B-37/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026, nilai IKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebesar 0,75.

Nilai tersebut berada di atas rata-rata IKD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang sebesar 0,54, serta menempatkan Kabupaten Lampung Timur dalam kategori ketahanan tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat telah berjalan dengan baik.

Secara substantif, nilai IKD mencerminkan kesiapan daerah dalam beberapa aspek utama, antara lain:

1. Ketersediaan regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana;
2. Kelembagaan dan kapasitas BPBD;
3. Perencanaan kontinjensi dan dokumen kajian risiko bencana;
4. Sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat;
5. Koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana.

Dengan nilai IKD sebesar 0,75, Kabupaten Lampung Timur menunjukkan kapasitas kelembagaan dan sistem mitigasi yang relatif kuat dalam menghadapi potensi bencana alam maupun kebakaran. Hal ini turut berkontribusi terhadap pengendalian nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 yang tercatat sebesar 106,13.

a. Realisasi Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Daerah

Tabel 3.3.11.1
Capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian kinerja
Indeks Ketahanan Daerah	0,48	0.75	156,25

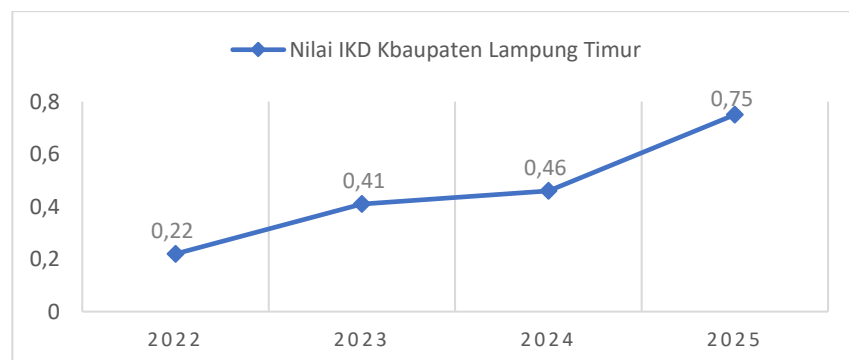
Target Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,48, sedangkan realisasi berdasarkan hasil finalisasi BNPB mencapai 0,75, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 156,25 persen dan berada pada kategori Sangat Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kesiapsiagaan Kabupaten Lampung Timur dalam pengurangan risiko bencana dan penanggulangan kebakaran telah melampaui target yang ditetapkan. Nilai IKD yang tinggi mencerminkan penguatan aspek regulasi, kelembagaan BPBD, perencanaan kontinjensi, sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas sektor dalam manajemen bencana.

Secara umum, keberhasilan ini mengindikasikan bahwa upaya mitigasi dan peningkatan ketahanan daerah telah berjalan efektif, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pengendalian risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Ketahanan Daerah tahun 2022 s.d 2025.

Gambar 3.10
Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah
Tahun 2022 s.d 2025



Sumber : BPBD Kabupaten Lampung Timur

Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten. Pada tahun 2022, nilai IKD tercatat sebesar 0,22, kemudian meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2023 dan kembali naik menjadi 0,46 pada tahun 2024. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2025 dengan capaian 0,75.

Kenaikan nilai IKD secara bertahap tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas daerah dalam aspek pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, serta tata kelola penanggulangan bencana. Lonjakan nilai pada tahun 2025 mengindikasikan perbaikan substansial dalam pemenuhan indikator ketahanan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, perencanaan, maupun koordinasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam membangun daerah yang tangguh terhadap bencana. Peningkatan yang konsisten selama empat tahun terakhir juga menunjukkan bahwa intervensi kebijakan dan penguatan sistem mitigasi telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ketahanan daerah.

c. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 dengan target RPJMD

Tabel 3.3.11.2

Perbandingan Realisasi capaian Indikator tahun 2025 dengan RPJMD

Indikator	Target IKU	Realisasi s/d tahun 2025	Capaian kinerja
Indeks Ketahanan Daerah	0,44	0,75	170,5

Target Indeks Ketahanan Daerah dalam RPJMD ditetapkan sebesar 0,44, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 0,75, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 170,45 persen dan termasuk kategori Sangat Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana alam dan kebakaran telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Realisasi yang

jauh di atas target mengindikasikan adanya penguatan signifikan pada aspek kelembagaan, regulasi, kesiapsiagaan, serta koordinasi penanggulangan bencana.

d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Tabel 3.3.11.3

Tabel Perbandingan IKD dan IRB Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2024–2025

Kabupaten/Kota	IKD 2024	IRB 2024	IKD 2025	IRB 2025
Lampung Barat	0,39	176,28	0,4	132,89
Tanggamus	0,71	120,21	0,75	126,18
Lampung Selatan	0,53	151,15	0,5	205,36
Lampung Timur	0,46	166,4	0,75	106,13
Lampung Tengah	0,47	106,14	0,5	115,15
Lampung Utara	0,29	131,2	0,32	161,97
Way Kanan	0,66	94,92	0,75	103,47
Tulang Bawang	0,49	114,44	0,5	90,01
Pesawaran	0,45	152,79	0,5	176,77
Pringsewu	0,42	88,82	0,51	135,15
Mesuji	0,37	113,03	0,47	75,59
Tulang Bawang Barat	0,48	112,66	0,42	85,25
Pesisir Barat	0,36	188,85	0,48	199,54
Kota Bandar Lampung	0,7	130,61	0,66	115,99
Kota Metro	0,52	104,07	0,56	39,43

Berdasarkan perbandingan data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya dinamika peningkatan kapasitas ketahanan daerah yang cukup signifikan di beberapa wilayah.

Kabupaten Lampung Timur menunjukkan peningkatan yang sangat menonjol. Nilai IKD meningkat dari 0,46 pada tahun 2024 menjadi 0,75 pada tahun 2025, atau naik sebesar 0,29 poin. Peningkatan ini menempatkan Lampung Timur dalam kelompok daerah dengan kategori ketahanan tinggi dan sejajar dengan kabupaten/kota dengan nilai IKD tertinggi di Provinsi Lampung seperti Tanggamus dan Way Kanan (0,75). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan, regulasi, serta kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.

Sejalan dengan peningkatan IKD, nilai IRB Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan dari 166,40 pada tahun 2024 menjadi 106,13 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan risiko bencana, di mana peningkatan kapasitas ketahanan daerah berkontribusi terhadap pengendalian tingkat risiko.

Secara komparatif, tidak semua daerah mengalami tren yang sama. Beberapa kabupaten/kota memang menunjukkan peningkatan IKD, namun nilai IRB masih relatif tinggi, seperti Lampung Selatan dan Pesawaran. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas belum sepenuhnya berdampak langsung terhadap penurunan tingkat risiko, yang juga dipengaruhi oleh faktor ancaman dan kerentanan wilayah.

Dengan capaian IKD 0,75 dan penurunan IRB secara signifikan, posisi Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 termasuk dalam kelompok daerah dengan performa ketahanan yang kuat dan menunjukkan korelasi positif antara peningkatan kapasitas dengan pengurangan risiko bencana.

Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa upaya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama periode 2024–2025 memberikan hasil yang terukur dan berdampak nyata terhadap peningkatan ketahanan daerah.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala serta Alternatif Solusi (Pendekatan Evaluatif Berbasis *Gap Analysis*)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mencapai 0,75, meningkat signifikan dari 0,46 pada tahun 2024. Secara kuantitatif, capaian ini menunjukkan lonjakan kapasitas ketahanan yang sangat tinggi dan melampaui target RPJMD (0,44). Namun demikian, peningkatan nilai IKD perlu dianalisis secara substantif untuk memastikan bahwa kenaikan indeks benar-benar mencerminkan peningkatan kapasitas riil, bukan semata peningkatan administratif atau pemenuhan indikator dokumen.

1.) Analisis Keberhasilan (*Strength Analysis*)

Peningkatan IKD 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

- a) Pemenuhan komponen penilaian IKD secara lebih lengkap, terutama pada aspek dokumen perencanaan, regulasi kebencanaan, serta pelaporan kegiatan mitigasi.
- b) Penguatan kelembagaan BPBD, termasuk peningkatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan simulasi kebencanaan.
- c) Ekspansi Desa Tangguh Bencana (Destana) yang meningkatkan skor kapasitas sosial dan kesiapsiagaan masyarakat.
- d) Perbaikan sistem data dan pelaporan ke BNPB, sehingga indikator yang sebelumnya belum terdokumentasi dapat terverifikasi dalam sistem penilaian nasional.

Namun demikian, peningkatan skor yang sangat tajam (dari 0,46 ke 0,75) memerlukan validasi keberlanjutan, mengingat secara empiris peningkatan kapasitas kelembagaan dan sosial biasanya bersifat gradual.

2.) Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Meskipun nilai IKD meningkat signifikan, masih terdapat beberapa kesenjangan strategis:

- a) Sebagian besar peningkatan skor berasal dari pemenuhan dokumen dan regulasi, sementara kesiapan sarana evakuasi, logistik darurat, dan peralatan teknis di beberapa kecamatan belum sepenuhnya merata.
- b) Wilayah dengan risiko tinggi (banjir, kekeringan, kebakaran lahan) belum seluruhnya memiliki infrastruktur mitigasi permanen seperti jalur evakuasi standar, gudang logistik desa, dan sistem peringatan dini lokal.
- c) Respons awal kebencanaan masih bergantung pada BPBD kabupaten, menunjukkan bahwa desentralisasi kapasitas belum optimal.

- d) Belum seluruh perangkat daerah menerapkan pendekatan pembangunan berbasis risiko (risk-informed development), sehingga potensi peningkatan IRB masih terbuka meskipun IKD meningkat.
- e) Perubahan metodologi penilaian IKD dan IRB berpotensi mempengaruhi stabilitas nilai, sehingga ketahanan riil perlu diukur melalui indikator kinerja internal daerah sebagai pembanding.

3.) Analisis Risiko Ke Depan

Meskipun IKD meningkat, IRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 masih berada pada angka 106,13, yang menunjukkan tingkat risiko bencana masih dalam kategori menengah. Hal ini menegaskan bahwa:

- Peningkatan kapasitas belum sepenuhnya mengurangi eksposur dan kerentanan wilayah.
- Faktor ancaman alam (hazard) tetap tinggi dan memerlukan intervensi struktural jangka panjang.

4.) Alternatif Solusi dan Penguatan Strategis

Untuk memastikan peningkatan IKD bersifat substantif dan berkelanjutan, diperlukan langkah perbaikan berikut:

- a) Penguatan kapasitas operasional di tingkat desa, termasuk penyediaan logistik mikro, peralatan evakuasi, dan pembentukan tim siaga berbasis komunitas.
- b) Integrasi pengurangan risiko bencana dalam RKPD dan Renstra perangkat daerah, sehingga seluruh program pembangunan mempertimbangkan analisis risiko.
- c) Standarisasi indikator kinerja internal ketahanan daerah, sebagai instrumen kontrol daerah terhadap fluktuasi metodologi nasional.
- d) Audit kesiapsiagaan berbasis simulasi lapangan, bukan hanya berbasis dokumen, untuk menguji efektivitas respons darurat.
- e) Peningkatan investasi pada mitigasi struktural, seperti normalisasi sungai, penguatan tanggul, serta pengendalian kebakaran lahan.
- f) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome, untuk memastikan bahwa peningkatan IKD berbanding lurus dengan penurunan dampak korban dan kerugian akibat bencana.

Secara kuantitatif, capaian IKD Tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik dan melampaui target. Namun secara evaluatif, peningkatan nilai harus diimbangi dengan penguatan kapasitas operasional dan pemerataan kesiapsiagaan hingga tingkat desa. Ke depan, fokus penguatan perlu diarahkan pada konsistensi kualitas ketahanan riil, bukan hanya pemenuhan indikator administratif.

Pendekatan berbasis *risk-informed development* dan *evidence-based mitigation* menjadi kunci untuk menjaga stabilitas IKD serta memastikan penurunan IRB secara berkelanjutan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, penguatan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan penanganan bencana serta pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi dan penanganan bencana.

Rincian program dan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.11.4 Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran

NO	SASARAN / PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		
		TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN / TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
11	Sasaran Strategis 11			
	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran			
	<i>Indikator Kinerja :</i>			
	<i>Indeks Ketahanan Daerah</i>	0,48	0,75	156,25
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Program Penanggulangan Bencana	1.660.104.619	1.524.711.993	91,84
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.745.679.764	5.540.682.555	96,43

Sumber : LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Berdasarkan data capaian kinerja, indikator Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,48, sedangkan realisasi mencapai 0,75, sehingga capaian kinerja mencapai 156,25% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan target yang direncanakan.

Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah tersebut didukung oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, memperkuat sistem koordinasi penanganan bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Dari sisi penggunaan anggaran, sebagian besar program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang tinggi. Program Penanganan Bencana memiliki tingkat realisasi anggaran sebesar 91,84%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam penanganan bencana telah dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran juga memiliki tingkat realisasi anggaran yang sangat baik yaitu 96,43%. Program ini berperan penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan kejadian kebakaran maupun kondisi darurat

lainnya. Secara umum, pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Tabel 3.3.11.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis 11

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Ketahanan Daerah	0,48	0,75	156,25	±94,13*	Sangat Efisien

Keterangan:

Realisasi anggaran merupakan rata-rata realisasi program yang mendukung pencapaian indikator.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan tingkat realisasi anggaran program pendukung, terlihat bahwa capaian indikator sebesar 156,25% dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 94,13%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dapat dikategorikan sangat efisien, karena capaian kinerja yang diperoleh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kapasitas ketahanan daerah secara signifikan. Meskipun demikian, upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana tetap perlu dilakukan agar ketahanan daerah terhadap bencana dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.3.12 Sasaran Strategis 12

Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pengukuran capaian sasaran strategis ini dilakukan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan indikator komposit untuk menggambarkan kondisi kualitas lingkungan di suatu wilayah. IKLH disusun berdasarkan beberapa komponen utama, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan, yang secara bersama-sama mencerminkan kondisi lingkungan hidup serta efektivitas upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

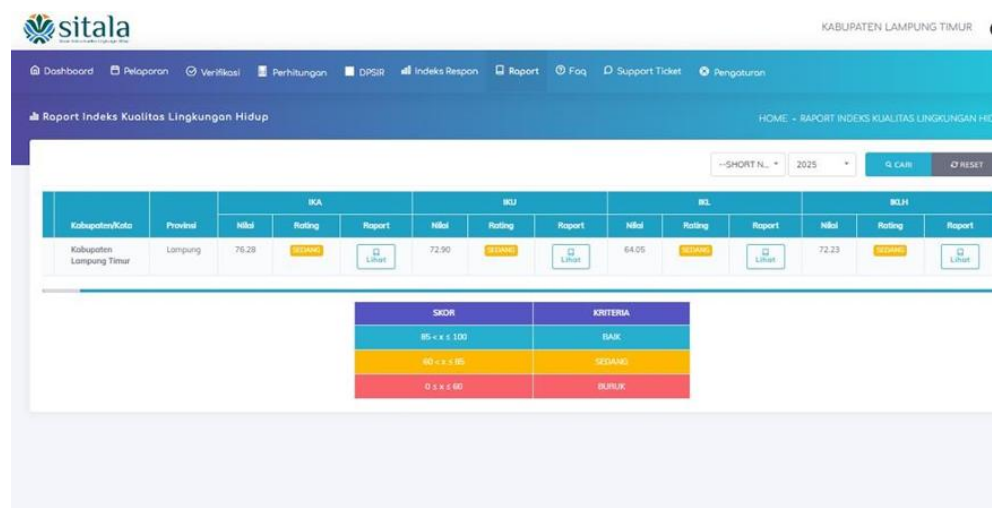
Nilai IKLH menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Peningkatan nilai IKLH menunjukkan adanya perbaikan kondisi lingkungan serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Data capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diperoleh dari hasil pemantauan kualitas lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur serta dihitung melalui sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perhitungan nilai IKLH mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan menggunakan indikator komposit yang terdiri dari Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan pada beberapa titik lokasi yang telah ditetapkan. Untuk pemantauan kualitas udara, dilakukan pengukuran pada empat titik lokasi pemantauan, yaitu Komplek Pemda, Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara, Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu, serta Jalan Raya Lintas Timur. Sementara itu, pemantauan kualitas air dilakukan pada 13 titik pemantauan badan air permukaan yang terdiri dari titik pemantauan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Adapun data kualitas lahan diperoleh berdasarkan data tutupan lahan serta luasan ruang terbuka hijau yang mengacu pada Keputusan Bupati Lampung Timur tentang penetapan lokasi dan luasan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Seluruh hasil pemantauan tersebut kemudian diinput dan dilaporkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Tata Lingkungan (SITALA) IKLH milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan verifikasi serta penghitungan indeks secara otomatis oleh sistem.

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui aplikasi tersebut, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 tercatat sebagai berikut :



Sumber : website <https://sitala.kemenlh.go.id/iklh/targetiklh>

Gambar 3.11 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lampung Timur Tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi IKLH, capaian nilai indeks-indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.12.1
Capaian nilai indeks kualitas lingkungan hidup
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

No	Indeks	Target	Capaian
1	IKLH	68,81	72,23
2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	70,99	76,28
3	IKA (Indeks Kualitas Air)	69,22	72,90
4	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	64,07	64,05

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai IKLH Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 mencapai 72,23 atau melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 68,81. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur berada pada kondisi yang cukup baik dan menunjukkan adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup yang efektif.

Capaian nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh kinerja masing-masing indeks penyusunnya. Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan capaian yang melampaui target, sedangkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) berada sedikit di bawah target yang ditetapkan, namun masih berada pada kisaran nilai yang relatif stabil.

Selanjutnya, untuk melihat lebih jauh tingkat keberhasilan pencapaian indikator tersebut, dilakukan analisis terhadap perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

a. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai IKLH diperoleh dari hasil pemantauan kualitas lingkungan yang dihitung melalui Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator IKLH Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.:

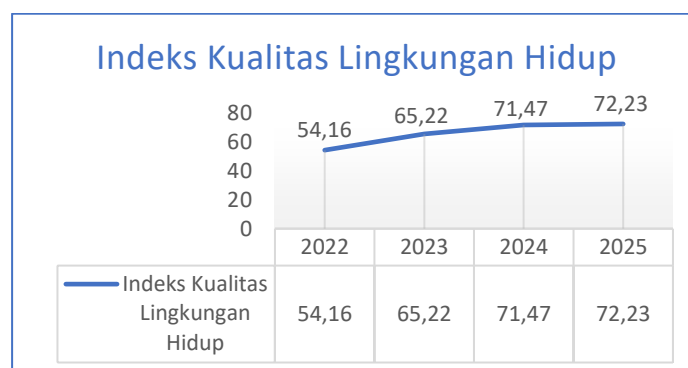
Tabel 3.3.12.2
Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indikator	Target	Realisasi tahun 2025	Capaian kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	68,81	72,23	104,97

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebesar 72,23 dari target 68,81, sehingga capaian kinerja mencapai 104,97% atau telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut dipengaruhi oleh kinerja komponen penyusun IKLH, khususnya Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA) yang berada di atas target sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai IKLH. Sementara itu, Indeks Kualitas Lahan (IKL) masih sedikit di bawah target, namun secara keseluruhan tidak menghambat tercapainya nilai IKLH. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas lingkungan, serta pengelolaan ruang terbuka hijau telah berjalan cukup efektif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022-2025

Untuk melihat perkembangan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan perbandingan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Timur dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi indikator IKLH dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada grafik berikut.:



Gambar 3.12 Grafik Tren Peningkatan IKLH Lampung Timur Tahun 2022-2025

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2022 nilai IKLH sebesar 54,16, kemudian meningkat menjadi 65,22 pada Tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 71,47 pada Tahun 2024.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai program dan kegiatan pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur.

Tren peningkatan ini juga sejalan dengan capaian IKLH Tahun 2025 yang mencapai 72,23, sehingga menunjukkan adanya konsistensi peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur dalam beberapa tahun terakhir.

c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2025 dengan target RPJMD

Untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam periode pembangunan daerah, dilakukan perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana capaian kinerja perangkat daerah berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD.

Perbandingan antara target RPJMD dan realisasi capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sampai dengan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.12.3

Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2024 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2025	Capaian kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	64,99	72,23	111,14%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Tahun 2025 sebesar 72,23, lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 64,99, sehingga capaian kinerja mencapai 111,14%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam dan ruang terbuka hijau yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup.

d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Untuk melihat posisi kinerja daerah secara lebih komprehensif, capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Timur dibandingkan dengan capaian pada tingkat Provinsi Lampung dan Nasional. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur relatif terhadap capaian pada tingkat wilayah yang lebih luas.

Perbandingan capaian IKLH Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi Lampung dan Nasional dalam beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.12.4
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur
Provinsi dan Nasional

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	Realisasi		
	2023	2024	2025
Kabupaten Lampung Timur	65,22	71,47	72,23
Provinsi Lampung	69,91	73,11	Belum tersedia
Nasional	72,54	73,07	76,49

Berdasarkan tabel tersebut, nilai IKLH Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren peningkatan dari 65,22 pada tahun 2023, meningkat menjadi 71,47 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 72,23 pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung, nilai IKLH Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 masih sedikit berada di bawah capaian provinsi sebesar 73,11. Adapun data IKLH Provinsi Lampung Tahun 2025 saat ini belum tersedia, sehingga perbandingan pada tahun tersebut belum dapat dilakukan.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan capaian nasional, nilai IKLH Kabupaten Lampung Timur masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 76,49 pada tahun 2025. Meskipun demikian, tren peningkatan capaian IKLH Kabupaten Lampung Timur menunjukkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, sehingga diharapkan ke depan capaian tersebut dapat semakin mendekati bahkan melampaui rata-rata provinsi maupun nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

1) Penyebab Keberhasilan

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 yang mencapai 72,23 menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- a) Peningkatan kualitas udara yang relatif terjaga karena aktivitas industri besar di wilayah Kabupaten Lampung Timur masih terbatas serta adanya upaya pengendalian pencemaran udara melalui pemantauan kualitas udara secara berkala.
- b) Kegiatan pemantauan kualitas air pada badan air permukaan yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah daerah sehingga dapat mendukung upaya pengendalian pencemaran air.
- c) Pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, yang memiliki tugas melaksanakan

kebijakan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengawasan baku mutu air limbah, pengendalian emisi, serta penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan.

- d) Pelaksanaan berbagai program lingkungan hidup, seperti kegiatan edukasi lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yang turut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

Faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai IKLH, mengingat IKLH merupakan indikator komposit yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara, dan lahan sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan hidup daerah.

2) *Kendala yang Dihadapi*

Meskipun capaian IKLH menunjukkan tren peningkatan, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi peningkatan kualitas lingkungan hidup secara optimal, antara lain:

- a) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang relatif lebih rendah dibandingkan komponen indeks lainnya, yang dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan serta keterbatasan ruang terbuka hijau.
- b) Potensi pencemaran air dari aktivitas domestik dan pertanian, seperti limbah rumah tangga dan penggunaan pupuk maupun pestisida pada sektor pertanian.
- c) Keterbatasan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan, sehingga pengawasan kualitas lingkungan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.
- d) Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup yang masih perlu terus ditingkatkan melalui edukasi dan partisipasi masyarakat.

3) Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah dan akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- a) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, khususnya pada kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara.
- b) Penguatan program pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan, termasuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah.
- c) Peningkatan tutupan lahan dan ruang terbuka hijau, melalui kegiatan penghijauan dan rehabilitasi lahan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
- d) Peningkatan kapasitas pemantauan kualitas lingkungan, baik kualitas udara, air, maupun lahan, guna memperoleh data lingkungan yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- e) Penguatan koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah provinsi maupun instansi terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur dapat terus meningkat sehingga nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun-tahun mendatang dapat semakin mendekati bahkan melampaui capaian pada tingkat provinsi maupun nasional.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai program yang berfokus pada pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui berbagai kegiatan yang

mendukung pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan di suatu wilayah berdasarkan beberapa komponen utama, seperti kualitas air, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan.

Pada tahun 2025, target IKLH Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebesar 68,81, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 72,23, sehingga capaian kinerja mencapai 104,97% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan dibandingkan dengan target yang direncanakan.

Rincian program dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.12.5 Program dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup

NO	SASARAN / PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		
		TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN / TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
12	Sasaran Strategis 12			
	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup			
	<i>Indikator Kinerja :</i>			
	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>	68,81	72,23	104,97
	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
	Program perencanaan lingkungan hidup	55.490.440	48.524.300	87,45
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	165.000.000	154.352.900	93,55
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	959.390.576	832.457.535	86,77
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	35.000.000	26.635.800	76,10
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	91.000.000	84.413.700	92,76
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	27.767.943	10.141.700	36,52
	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	65.000.000	62.036.300	95,44
	Program pengelolaan persampahan	2.462.149.050	2.300.728.555	93,44

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Berdasarkan data pelaksanaan program, berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur.

Program dengan tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi antara lain Program Pengelolaan Persampahan dengan realisasi sebesar 93,44%, yang berperan penting dalam pengelolaan sampah serta pengurangan pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan maupun permukiman. Selain itu, Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki tingkat realisasi sebesar 93,55%, yang mendukung upaya pengendalian dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan.

Program lain yang turut berkontribusi adalah Program Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dengan tingkat realisasi sebesar 87,45%, serta Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan realisasi sebesar 88,77%, yang berfokus pada perlindungan ekosistem serta pelestarian sumber daya alam di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Namun demikian, terdapat beberapa program dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif lebih rendah, seperti Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan realisasi sebesar 36,52%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan agar peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat semakin optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan berbagai program pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, yang menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hidup di daerah ini masih berada dalam kategori baik.

Tabel 3.3.12.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran Strategis 12

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,81	72,23	104,97	±88,54*	Efisien

Keterangan: Realisasi anggaran merupakan rata-rata realisasi program yang mendukung pencapaian indikator.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan tingkat realisasi anggaran program pendukung, terlihat bahwa capaian indikator sebesar 104,97% dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran sekitar 88,54%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dikategorikan efisien, karena capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa program-program pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur. Meskipun demikian, peningkatan peran masyarakat melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan lingkungan hidup perlu terus diperkuat agar kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat semakin meningkat dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

3.4 REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

3.4.1 Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Kinerja

Guna melengkapi analisis capaian kinerja, laporan kinerja ini menyampaikan uraian perbandingan anggaran dalam pencapaian Tujuan/Sasaran yakni realisasi anggaran yang dipergunakan berdasarkan LKPJ Tahun 2025 dibandingkan dengan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.4.1
Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja
berdasarkan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET	REALISASI				ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran Strategis 1 :									
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan									
	Indikator Kinerja :									
	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)		2,5	Persen	7,85	Persen	314			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pendampingan Penggunaan Alat Mesin						9.808.418.311	9.202.843.941	93,83
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya pengawasan penggunaan Sarana pendukung Pertanian	1	Laporan	1	Laporan	100	8.075.481.606	7.828.040.863	96,94
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan Sarana Pertanian	1	Laporan	1	Laporan	100	1.732.936.705	1.374.803.078	79,33
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan Infrastruktur lahan dan air melalui Koordinasi dan Sinkronisasi						1.234.141.394	1.193.289.200	96,69
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terlaksananya Pengadaan benih/bibit dan bantuan untuk budidaya tanaman pangan/Hortikultura/Perkebunan	1	Laporan	1	Laporan	100	1.199.488.220	1.159.646.400	96,68
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	12	Bulan	12	Bulan	100	34.653.174	33.642.800	97,08
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tercapainya Prasarana Pembangunan Pertanian						200.036.385	197.506.052	98,74
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	2	Unit	2	Unit	100	26.456.344	25.123.896	94,96
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	11	Unit	11	Unit	100	124.810.375	123.948.308	99,31
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan BPP Kecamatan serta prasarana	1	Unit	1	Unit	100	23.769.666	23.647.100	99,48
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	1	Unit	1	Unit	100	25.000.000	24.786.747	99,15
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						303.590.341	244.243.931	80,45
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya pengendalian OPT	12	Bulan	12	Bulan	100	76.567.569	72.419.727	94,58
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim	12	Bulan	12	Bulan	100	74.151.250	48.475.604	65,37
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya pencegahan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pertanian	12	Bulan	12	Bulan	100	89.859.600	89.571.600	99,68
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tersedianya sarana dan prasarana pasca bencana alam bidang pertanian dan perkebunan	12	Bulan	12	Bulan	100	63.011.922	33.777.000	53,60
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terpantaunya Perizinan Pertanian						20.234.256	19.369.700	95,73



NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian perizinan usaha pertanian	12	Bulan	12	Bulan	100	10.000.000	9.242.000	92,42
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya penerapanizin usaha pertanian	12	Bulan	12	Bulan	100	10.234.256	10.127.700	98,96
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							652.532.584	513.148.312	78,64
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan Pertanian						652.532.584	513.148.312	78,64
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian	12	Bulan	12	Bulan	100	466.588.957	451.965.693	96,87
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petanidi Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	12	Bulan	12	Bulan	100	165.000.000	40.270.270	24,41
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluh pertanian	8	Unit	8	Unit	100	7.368.627	7.342.449	99,64
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Tersedianya Badan Usaha Milik Petani	12	Bulan	12	Bulan	100	13.575.000	13.569.900	99,96
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap							255.394.058	35.220.865	13,79
	Pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Perikanan Tangkap						126.455.156	20.662.225	16,34
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	dokumen	1	dokumen	100	11.916.968	11.874.156	99,64
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	8	unit	0	unit	0	114.538.188	8.788.069	7,67
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang terfasilitasi dan meningkat kapasitasnya						128.938.902	14.558.640	11,29
	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	20	orang	20	orang	100	44.194.000	7.193.819	16,28
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Keci	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3	kelompok	2	kelompok	66,7	84.744.902	7.364.821	8,69
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							507.475.215	471.235.004	92,86
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya, Alat Budidaya dan Hasil Produksi Perikanan Budidaya						27.141.600	19.914.393	73,37
	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	10	kelompok	10	kelompok	100	27.141.600	19.914.393	73,37
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Penelota Pembudidaya Ikan Kecil dan Hasil Produksi Perikanan Budidaya						480.333.615	451.320.611	93,96
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	32	unit	32	unit	100	401.593.015	374.397.795	93,23
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	4	paket	4	paket	100	78.740.600	76.922.816	97,69
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan							90.000.000	89.983.217	99,98
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pengawas Perikanan Tangkap dan Budidaya Serta Tingkat Pengawasannya						90.000.000	89.983.217	99,98
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	1	dokumen	1	dokumen	100	90.000.000	89.983.217	99,98
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan							302.781.398	123.906.480	40,92
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dan Jumlah Jumlah Konsumsi Ikan perkapita						302.781.398	123.906.480	40,92
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Ton	1	Ton	100	119.693.706	47.708.452	39,86
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah kabupaten kabupaten/kota yang terfasilitasi	20	pelaku usaha	20	pelaku usaha	100	183.087.692	76.198.028	41,62
	2	Sasaran Strategis 2 :								
	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah									
	Indikator Kinerja :									
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		92	Skor	90,12	Skor	97,96			
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							20.509.542	19.603.000	95,58

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan						20.509.542	19.603.000	95,58
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Terlaksananya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1	Laporan	1	Laporan	100	20.509.542	19.603.000	95,58
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							1.588.950.326	1.051.134.422	66,15
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota						1.070.979.733	703.089.637	65,65
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kelembagaan Usaha pangan masyarakat	12	bulan	12	bulan	100	1.030.560.000	662.670.175	64,30
	Koordinasi danSinkronisasiPemantauan Stok,Pasokan dan HargaPangan PokokStrategis	Terpantaunya harga pangan pokok di pasar daerah	12	Bulan	12	Bulan	100	40.419.733	40.419.462	100,00
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terpantaunya pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun						517.970.593	348.044.785	67,19
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Skor Pola Pangan Harapan	1	Laporan	1	Laporan	100	26.645.000	19.070.400	71,57
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersalurunya bantuan Benih sayuran , Budidaya Hidroponik	1	Laporan	1	Laporan	100	491.325.593	328.974.385	66,96
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							304.355.032	252.317.618	82,90
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Tersusunnya petan kerentanan dan ketahanan pangan						10.000.000	9.944.500	99,45
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta Ketahanan Pangan	1	Buku	1	Buku	100	10.000.000	9.944.500	99,45
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota						294.355.032	242.373.118	82,34
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersalurunya cadangan pangan	1	Laporan	1	Laporan	100	294.355.032	242.373.118	82,34
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							239.416.422	131.491.700	54,92
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota						239.416.422	131.491.700	54,92
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar	12	Bulan	12	Bulan	100	239.416.422	131.491.700	54,92	
3	Sasaran Strategis 3									
Meningkatnya kemandirian infrastruktur daerah										
Indikator Kinerja :										
Indeks Infrastruktur Daerah			0,45	Indeks	0,55	Indeks	122,22			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola SDA yang diberdayakan	17	Orang/ Kelompok	17	Orang/ Kelompok	100	1.911.130.000	1.775.439.616	92,90	
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	17	Lembaga	17	Lembaga	100	11.130.000	9.714.600	87,28	
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	3	KM	3	KM	100	1.900.000.000	1.765.725.016	92,93	
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (KM)	1	KM	1	KM	100	4.517.658.672	3.955.004.071	87,55	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang direhabilitasi	1	KM	1	KM	100	2.976.133.302	2.495.977.925	83,87	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	40	KM	40	KM	100	1.074.390.408	1.067.980.350	99,40	
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	1	Tahun	1	Tahun		10.249.000	8.990.000	87,72	
Operasional Kelembagaan Pengelolaan Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1	Tahun	1	Tahun		10.000.000	9.890.351	98,90	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen teknis & lingkungan selesai dan memenuhi standar	1	Dokumen	1	Dokumen		446.885.962	372.165.445	83,28	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga pengguna sumber air minum bersih	700	Rumah Tangga	700	Rumah Tangga	100	5.437.196.811	3.944.146.576	72,54	
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Terbangunnya sistem penyediaan air minum	600	Rumah Tangga	600	Rumah Tangga	100	3.422.423.396	2.816.421.843	82,29	

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100	522.116.570	22.078.500	4,23
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya sistem penyediaan air minum	50	Rumah Tangga	50	Rumah Tangga	100	103.162.209	3.288.800	3,19
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya sistem penyediaan air minum	50	Rumah Tangga	50	Rumah Tangga	100	1.389.494.636	1.102.357.432	79,34
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					-				
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas BAB	120	Rumah Tangga	120	Rumah Tangga	100	1.788.822.409	1.664.905.312	93,07
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Fasilitas BAB	120	Rumah Tangga	120	Rumah Tangga	100	1.778.333.173	1.654.832.822	93,06
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100	10.489.236	10.072.490	96,03
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					-				
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan bebas genangan Meningkatnya Kawasan Bebas Genangan (%)	3	Lokasi	3	Lokasi	100	2.430.938.626	2.339.418.343	96,24
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan Terbangun	3817	M	3817	M	100	2.430.938.626	2.339.418.343	96,24
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					-				
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tertangani	2	Unit	2	Unit	100	12.374.434.291	11.025.951.362	89,10
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	120	Dokumen	120	Dokumen	100	112.398.036	62.254.200	55,39
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit	2	Unit	100	3.233.355.932	3.002.712.693	92,87
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2	Bangunan Gedung	2	Bangunan Gedung	100	9.028.680.323	7.960.984.469	88,17
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					-				
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	100	%	100	%	100	21.223.900.740	11.803.165.234	55,61
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	10	Unit	10	Unit	100	21.223.900.740	11.803.165.234	55,61
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan Jembatan Kabupaten terbangun	146	KM	146	KM	100	186.444.390.779	175.342.638.383	94,05
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100	110.911.009	62.236.009	56,11
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1158	KM	1158	KM	100	1.461.541.158	1.447.202.270	99,02
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	79	KM	79	KM	100	153.136.949.393	144.195.579.574	94,16
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Berkala	10	KM	10	KM	100	16.688.008.134	16.441.903.277	98,53
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	3	KM	3	KM	100	7.134.889.899	6.276.108.488	87,96
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2	Jembatan	2	Jembatan	100	4.969.506.876	4.474.781.966	90,04
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	5	Jembatan	5	Jembatan	100	2.942.584.311	2.444.826.800	83,08
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi tersertifikasi	100	%	0	%	0	432.881.734	43.401.538	10,03	

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Dilatih	15	Orang	0	Orang	0	208.057.837	20.814.270	10,00
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	15	Orang	0	Orang	0	224.823.897	22.587.268	10,05
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan rekomendasi Izin pemanfaatan ruang	100	%	100	%	100	977.253.400	609.264.726	62,34
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	Dokumen	1	Dokumen	100	977.253.400	609.264.726	62,34
4	Sasaran Strategis 4									
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia									
	Indikator Kinerja :									
	Indeks Pembangunan Manusia		73,75	Indeks	73,92	Indeks	100,2			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK (Paud, SD dan SMP), APM (SD,SMP)						247.582.254.166	245.625.193.041	99,21
	Kegiatan Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar.						135.796.037.689	135.152.614.602	99,53
	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (APBD dan DAK)	72	ruang	72	ruang	100	4.583.953.384	4.469.151.902	97,50
	Rehabilitasi Sedang/Berat RuangGuru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang direhabilitasi sedang/berat.	6	ruang	6	ruang	100	853.205.406	836.834.145	98,08
	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	130	paket	130	paket	100	2.383.954.190	2.358.197.178	98,92
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia berupa peralatan drumband dan PJOK	25	paket	25	paket	100	697.383.453	685.506.225	98,30
	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	350	Peserta didik	350	Peserta didik	100	435.607.000	268.279.837	61,59
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	110	Orang	110	Orang	100	117.782.500	100.822.500	85,60
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200	Orang	200	Orang	100	188.447.500	179.564.544	95,29
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	580	Satuan Pendidikan	580	Satuan Pendidikan	100,00	95.940.000	84.389.968	87,96
	Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	580	Satuan Pendidikan	580	Satuan Pendidikan	100	77.542.600.000	77.515.066.900	99,96
	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SD	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	424	orang	424	orang	100	154.207.000	137.906.870	89,43
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi(TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,Informasi dan Teknologi (TIK) untuk Pendidikan	200	orang	200	orang	100	171.997.000	163.166.704	94,87
	Pengembangan Konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan	160	orang	160	orang	100	139.055.000	129.005.000	92,77
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan Penggunaan aplikasi di bidang yang dilaksanakan	200	orang	200	orang	100	172.307.500	159.257.500	92,43
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	2	kegiatan	2	kegiatan	100	186.000.000	169.249.957	90,99
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	3	Komunitas	3	Komunitas	100	173.740.000	162.380.000	93,46
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	44	ruang	44	ruang	100	8.653.606.451	8.609.915.701	99,50
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400	orang	400	orang	100	270.580.500	248.914.500	91,99
	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	580	Satuan pendidikan	580	Satuan pendidikan	100	232.650.000	197.510.180	84,90
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	254	ruang	254	ruang	100	34.366.411.415	34.326.301.888	99,88
	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	456	Peserta didik	456	Peserta didik	100	339.330.000	320.303.394	94,39



NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN			
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia berupa media pendidikan dan TIK	40	paket	40	paket	100	4.037.279.390	4.030.889.709	99,84	
	Kegiatan Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama						70.733.792.933	69.992.183.281	98,95	
	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun (APBD dan DAK)	28	unit	28	unit	100	4.786.076.568	4.705.995.934	98,33	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedar/Berat	77	ruang	77	ruang	100	5.659.063.407	5.592.334.246	98,82	
	Rehabilitasi Sedar/Berat Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedar/Berat	7	Unit	7	Unit	100	2.097.831.578	2.096.556.393	99,94	
	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	62	Paket	62	Paket	100	1.271.928.900	1.241.232.066	97,59	
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia berupa peralatan drumband, alat kesenian dan PJOK	25	paket	25	paket	100	814.623.490	798.042.053	97,96	
	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	240	Peserta didik	240	Peserta didik	100,00	341.054.988	338.623.191	99,29	
	Pembinaan Minat, Bakat dan KreativitasSiswa	umlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250	Peserta didik	250	Peserta didik	100,00	363.330.000	136.637.790	37,61	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	orang	100	orang	100	126.300.000	110.937.378	87,84	
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400	orang	400	orang	100	276.428.000	260.384.908	94,20	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	185	Satuan pendidikan	185	Satuan pendidikan	100	153.200.000	133.000.813	86,82	
	Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	189	Satuan pendidikan	189	Satuan pendidikan	100	45.828.300.000	45.828.300.000	100,00	
	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	189	orang	189	orang	100	128.900.000	117.299.780	91,00	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Teknologi (TIK) untuk Pendidikan	200	orang	200	orang	100	175.397.000	151.270.583	86,24	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180	orang	180	orang	100	142.055.000	136.855.000	96,34	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	2	kegiatan	2	kegiatan	100	173.158.808	162.282.230	93,72	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	10	Komunitas	10	Komunitas	100	210.030.000	195.090.000	92,89	
	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar	189	Satuan pendidikan	189	Satuan pendidikan	100	408.300.000	376.883.329	92,31	
	Pembangunan ruang kelas baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	26	ruang	26	ruang	100	6.358.480.404	6.227.505.374	97,94	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400	orang	400	orang	100	270.015.000	243.888.394	90,32	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10	Paket	10	Paket	100	1.149.319.790	1.139.063.819	99,11	
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)							37.388.376.789	36.999.505.252	98,96
	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	174	unit	173	unit	99,43	9.196.973.643	9.055.321.733	98,46	
	Pengadaan mebel Paud	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	40	paket	40	paket	100	685.219.000	609.265.731	88,92	
	Pengadaan perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang tersedia	10	paket	10	paket	100	281.269.163	273.188.663	97,13	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50	Peserta didik	0	Peserta didik	0	110.000.000	80.000.000	72,73	
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasiensi pendidik PAUD	300	orang	300	orang	100	129.410.775	127.610.775	98,61	
Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	873	Satuan pendidikan	873	Satuan pendidikan	100	400.000.000	395.800.000	98,95		

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	841	Satuan pendidikan	841	Satuan pendidikan	100	16.837.200.000	16.837.200.000	100,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	841	orang	841	orang	100	415.000.000	405.100.000	97,61
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200	orang	200	orang	100	200.800.100	198.200.000	98,71
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	kegiatan	2	dokumen	100	300.000.000	295.200.000	98,40
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	2	Komunitas	2	Komunitas	100	136.893.500	127.333.500	93,02
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22	ruang	22	ruang	100	4.086.386.400	4.064.863.147	99,47
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30	orang	30	orang	100	132.814.310	129.303.310	97,36
	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar	873	Satuan pendidikan	873	Satuan pendidikan	100	123.502.880	122.602.880	99,27
	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	25	ruang	25	ruang	100	3.621.342.618	3.580.174.414	98,86
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	53	Paket	53	Paket	100	731.564.400	698.341.099	95,46
	Kegiatan Pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan anak nonformal/kesetaraan						3.664.046.755	3.480.889.906	95,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan non formal/kesetaraan	50	orang	50	orang	100	226.000.000	128.793.000	56,99
	Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	80	orang	80	orang	100	111.030.400	111.030.400	100,00
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	22	satuan pendidikan	22	satuan pendidikan	100	329.577.995	244.528.146	74,19
	Pengelolaan dana BOP sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang mengelola BOP	22	satuan pendidikan	22	satuan pendidikan	100	2.904.300.000	2.904.300.000	100,00
	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah peserta didik kesetaraan yang mengikuti proses belajar	100	Peserta didik	100	Peserta didik	100	93.138.360	92.238.360	99,03
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidik ASN bersertifikat						28.779.472.215	28.705.893.786	99,74
	Kegiatan Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan						28.779.472.215	28.705.893.786	99,74
	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2. dan 6.232	Dokumen, orang	2. dan 6.232	Dokumen, orang	100	28.679.472.215	28.608.943.786	99,75
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	laporan	1	laporan	100	100.000.000	96.950.000	96,95
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100	%	100	%	100	86.822.795.853	80.037.339.209	92,18
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100	%	100	%	100	37.076.552.745	35.316.147.593	95,25
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	Unit	1	Unit	100	4.441.270.965	3.993.783.800	89,92
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	Unit	1	Unit	100	891.643.610	823.432.953	92,35
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	15	Unit	15	Unit	100	8.321.196.847	8.089.242.875	97,21
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	Unit	4	Unit	100	207.479.610	100.055.401	48,22
	Rehabilitas dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	Unit	1	Unit	100	446.058.586	419.636.300	94,08
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan	4	Unit	4	Unit	100	1.863.913.995	1.835.375.295	98,47



NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya								
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	171	Unit	171	Unit	100	6.925.204.604	6.583.621.557	95,07
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	206	unit	206	unit	100	306.683.177	295.174.794	96,25
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	33	Paket	33	Paket	100	13.480.038.951	13.042.113.686	96,75
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	285553	Keluarga	0	Keluarga	-	20.443.200	-	0,00
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	144	Paket	144	Paket	100	172.619.200	133.710.932	77,46
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100	%	82	%	81,5	49.595.280.467	44.600.750.016	89,93
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinas Kesehatan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14286	Orang	11789	Orang	83	402.984.800	363.780.893	90,27
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinas Kesehatan)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14286	Orang	12333	Orang	86	316.440.000	190.772.904	60,29
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinas Kesehatan)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14156	Orang	12121	Orang	86	896.960.000	525.475.500	58,58
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Dinas Kesehatan)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50716	Orang	50555	Orang	100	102.743.200	101.050.350	98,35
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinas Kesehatan)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160384	Orang	154750	Orang	96	323.956.100	293.101.850	90,48
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinas Kesehatan)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	446900	Orang	306538	Orang	69	1.105.615.564	1.065.309.859	96,35
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinas Kesehatan)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120260	Orang	115861	Orang	96	938.268.483	925.314.000	98,62
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinas Kesehatan)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136000	Orang	91786	Orang	67	227.119.800	219.193.300	96,51
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dinas Kesehatan)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12774	Orang	12185	Orang	95	288.598.460	270.970.000	93,89
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinas Kesehatan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1846	Orang	1846	Orang	100	216.781.636	200.899.030	92,67
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13057	Orang	13057	Orang	100	665.978.200	622.270.000	93,44
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinas Kesehatan)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17330	Orang	13339	Orang	77	370.164.052	278.510.800	75,24
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	Dokumen	5	Dokumen	100	676.160.700	559.882.315	82,80
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32	Dokumen	17	Dokumen	53	83.475.000	9.050.000	10,84
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7	Dokumen	1	Dokumen	14	108.681.550	18.780.100	17,28
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21	Dokumen	12	Dokumen	57	642.928.500	444.665.219	69,16
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	17	Dokumen	12	Dokumen	71	15.795.084	8.212.000	51,99
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	Dokumen	3	Dokumen	60	103.989.000	43.668.000	41,99
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dinas Kesehatan)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	446	Orang	514	Orang	115	7.034.000	7.014.000	99,72
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dinas Kesehatan)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50	Orang	45	Orang	90	20.750.600	3.530.800	17,02



NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	32	Dokumen	28	Dokumen	88	124.798.820	89.797.000	71,95
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	47	Dokumen	12	Dokumen	26	835.326.378	723.365.200	86,60
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8	Dokumen	8	Dokumen	100	39.020.429.677	36.092.632.429	92,50
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah (Dinas Kesehatan)	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	4458	Orang	7168	Orang	161	18.084.900	12.426.100	68,71
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Dinas Kesehatan)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	208	Paket	116	Paket	56	342.962.412	203.991.000	59,48
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	70	Dokumen	70	Dokumen	100	1.108.860.949	898.832.212	81,06
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinas Kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5	Dokumen	3	Dokumen	60	3.150.000	2.000.000	63,49
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7	Dokumen	7	Dokumen	100	35.545.100	35.053.375	98,62
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3269	Orang	1895	Orang	58	22.388.300	14.400.000	64,32
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (Dinas Kesehatan)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	285	Orang	285	Orang	100	59.073.420	34.021.290	57,59
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Dinas Kesehatan)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2653	Orang	640	Orang	24	51.440.900	11.280.000	21,93
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok (Dinas Kesehatan)	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2	Tatanan	2	Tatanan	100	8.819.900	8.248.900	93,53
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Dinas Kesehatan)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2	Dokumen	1	Dokumen	50	75.000.000	12.309.998	16,41
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	15	Dokumen	15	Dokumen	100	43.904.982	33.187.432	75,59
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Dinas Kesehatan)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	7	Dokumen	7	Dokumen	100	331.070.000	277.754.160	83,90
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100	%	100	%	100	66.423.829	56.463.200	85,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3	Dokumen	3	Dokumen	100	66.423.829	56.463.200	85,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100	%	100	%	100	84.538.812	63.978.400	75,68
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	70	Unit	70	Unit	100	84.538.812	63.978.400	75,68
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)	100	%	92	%	92	2.789.337.350	2.383.103.099	85,44
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek	100	%	92	%	92	15.246.800	15.076.800	98,89
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25	dokumen	25	dokumen	100	15.246.800	15.076.800	98,89
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	100	%	92	%	92	1.649.534.900	1.404.187.949	85,13
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	Dokumen	2	Dokumen	100	47.143.600	30.537.749	64,78
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	36	Orang	33	Orang	92	1.486.500.000	1.313.000.000	88,33
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	Dokumen	10	Dokumen	100	115.891.300	60.650.200	52,33
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan	75	%	75	%	100	1.124.555.650	963.838.350	85,71
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	120	Orang	120	Orang	100	1.124.555.650	963.838.350	85,71

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)	95	%	41	%	44	602.020.000	294.361.600	48,90
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin	100	%	100	%	100	93.787.000	87.771.900	93,59
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	47	Dokumen	47	Dokumen	100	93.787.000	87.771.900	93,59
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT	65	%	55	%	85	315.427.000	167.482.700	53,10
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	204	Dokumen	48	Dokumen	24	315.427.000	167.482.700	53,10
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar	100	%	91	%	91	192.806.000	39.107.000	20,28
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	171	Dokumen	103	Dokumen	60	192.806.000	39.107.000	20,28
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	67	%	88	%	132	944.426.080	372.033.800	39,39
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan gemas	50	%	50		100	125.175.200	78.070.000	62,37
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	43	Dokumen	41	Dokumen	95	125.175.200	78.070.000	62,37
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	100	%	98	%	98	177.871.080	153.805.000	86,47
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	16	Dokumen	16	Dokumen	100	151.259.680	139.385.000	92,15
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	35	keluarga	34	keluarga	97	26.611.400	14.420.000	54,19
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	80	%	100	%	125	641.379.800	140.158.800	21,85
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14	Dokumen	12	Dokumen	86	641.379.800	140.158.800	21,85
5	Sasaran Strategis 5									
	Menurunnya persentase penduduk miskin									
	Indikator Kinerja :									
	Persentase Penduduk Miskin		12,97	Persen	12,15	Persen	106,75			
	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)						1.585.436.674	1.080.132.375	68,13
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kaupaten/Kota	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi						1.585.436.674	1.080.132.375	68,13
	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24	orang	24	orang	100,00	470.000.000	387.160.700	82,37
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	43798	keluarga	43798	keluarga	100,00	1.023.208.200	625.377.000	61,12
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20	sertifikat	20	sertifikat	100,00	92.228.474	67.594.675	73,29
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS ditangani (%)						1.138.026.633	977.834.073	85,92

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang cacat yang trauma, yang mandiri						708.791.609	551.389.273	77,79
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	255	orang	255	orang	100,00	360.250.000	251.096.795	69,70
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	75	orang	75	orang	100,00	32.494.544	32.406.478	99,73
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	orang	20	orang	100,00	269.453.648	253.847.900	94,21
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	orang	3	orang	60,00	16.598.480	6.245.400	37,63
	Pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	orang	3	orang	60,00	16.452.937	2.990.800	18,18
	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	orang	3	orang	60,00	13.542.000	4.801.900	35,46
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Cakupan (Eks Narapidana,PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)						429.235.024	426.444.800	99,35
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	48	orang	48	orang	100,00	429.235.024	426.444.800	99,35
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)						418.009.000	360.847.562	86,33
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan PMKS yang difasilitasi						418.009.000	360.847.562	86,33
	Pendataan Fakir Miskin an Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	69214	orang	69214	orang	100,00	128.009.000	102.037.662	79,71
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	157333	keluarga	157333	keluarga	100,00	230.000.000	228.835.000	99,49
	Facilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	28	orang	56,00	60.000.000	29.974.900	49,96
	Program Penanganan Bencana	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)						370.425.000	350.466.480	94,61
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard						272.000.000	258.927.480	95,19
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1049	orang	1049	orang	100,00	252.000.000	250.557.480	99,43
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsian Kewenangan Kabupateb/Kota	6	unit	3	unit	50,00	20.000.000	8.370.000	41,85
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupate/Kota	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana						98.425.000	91.539.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	57	orang	57	orang	100,00	98.425.000	91.539.000	93,00
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)						126.400.000	121.151.600	95,85
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan						126.400.000	121.151.600	95,85
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	68.400.000	65.072.800	95,14
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3	Laporan	3	Laporan	100,00	58.000.000	56.078.800	96,69
6	Sasaran Strategis 6									
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah									
	Indikator Kinerja :									
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).		4,35	Persen	4,65	Persen	106,9			

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi	100	%	51	%	51,28	54.392.701	47.855.144	87,98
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	20	unit usaha	21	unit usaha	105,00	54.392.701	47.855.144	87,98
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	80	unit usaha	21	unit usaha	26,25	54.392.701	47.855.144	87,98
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi menyelenggarakan RAT tepat waktu	60	%	32	%	53,42	32.363.495	31.602.800	97,65
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang diwilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	25	unit usaha	26	unit usaha	104,00	32.363.495	31.602.800	97,65
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	9	unit usaha	9	unit usaha	100,00	10.810.175	10.809.600	99,99
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	16	unit usaha	17	unit usaha	106,25	21.553.320	20.793.200	96,47
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	8	%				11.274.230	11.004.100	97,60
	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang dinilai usahanya	25	unit usaha	9	unit usaha	36,00	11.274.230	11.004.100	97,60
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	8	unit usaha	9	unit usaha	112,50	11.274.230	11.004.100	97,60
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan pengurus koperasi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan koperasi	50	%	6	%	11,60	39.677.230	39.406.496	99,32
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat pemahaman dan pengetahuan perkoperasiannya	40	unit usaha	24	unit usaha	60,00	39.677.230	39.406.496	99,32
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	70	orang	70	orang	100,00	39.677.230	39.406.496	99,32
	PROGRAM PEMBEERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	72	%	68	%	94,39	772.620.229	754.173.586	97,61
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaku usaha unggul dan kompetitif	40	unit usaha	40	unit usaha	100,00	772.620.229	754.173.586	97,61
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	264	unit usaha	264	unit usaha	100,00	772.620.229	754.173.586	97,61
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil	18	%			-	1.251.594.227	410.218.270	32,78
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Cakupan UMKM yang dibina	2	%	0	%	19,00	1.251.594.227	410.218.270	32,78
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	286	unit usaha	182	unit	63,64	1.251.594.227	410.218.270	32,78
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	100	orang	70	orang	70,00	41.143.915	39.379.800	95,71
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan masyarakat yang dilatih dengan pelatihan berbasis kompetensi	80	orang	70	orang	87,50	31.255.915	29.492.000	94,36
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	80	orang	70	orang	87,50	31.255.915	29.492.000	94,36
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	55	Lembaga	6	lembaga	10,91	9.888.000	9.887.800	100,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	5	lembaga	6	lembaga	120,00	9.888.000	9.887.800	100,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga yang ditempatkan didalam negeri	100	orang			-	618.647.190	563.221.766	91,04
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya media penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan	12	bulan	12	bulan	100,00	7.646.843	7.641.179	99,93
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi pasar kerja online	500	dokumen	659	dokumen	131,80	7.646.843	7.641.179	99,93
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitasi dan bantuan dari pemerintah daerah kepada PMI bermasalah	100	%	100	%	100,00	611.000.347	555.580.587	90,93
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	1547	orang	1540	orang	99,55	605.000.000	549.580.240	90,84	
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1000	orang	5657	orang	565,70	6.000.347	6.000.347	100,00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan penyelesaian perselisihan tenaga kerja	100	%	100	%	100,00	77.716.769	67.315.486	86,62	

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan pengesahan PP dan PKB serta pelaksanaan Jamsostek	100	%	25	%	25,00	9.453.302	9.269.987	98,06
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12	laporan	9	laporan	75,00	9.453.302	9.269.987	98,06
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terbnyanya hubungan industrial yang kondusif dan harmonis	100	%	80	%	80,00	68.263.467	58.045.499	85,03
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	3	perkara	4	perkara	133,33	11.038.638	10.269.712	93,03
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	lembaga	1	lembaga	100,00	57.224.829	47.775.787	83,49
URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN								797.526.438	693.844.540	87,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan jumlah industri	5	Persen				749.540.291	683.108.483	91,14
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terbentuknya kebijakan pelaksanaan pembangunan industri kabupaten (Road Map Industri)	100	Persen				749.540.291	683.108.483	91,14
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaa n Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	2	dokumen	2	dokumen	100	117.160.211	93.860.515	80,11
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan saran dan prasarana industri	1	dokumen	1	dokumen	100	281.798.253	265.119.857	94,08
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	5	dokumen	5	dokumen	100,00	350.581.827	324.128.111	92,45
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri berizin	90	Persen				23.612.092	-	0,00
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Terbitnya IUI, IPUI, IUKI dan IPKI berbasis SINAS	100	Persen				23.612.092	-	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kabupaten/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal dala Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat.	10	dokumen	6	dokumen	60,00	11.697.027	-	0,00
	Fasilitasi verifikasi Pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen laporan verifikasi Pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui Sistem Informasi industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA), bagi penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skla usaha Industri Kecil dan Industri Menengan, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenagan pemerintah Pusat.	10	dokumen	1	dokumen	10,00	11.915.065	-	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			80	Persen	100	Persen	125	24.374.055	10.736.057	44,05
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan informasi industri untuk informasi IUI, IPUI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota	100	Persen	100	Persen	100	24.374.055	10.736.057	44,05
	Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten /kota sistem informasi industri nasional SIINAS	24	dokumen	8	dokumen	33,333 3	24.374.055	10.736.057	44,05
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			73	Persen				10.644.636	5.973.400	56,12
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Peningkatan jumlah usaha pelaku usaha yang memiliki izin usaha perdagangan	50	Pelaku usaha				10.644.636	5.973.400	56,12
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan	20	Dokumen	10	Dokumen	50	10.644.636	5.973.400	56,12

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar	10	Persen				1.194.899.202	1.114.561.261	93,28
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya saran perdagangan	100	Persen				44.393.791	30.698.400	69,15
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	9	Unit	7	Unit	77,78	44.393.791	30.698.400	69,15
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Petugas pengelola Pasar Daerah yang produktif	216	Orang				1.150.505.411	1.083.862.861	94,21
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	12	Dokumen	12	Dokumen	100	465.078.133	424.692.155	91,32
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	12	Dokumen	12	Dokumen	100	685.427.278	659.170.706	96,17
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5	Persen				421.695.030	409.817.095	97,18
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kota dapat dikendalikan dengan baik	100	Persen				413.192.914	404.407.895	97,87
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	12	laporan	12	laporan	100	278.345.599	277.029.195	99,53
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	12	laporan	12	laporan	100	134.847.315	127.378.700	94,46
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	80	Persen				8.502.116	5.409.200	63,62
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90 %	2	laporan	2	laporan	100	8.502.116	5.409.200	63,62
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan jumlah ekspor	2	Persen				659.912.281	492.145.055	74,58
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas produk unggulan dalam daerah	100	Persen				659.912.281	492.145.055	74,58
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	5	pelaku usaha	5	pelaku usaha	100	552.689.125	431.494.555	78,07
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	12	pelaku usaha	12	pelaku usaha	-	106.570.248	60.650.500	56,91
	Misi dagang bagi produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	1	pelaku usaha	0	pelaku usaha	0	652.908	-	0,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan alat UTTP (ukuran,takaran,timbangan dan perlengkapannya) bertanda tera sah	85	Persen				68.372.644	67.574.920	98,83
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya pelayanan Tera/Tera Ulang AUTTP	25	Persen				68.372.644	67.574.920	98,83
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur,alat takar,alat timbang,dan alat perlengkapan ditera ulang	702	unit	1439	unit	204,99	63.857.084	63.751.800	99,84
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	24	orang	16	orang	66,67	3.880.667	3.823.120	98,52
	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah unit hasil penyidikan metrologi legal	20	unit	0	unit	0,00	634.893	-	0,00
7	Sasaran Strategis 7									
	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat									
	Indikator Kinerja :									
	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk		0,92	Rasio	0,92	Rasio	100			
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum							9.826.236.275	9.600.040.347	97,70
	Penanganan Gangguan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							9.711.251.665	9.488.238.359	97,70
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Koordinasi hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten kota	2	Dokumen	2	Dokumen	100	22.153.400	20.661.300	93,26
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil PemberdayaanPerlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	Dokumen	3	Dokumen	75	97.777.415	86.212.588	88,17

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM satpol pp dan satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	33	orang	33	Kegiatan	100,00	200.886.204	200.811.200	99,96
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	2	Dokumen	2	Laporan	100,00	32.073.600	27.839.400	86,80
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	4.250.303	4.247.300	99,93
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional PolPP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah aparatur satpolpp yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja	195	orang	60	orang	30,77	133.373.548	112.445.571	84,31
	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional polpp, promosi dan kenaikan jenjang jabatan	3	Orang	3	Orang	100,00	4.306.000	2.720.000	63,17
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota satpolpp dan satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis satpolpp dan satlinmas	25	Orang	25	orang	100,00	14.350.400	7.750.000	54,01
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5	Laporan	5	Laporan	100,00	9.172.730.795	9.005.307.600	98,17
	Penindakan AtasGangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	12.500.000	12.375.000	99,00
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkara yang terlayani jumlah laporan pemerineran pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan perkara yang terlayani	5	Laporan	3	Laporan	60,00	16.850.000	7.868.400	46,70
	Penegakan peratura Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							90.884.212	89.761.300	98,76
	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	Laporan	4	Laporan	100,00	8.450.000	8.374.800	99,11
	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3.450.303	3.450.000	99,99
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah dokumen Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	1	Laporan	1	Laporan	100,00	900.775	900.300	99,95
	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	Laporan	5	Laporan	100,00	7.026.844	6.951.600	98,93
	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah perkara yang dapat disidangkan	5	Laporan	4	Laporan	80,00	7.050.078	6.600.000	93,62
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Pemberkasan hasil Penyidikan atas Penegak Peraturan Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	8.310.078	8.250.000	99,28
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	12	Laporan	12	Laporan	100	20.966.367	20.772.900	99,08
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepla daerah Sesuai SOP	2	Dokumen	2	Laporan	100	14.539.900	14.530.000	99,93
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati	Jumlah laporan hasil Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati	12	Laporan	11	Laporan	91,67	20.189.867	19.931.700	98,72
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							24.100.398	22.040.688	91,45
	Pembentukan Sekretariat PPNS	Jumlah pembinaan penyidik pegawai negri sipil (PPNS)	2	Laporan	2	Laporan	100,00	7.775.398	6.304.388	81,08
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Julah dokumen hasil pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	3	Laporan	3	Laporan	100,00	15.875.000	15.286.300	96,29
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPNS penegak peraturan daerah	1	Laporan	1	Laporan	100,00	450.000	450.000	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET	REALISASI				ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Sasaran Strategis 8									
	Meningkatnya kualitas layanan publik									
	Indikator Kinerja 1 :									
	Indeks Pelayanan Publik		4,03	Indeks	3,66	Indeks	90,82			
	Facilitasi Pelayanan Publik dan TataLaksana	Laporan Pelaksanaan Fasilitas Pelayanan Publik dan TataLaksana	10	Dokumen	10	Dokumen	100	106.478.675	90.854.500	85,33
	Indikator Kinerja 2 :									
	Indeks Kepuasan Masyarakat		85	Indeks	87,76	Indeks	103,25			
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan TataLaksana	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik	2	Dokumen	2	Dokumen	100	107.850.209	80.791.420	74,91
9	Sasaran Strategis 9									
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah									
	Indikator Kinerja 1:									
	Opini BPK/WTP (opini)		WTP	Opini	WTP	Opini	100			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							513.570.330.440	499.035.205.815	97,17
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Administrasi keuangan daerah sesuai aturan						2.501.000.000	2.122.849.325	84,88
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS se-Kabupaten Lampung timur	2	dokumen	2	dokumen	100%	169.504.405	158.337.075	93,41
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya perubahan KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	2	dokumen	2	dokumen	100%	145.987.784	142.638.600	97,71
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	51	dokumen	51	dokumen	100%	43.008.900	37.639.450	87,52
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	51	dokumen	51	dokumen	100%	47.765.909	46.589.325	97,54
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	51	dokumen	51	dokumen	100%	56.048.510	54.148.975	96,61
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA SKPD se-Kabupaten Lampung Timur	51	dokumen	51	dokumen	100%	121.489.665	121.091.450	99,67
	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	3	dokumen	3	dokumen	100%	833.095.840	784.999.375	94,23
	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	3	dokumen	3	dokumen	100%	325.637.400	302.114.525	92,78
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya regulasi dan kebijakan Anggaran Kabupaten Lampung Timur	2	dokumen	2	dokumen	100%	296.590.086	226.203.000	76,27
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	dokumen	1	dokumen	100%	44.038.653	24.866.750	56,47
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	dokumen	1	dokumen	100%	138.759.025	119.884.650	86,40
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya koordinasi Perencanaan anggaran Pembiayaan	1	dokumen	1	dokumen	100%	105.000.301	104.336.150	99,37
	Pembinaan Penganggaran daerah pemerintah kabupaten/ kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran daerah pemerintah kabupaten/ kota	58	Orang	0	Orang	0%	174.073.522	-	0,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							920.125.313	888.897.213	96,61
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	264	dokumen	264	dokumen	100%	115.125.313	113.054.215	98,20
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	612	dokumen	612	dokumen	100%	70.000.000	69.863.875	99,81
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	60	dokumen	60	dokumen	100%	100.000.000	92.305.697	92,31
	Koodinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	700	dokumen	700	dokumen	100%	160.000.000	159.138.899	99,46
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotong dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	1	dokumen	1	dokumen	100%	70.000.000	69.871.725	99,82
	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	12	dokumen	12	dokumen	100%	65.000.000	64.917.475	99,87

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	102	orang	102	orang	100%	340.000.000	319.745.327	94,04
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							762.825.347	725.151.995	95,06
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	1	dokumen	1	dokumen	100%	107.903.194	105.383.875	97,67
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulan, triwulan dan semesteran	3	dokumen	3	dokumen	100%	78.616.412	76.261.821	97,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan PEMDA	1	dokumen	1	dokumen	100%	192.527.839	182.866.775	94,98
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur	1	dokumen	1	dokumen	100%	77.329.881	70.661.450	91,38
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	dokumen	1	dokumen	100%	54.814.773	52.329.625	95,47
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya koordinasi , sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1	dokumen	1	dokumen	100%	30.368.348	24.754.250	81,51
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan akuntansi , pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60	orang	60	orang	100%	221.264.900	212.894.199	96,22
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							509.290.958.486	495.209.080.032	97,24
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6	Laporan	6	Laporan	100%	509.290.958.486	495.209.080.032	97,24
	Pengelolaan Data dan Implmentasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							95.421.294	89.227.250	93,51
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya implementasi dan pemeliharaan sistem Informasi pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah	1	dokumen	1	dokumen	100%	95.421.294	89.227.250	93,51
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							2.505.419.000	1.510.728.620	
	Pengelolaan Barang Milik Derah							2.505.419.000	1.510.728.620	60,30
	Penyusunan standar harga	Terlaksananya Penyusunan standar harga	2	dokumen	2	dokumen	100%	162.300.000	102.723.000	63,29
	Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	363.599.999	234.302.646	64,44
	Pengamanan barang milik daerah	Terlaksananya Pengamanan barang milik daerah	1	Laporan	1	Laporan	100%	467.880.945	235.703.500	50,38
	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	1	Laporan	1	Laporan	100%	429.350.000	328.436.527	76,50
	Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	dokumen	2	dokumen	100%	487.268.276	328.530.802	67,42
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	2	Laporan	2	Laporan	100%	306.400.000	281.032.145	91,72
	Pembinaan pengelolaan Barang Milik Dearah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60	orang	0	orang	0%	288.619.780	-	0,00
Indikator Kinerja 2 :										
Nilai SAKIP			B	Nilai	B	Nilai	100			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100	139.411.865	112.213.032	80,49
10	Sasaran Strategis 10									
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah										
Indikator Kinerja :										
Pertumbuhan investasi daerah			20	Persen	23,26	Persen	116,3			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								596.970.897	439.279.723	73,58
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Meniadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								89.208.134	88.548.240	99,26

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	dokumen	1	dokumen	100	89.208.134	88.548.240	99,26
	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan	1	dokumen	1	dokumen	100			
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						100	507.762.763	350.731.483	69,07
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Derah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) rencana Umum Penanaman Modal Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	1	dokumen	1	dokumen	100	92.344.152	91.462.660	99,05
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi	1	dokumen	1	dokumen	25	415.418.611	259.268.823	62,41
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							282.464.211	281.555.910	99,68
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							282.464.211	281.555.910	99,68
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota	0	dokumen	0	dokumen	10	200.000.000	199.966.790	99,98
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal kabupaten / Kota	1	dokumen	1	dokumen	10	82.464.211	81.589.120	98,94
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							579.065.738	564.993.924	97,57
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							579.065.738	564.993.924	97,57
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah yang menjadi kewenangan kabuapten/kota	1	dokumen	1	dokumen	100			
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui/sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15	Pelaku Usaha	15	Pelaku Usaha	100	535.000.000	521.217.324	97,42
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10	Pelaku Usaha	10	Kegiatan Usaha	100	16.897.792	16.681.000	98,72
	Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10	Pelaku Usaha	10	Pelaku Usaha	100	27.167.946	27.095.600	99,73
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							56.851.083	54.947.926	96,65
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							56.851.083	54.947.926	96,65
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usaha nya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usaha nya	24	Kegiatan Usaha	24	Kegiatan Usaha	100	10.081.576	8.281.576	82,15
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	15	Pelaku Usaha	15	Pelaku Usaha	100			
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan usaha dari Pelaku dilakukan Infeksi Lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan Pelaksanaan perizinan berusaha	20	Kegiatan Usaha	20	Kegiatan Usaha	100	46.769.507	46.666.350	99,78
11	Sasaran Strategis 11									
	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran									
	Indikator Kinerja :									
	Indeks Ketahanan Daerah		0,48	Indeks	0,75	Indeks	156,25			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							1.660.104.619	1.524.711.993	91,84
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							80.000.000	77.339.350	96,67
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	35	orang	620	orang	100	80.000.000	77.339.350	96,67

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							785.339.923	710.119.203	90,42
	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5	kawasan	4	kawasan	80	53.404.716	51.185.700	95,84
	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	18	orang	18	orang	100	108.459.400	105.810.000	97,56
	Penyusunan rencana kontijensi kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1	dokumen	1	dokumen	100	52.405.413	29.449.646	56,20
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	252	unit	618	unit	245,24	330.103.895	310.104.597	93,94
	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kab/kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12	laporan	12	laporan	100	192.767.882	169.780.172	88,07
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5	kawasan	12	kawasan	240	48.198.617	43.789.088	90,85
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							794.764.696	737.253.440	92,76
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	dokumen	1	dokumen	100	540.753.031	525.631.489	97,20
	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	15	orang	15	orang	100	88.310.560	71.773.970	81,27
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150	orang	521	orang	347,33	165.701.105	139.847.981	84,40
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							166.483.000	133.091.232	79,94
	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	dokumen	1	dokumen	100	75.000.000	61.021.112	81,36
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	dokumen	1	dokumen	100	91.483.000	72.070.120	78,78
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							5.745.679.764	5.540.682.555	96,43
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							5.610.192.848	5.432.075.155	96,83
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12	dokumen	12	dokumen	100	20.256.822	20.063.893	99,05
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	12	Laporan	100	1.528.854.667	1.467.219.680	95,97
	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	dokumen	1	dokumen		345.408.283	345.057.871	99,90
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	31	Orang	31	Orang	100	251.724.461	251.407.300	99,87
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12	unit	56	unit	466,67	3.452.305.420	3.337.099.011	96,66
	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah perbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	dokumen	1	dokumen	100	11.643.196	11.227.400	96,43
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran							135.486.916	108.607.400	80,16



NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA				CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN		
			TARGET		REALISASI			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5		6	7	8	9
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	10	desa	56	desa		135.486.916	108.607.400	80,16
12	Sasaran Strategis 12									
	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup									
	Indikator Kinerja :									
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		68,81	Indeks		Indeks				
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia (%)						55.490.440	48.524.300	87,45
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						15.490.440	10.814.200	69,81
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2		2		100,00	15.490.440	10.814.200	69,81
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen KLHS Kab/ Kota						40.000.000	37.710.100	94,28
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	1		1		100,00	20.000.000	18.661.400	93,31
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota	1		1		100,00	20.000.000	19.048.700	95,24
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani (%)						165.000.000	154.352.900	93,55
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terwujudnya Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan						140.000.000	129.633.800	92,60
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	55		55		100,00	30.000.000	22.912.100	76,37
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3		3		100,00	50.000.000	49.211.200	98,42
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3		3		100,00	60.000.000	57.510.500	95,85
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Lingkungan						25.000.000	24.719.100	98,88
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1		1		100,00	25.000.000	24.719.100	98,88
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kabupaten (%)						959.390.576	832.457.535	86,77
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						959.390.576	832.457.535	86,77
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8		8		100,00	915.726.012	793.975.285	86,70
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	34		90		264,71	43.664.564	38.482.250	88,13
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase keberhasilan pengendalian B3 dan limbah B3 (%)						35.000.000	26.635.800	76,10
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3						35.000.000	26.635.800	76,10
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20		20		100,00	35.000.000	26.635.800	76,10
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan (%) (TPB)						91.000.000	84.413.700	92,76
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terbinanya Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan Usaha Terkait Izin PPLH						91.000.000	84.413.700	92,76
	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1		1		100,00	30.000.000	28.574.900	95,25
	Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh	Jumlah Badan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Diawasi	75		78		104,00	61.000.000	55.838.800	91,54

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	PENDANAAN			
			TARGET	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- Undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan (%))					27.767.943	10.141.700	36,52
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH					27.767.943	10.141.700	36,52
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4		4	100,00	10.705.612	10.141.700	94,73
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	10		0	0,00	17.062.331	-	0,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani (%)) (TPB)					65.000.000	62.036.300	95,44
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan / atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan					65.000.000	62.036.300	95,44
	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	12		17	141,67	65.000.000	62.036.300	95,44
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah (%)) (TPB)					2.462.149.050	2.300.728.555	93,44
	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah Yang Dipilah,Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota					2.462.149.050	2.300.728.555	93,44
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6		6	100,00	29.463.670	28.832.800	97,86
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	2		2	100,00	675.199.214	625.303.717	92,61
	Penanganan Sampah Melalui Pengoprasian dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	720		720	100,00	1.757.486.166	1.646.592.038	93,69

Sumber : LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2025



**Laporan Kinerja
Intansi Pemerintah Daerah
Kabupaten lampung Timur
Tahun 2025**

**BAB 4
PENUTUP**

KABUPATEN LAMPUNG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

2026

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026, dalam masa transisi menuju RPJMD Tahun 2025–2029.

Secara umum, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan stabil, dengan sebagian besar indikator mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Beberapa capaian strategis Tahun 2025 antara lain:

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET REALISASI CAPAIAN		
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,5	7,85	314
2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92	90,12	97,96
3	Meningkatnya kemandirian infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	0,45	0,55	122,22
4	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,75	73,92	100,2
5	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	12,97	12,15	106,75
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	4,35	4,65	106,9
7	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk	0,92	0,92	100
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,03	3,66	90,82
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87,76	103,25
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	100
		Nilai SAKIP	B	B	100



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET REALISASI CAPAIAN		
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Pertumbuhan investasi daerah	20	23,26	116,30
11	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah.	0,48	0,75	156,25
12	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	68,81	72,23	104,97

Secara keseluruhan, kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1.) Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- 2.) Sebagian besar indikator strategis menunjukkan tren positif dan konsisten dibanding tahun sebelumnya.
- 3.) Penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja terus mengalami perbaikan.
- 4.) Tantangan pembangunan masih memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Dengan berbagai capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah secara berkelanjutan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, serta memperhatikan catatan perbaikan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu melakukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan dampak pembangunan pada Tahun 2026.

Rekomendasi perbaikan difokuskan pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal sebagai berikut:

a. Penguatan Perencanaan Kinerja

- 1) Melakukan reviu dan penyempurnaan *cascading* kinerja dari level pemerintah daerah hingga unit operasional dengan memastikan keterkaitan

logis antar level, berbasis *logical framework* dan *critical success factor* (CSF).

- 2) Menyempurnakan rumusan sasaran dan indikator kinerja agar lebih berorientasi hasil (*outcome-oriented*) serta berdampak langsung kepada masyarakat.
- 3) Menetapkan target kinerja yang lebih menantang (*challenging*) dan berkelanjutan (*sustainable performance*) dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.
- 4) Mengintegrasikan pengurangan risiko dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan daerah.

b. Penguatan Pengukuran dan Monitoring Kinerja

- 1) Mengembangkan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
- 2) Memastikan seluruh indikator kinerja memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala (triwulanan) dengan umpan balik dua arah kepada perangkat daerah.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan pembinaan (*punishment*).

c. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja

- 1) Meningkatkan kualitas analisis dalam laporan kinerja dengan memperkuat pembahasan faktor pendukung, hambatan, serta analisis efisiensi dan efektivitas anggaran.
- 2) Melakukan benchmarking terhadap capaian kabupaten/kota lain, provinsi, maupun nasional untuk indikator strategis.
- 3) Memastikan laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penetapan target tahun berikutnya.

d. Penguatan Evaluasi Internal dan Pengawasan

1. Menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil evaluasi internal agar lebih substantif dan menasar akar permasalahan.
3. Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi secara berkala dan terdokumentasi.
4. Memperkuat peran Inspektorat sebagai *quality assurance* dalam implementasi SAKIP.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi Tahun 2025 sebagai dasar perbaikan sistem manajemen kinerja pada Tahun 2026, dengan orientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pencapaian hasil pembangunan yang lebih berdampak, terukur, dan berkelanjutan.



**Laporan Kinerja
Intansi Pemerintah Daerah
Kabupaten lampung Timur
Tahun 2025**

LAMPIRAN

BUPATI LAMPUNG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

2026



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELA SITI NURYAMAH**

Jabatan : Bupati Lampung Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sukadana, September 2025

Bupati Lampung Timur,



Ela Siti Nuryamah
Ela Siti Nuryamah

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,5
2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor PPH	92
3	Meningkatnya kemantapan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	0,45
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,75
5	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)	12,97
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,35
7	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 penduduk	0,92
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,03
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP (opini)	WTP
		Nilai SAKIP	B
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Pertumbuhan investasi daerah (%)	20
11	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,48
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,81

PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2025-PERUBAHAN

NO	URUSAN / PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	3	4
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	880,396,083,705	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	276,361,726,381	
	1 Program Pengelolaan Pendidikan	247,582,254,166	APBD
	2 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	28,779,472,215	APBD
2	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	339,212,903,385	
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	222,043,824,980	APBD

NO	URUSAN / PROGRAM		JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2		3	4
	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	112,565,613,875	APBD
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,789,337,350	APBD
	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	602,020,000	APBD
	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,212,107,180	APBD
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		201,076,452,071	
	1	Program Penyelenggaraan Jalan	186,444,390,779	APBD
	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6,428,788,672	APBD
	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5,437,196,811	APBD
	4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,788,822,409	APBD
	5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	977,253,400	APBD
4	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		34,736,658,786	
	1	Program Pengembangan Perumahan	350,993,666	APBD
	2	Program Kawasan Permukiman	3,849,047,848	APBD
	3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	30,536,617,272	APBD
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		25,496,445,775	
	1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8,127,190,621	APBD
	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,797,087,771	APBD
	3	Program Penanggulangan Bencana	1,826,587,619	APBD
	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	5,745,579,764	APBD
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		3,511,897,307	
	1	Program Pemberdayaan Sosial	1,585,436,674	APBD
	2	Program Rehabilitasi Sosial	1,138,026,633	APBD
	3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	418,009,000	APBD
	4	Program Penanganan Bencana	370,425,000	APBD
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		109,273,469,073	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		737,507,379	
	1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	41,143,915	APBD
	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	618,646,695	APBD
	3	Program Hubungan Industrial	77,716,769	APBD
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1,045,401,161	
	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	227,201,161	APBD
	2	Program Perlindungan Perempuan	220,750,000	APBD
	3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	247,540,000	APBD
	5	Program Perlindungan Khusus Anak	349,910,000	APBD

NO	URUSAN / PROGRAM		JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2		3	4
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		2,153,231,322	
	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	20,509,542	APBD
	2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,588,950,326	APBD
	3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	304,355,032	APBD
	4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	239,416,422	APBD
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		2,141,222,965	
	1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	47,522,782	APBD
	2	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	2,054,554,972	APBD
	3	Program Penatagunaan Tanah	39,145,211	APBD
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		11,455,763,783	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,594,965,774	APBD
	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	55,490,440	APBD
	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	165,000,000	APBD
	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	959,390,576	APBD
	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	35,000,000	APBD
	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	91,000,000	APBD
	7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	27,767,943	APBD
	8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	65,000,000	APBD
	9	Program Pengelolaan Persampahan	2,462,149,050	APBD
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		8,084,897,659	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,539,532,933	APBD
	2	Program Pendaftaran Penduduk	1,014,250,840	APBD
	3	Program Pencatatan Sipil	128,252,031	APBD
	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	402,861,855	APBD
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		7,639,658,150	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,860,980,150	APBD
	2	Program Penataan Desa	50,000,000	APBD
	3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1,326,782,000	APBD
	4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,401,896,000	APBD
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		6,926,085,400	
	1	Program Pengendalian Penduduk	767,612,000	APBD
	2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6,158,473,400	APBD

NO	URUSAN / PROGRAM		JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2		3	4
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		23,032,141,447	
	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18,043,649,600	APBD
	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,988,491,847	APBD
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		10,853,584,040	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,132,502,861	APBD
	2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2,797,508,242	APBD
	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,923,572,937	APBD
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		9,050,288,018	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,887,365,906	APBD
	2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	54,392,701	APBD
	3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	32,363,495	APBD
	4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	12,274,230	APBD
	5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	39,677,230	APBD
	6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	772,620,229	APBD
	7	Program Pengembangan Umkm	1,251,594,227	APBD
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		7,141,118,055	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,625,766,126	APBD
	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	596,970,897	APBD
	3	Program Promosi Penanaman Modal	282,464,211	APBD
	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	579,065,738	APBD
	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	56,851,083	APBD
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		9,885,452,920	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,069,575,224	APBD
	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,294,000,000	APBD
	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,521,877,696	APBD
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		186,521,395	
	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	186,521,395	APBD
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		139,109,066	
	1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	139,109,066	APBD
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		2,750,222,626	
	1	Program Pengembangan Kebudayaan	1,825,313,114	APBD
	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	626,456,232	APBD
	3	Program Pembinaan Sejarah	72,226,000	APBD
	4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	226,227,280	APBD
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		5,916,783,660	

NO	URUSAN / PROGRAM		JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2		3	4
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,745,647,293	APBD
	2	Program Pembinaan Perpustakaan	171,136,367	APBD
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		134,480,027	
	1	Program Pengelolaan Arsip	134,480,027	APBD
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		44,013,222,644	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN		2,806,718,640	
	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	255,394,058	APBD
	2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	507,475,215	APBD
	3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	90,000,000	APBD
	4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	302,781,398	APBD
	5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,502,067,969	APBD
	6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	50,000,000	APBD
	7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	60,000,000	APBD
	8	Program Perizinan Usaha Pertanian	39,000,000	APBD
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		2,070,864,426	
	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	516,369,750	APBD
	2	Program Pemasaran Pariwisata	764,579,980	APBD
	3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	789,914,696	APBD
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		30,014,311,054	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,793,357,783	APBD
	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9,808,418,311	APBD
	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1,434,177,779	APBD
	4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	305,590,341	APBD
	5	Program Perizinan Usaha Pertanian	20,234,256	APBD
	6	Program Penyuluhan Pertanian	652,532,584	APBD
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		8,323,802,086	
	1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10,644,636	APBD
	2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,194,899,202	APBD
	3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	421,695,030	APBD
	4	Program Pengembangan Ekspor	659,912,281	APBD
	5	Program Standarrisasi Dan Perlindungan Konsumen	68,372,644	APBD
	6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,968,278,293	APBD
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		797,526,438	
	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	749,540,291	APBD
	2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	23,612,092	APBD

NO	URUSAN / PROGRAM		JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2		3	4
	3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	24,374,055	APBD
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		682,433,284,031	
1	Sekretariat Daerah		66,735,618,404	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51,008,249,776	APBD
	2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	13,630,414,850	APBD
	3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,096,953,778	APBD
2	Sekretariat DPRD		69,301,127,076	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45,539,044,097	APBD
	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	23,762,082,979	APBD
3	Perencanaan		11,677,970,044	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,122,305,836	APBD
	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	826,545,136	APBD
	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,729,119,072	APBD
4	Keuangan		525,855,675,213	
	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	502,570,330,440	APBD
	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,303,419,000	APBD
	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,858,449,397	APBD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7,123,476,376	APBD
5	Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan		8,365,487,921	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,714,174,199	APBD
	2	Program Kepegawaian Daerah	1,608,869,871	APBD
	3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	42,443,851	APBD
6	Penelitian Dan Pengembangan		497,405,373	
	1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	497,405,373	APBD
V	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		19,219,592,842	
	Inspektorat Daerah		19,219,592,842	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,864,694,347	APBD
	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,249,659,820	APBD
	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	105,238,675	APBD
VI	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		5,723,033,253	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		5,723,033,253	
	1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	94,149,304	APBD
	2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	56,246,242	APBD

NO	URUSAN / PROGRAM		JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2		3	4
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		630,000,000	APBD
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1,119,499,075	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3,794,192,077	APBD
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		28,946,555	APBD

Sukadana, September 2025

Bupati Lampung Timur,



Ela Siti Nuryamah